



# Laporan Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut  
Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

# MEMBANGUN ZONA  
INTEGRITAS WBK WBBM

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan Tahun 2025 Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong. Laporan Kinerja (LKj) LPSPL Sorong Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kontrak kinerja yang telah disepakati. Pada Tahun 2025 kami sampaikan capaian indikator kinerja pada Tahun 2025, perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025, analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya, analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi, kegiatan pendukung, rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025, dan realisasi anggaran yang terserap pada Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan LPSPL Sorong tahun 2025.



Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk secara bersama-sama berupaya mencapai target kinerja sesuai yang telah disepakati pada tahun 2025 ini. Semoga LKj ini dapat menjadi salah satu masukan bagi organisasi yang lebih luas sebagai upaya perbaikan demi kemajuan pengelolaan kelautan dan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan ini, karenanya kami mohon maaf dan masukan serta kritik maupun evaluasi yang membangun akan kami terima dengan senang hati sebagai perbaikan di masa mendatang.

Sorong, 23 Januari 2026

Kepala LPSPL Sorong



Hendrik Sonho, S.P., M.Si.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun secara periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada LKj Tahun 2025 ini telah mendukung pelaksanaan rencana strategis DJPKRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan kinerja (LKj) LPSPL Sorong Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggung jawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan LPSPL Sorong dalam jangka waktu 1 (satu) triwulan dari Bulan Juli sampai Bulan September 2025. Pada pelaporan LKj Tahun 2025 data capaian dan target LPSPL Sorong telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan dalam folder [bit.ly/SAKIPDJPK2025](https://bit.ly/SAKIPDJPK2025) serta sesuai dengan format Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen KP No. 35/PERMEN-KP/2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Pada tahun triwulan III tahun 2025 LPSPL Sorong memiliki target 17 Indikator Kinerja (IK), dengan rincian :

1. LPSPL Sorong mempunyai 2 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target kinerja diantaranya:
  - a. IK 1 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi) Sorong tercapai 6 Provinsi dari target 3 Provinsi dengan persentase kinerjaku 120,00%
  - b. IK 2 Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang) tercapai 27 orang dari target 20 orang dengan persentase kinerjaku 120%,

- c. IK 3 Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) tercapai 5 jenis dari target 3 jenis dengan persentase kinerjaku 120%
  - d. IK 4 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai) tercapai 99,92 dari target 80 dengan persentase kinerjaku 120%
  - e. IK 6 Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) tercapai 88,10, jenis dari target 80 jenis dengan persentase kinerjaku 110,12%
  - f. IK 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai) tercapai 78,10 dari target 89 dengan persentase capaian 85,89%
  - g. IK 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai) tercapai 98,57 dari target 81,5 dengan persentase capaian 120,00%
  - h. IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks) tercapai 85,98 dari target 80 dengan persentase capaian 107,47%
  - i. IK 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%) tercapai 98,88 dari target 85 dengan persentase capaian 116,33%
  - j. IK 12 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai) tercapai 81,64 dari target 75 dengan persentase capaian 108,85%
  - k. IK 14 Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) tercapai 88,50 dari target 80 dengan persentase capaian 110,63%
  - l. IK 15 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%) tercapai 100 dari target 76 dengan persentase capaian 120,00%
  - m. IK 16 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) lingkup LPSPL Sorong (%) tercapai 100 dari target 91 dengan persentase capaian 109,89%
2. LPSPL Sorong mempunyai 1 indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target kinerja yaitu:

- a. IK 5 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen) tercapai 1 dokumen dari target 1 dokumen dengan persentase capaian 100%,
  - b. IK 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen) tercapai 2 dokumen dari target 2 dokumen dengan persentase capaian 100%,
  - c. IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen) tercapai 4 dokumen dari target 4 dokumen dengan persentase capaian 100%,
3. LPSPL Sorong mempunyai 1 indikator kinerja yang capaiannya dibawah target kinerja yaitu IK 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai) tercapai 78,10 dari target 89 dengan persentase capaian 84,89.

Dalam rangka mendukung kinerja LPSPL Sorong pada tahun anggaran 2025, DIPA awal LPSPL Sorong tahun 2025 sebesar Rp40.227.209.000 yang bersumber dari Rupiah Murni Rp8,450,539,000,00; PNPB sebesar Rp1,625,000,000,00 dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp30,151,670,000,00 yang terbit pada tanggal 30 November 2024 dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tanggal 24 Januari 2025. Hal ini juga sesuai dengan DIPA Petikan pagu definitif (pagu awal) tahun 2025 dengan Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477440/2025 tanggal 2 Desember 2024. Anggaran tersebut mendukung 3 (tiga) program yaitu program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp30,651,670,000,00, program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp1.125.000.000,00, dan program dukungan manajemen sebesar Rp8.450.539.000,00. Jika dijabarkan 3 program tersebut menjadi 4 kegiatan yaitu (1) Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut sebesar Rp30,651,670,000,00,00; (2) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp300,000,000,00; (3) Perencanaan Ruang Laut sebesar Rp825,000,000,00; dan (4) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp8,450,539,000,00. Pada revisi DIPA 1 s.d 4 terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp10.502.610.000,00 yang terdapat pada belanja 52 sedangkan pada Revisi DIPA ke 5 tanggal 17 Juni 2025 dengan nomor SP DIPA- 032.07.2.477440/2025 terdapat pembukaan blokir dana yang bersumber dari PNPB sebesar Rp882.895.000,00 sehingga total anggaran yang diblokir sebesar Rp 9.619.715.000,00.

Realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Rincian serapan anggaran LPSPL Sorong Per RO (Lampiran V) yaitu Rp 7,291,063,470 atau 18.12% dari anggaran Rp40,227,209,000. Dalam rangka mendukung kinerja LPSPL Sorong pada tahun anggaran 2025, DIPA awal LPSPL Sorong tahun 2025 sebesar Rp40.227.209.000 yang bersumber dari Rupiah Murni Rp8,450,539,000,00; PNBPNP sebesar Rp1,625,000,000,00 dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp30,151,670,000,00 yang terbit pada tanggal 30 November 2024 dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tanggal 24 Januari 2025. Hal ini juga sesuai dengan DIPA Petikan pagu definitif (pagu awal) tahun 2025 dengan Nomor: SP DIPA-032.07.2.477440/2025 tanggal 2 Desember 2024. Anggaran tersebut mendukung 3 (tiga) program yaitu program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp30,651,670,000,00, program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp1.125.000.000,00, dan program dukungan manajemen sebesar Rp8.450.539.000,00. Jika dijabarkan 3 program tersebut menjadi 4 kegiatan yaitu (1) Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut sebesar Rp30,651,670,000,00,00; (2) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp300,000,000,00,00; (3) Perencanaan Ruang Laut sebesar Rp825,000,000,00,00; dan (4) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp8,450,539,000,00. Pada revisi DIPA 1 s.d 4 terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp10.502.610.000,00 yang terdapat pada belanja 52 sedangkan pada Revisi DIPA ke 5 tanggal 17 Juni 2025 dengan nomor SP DIPA- 032.07.2.477440/2025 terdapat pembukaan blokir dana yang bersumber dari PNBPNP sebesar Rp882.895.000,00 sehingga total anggaran yang diblokir sebesar Rp 9.619.715.000,00. Revisi DIPA ke 9 tanggal 30 Oktober 2025 dengan nomor SP DPA-032.07.2.477.440/2025 kode DS 4418-0015-6114-4300 terdapat perubahan anggaran menjadi (1) Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut sebesar Rp30,651,670,000,00,00; (2) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp300,000,000,00,00; (3) Perencanaan Ruang Laut sebesar Rp3,825,000,000,00,00; dan (4) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp7,443,472,000,00,00.

Realisasi anggaran pada tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Rincian serapan anggaran LPSPL Sorong Per RO (Lampiran V) yaitu Rp26,825,564,248 atau 36,46% dari anggaran Rp42,220,142,000

Pengukuran Kinerja capaian kinerja LPSPL Sorong dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian dengan realisasi indikator kinerja utama atau indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan yang tercantum di Perjanjian Kinerja (PK). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan III Tahun 2025 adalah **112,65** (kategori Baik) (*kinerjaku.kkp.go.id*).

Guna meningkatkan capaian kinerja LPSPL Sorong pada tahun berikutnya perlu dilakukan beberapa perbaikan diantaranya

1. Tahun 2025 LPSPL Sorong memiliki nilai deviasi halaman III DIPA yang tinggi dan pengelolaan UP TUP yang rendah hal ini menyebabkan IK Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran tidak tercapai, oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan RPD dengan realisasi anggaran, pemantauan UP TUP dan pemantauan IKPA secara berkala
2. Terdapat perpindahan sejumlah pegawai yang disebabkan oleh pemekaran organisasi akibatnya jumlah pegawai semakin sedikit, oleh karena itu direkomendasikan untuk melakukan analisis beban kinerja tahun 2025, dialog kinerja dan pembuatan matriks peran hasil untuk membagi pekerjaan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi pegawai

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                                                 | <b>ii</b>   |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>                                                                                                                            | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                                     | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                                                                   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                                                                                                  | <b>xi</b>   |
| <b>1 PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                                                  | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                                                                    | 1           |
| 1.2 Tujuan.....                                                                                                                                             | 1           |
| 1.3 Isu Strategis ( <i>Strategic Issues</i> ) .....                                                                                                         | 1           |
| 1.4 Tugas dan Fungsi.....                                                                                                                                   | 4           |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....                                                                                                                             | 7           |
| <b>2 PERENCANAAN KINERJA.....</b>                                                                                                                           | <b>8</b>    |
| 2.1 Rencana Strategis 2024-2029 .....                                                                                                                       | 8           |
| 2.2 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2025.....                                                                                               | 10          |
| <b>3 AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>                                                                                                                         | <b>15</b>   |
| 3.1 Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong.....                                | 17          |
| 3.1.1. Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi) .....         | 17          |
| 3.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong .....                           | 32          |
| 3.2.1. IK 2 Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang) .....                         | 32          |
| 3.3 Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong.... | 36          |
| 3.3.1. IK 3 Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) .....                         | 36          |
| 3.4 Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja LPSPL Sorong.....                                                                   | 40          |

|          |                                                                                                                                              |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.4.1.   | IK 4 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai).....           | 40         |
| 3.5      | Sasaran Kegiatan 5 Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan pulau – pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong.....                       | 45         |
| 3.5.1.   | IK 5 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen).....                          | 45         |
| 3.6      | Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong..... | 51         |
| 3.6.1.   | IK 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen) .....                    | 51         |
| 3.7      | Sasaran Kegiatan 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong.....                                               | 56         |
| 3.7.1.   | IK 6 Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) .....                                                                                       | 57         |
| 3.7.2.   | IK 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai) .....                                                  | 60         |
| 3.7.3.   | IK 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) .....                                                                   | 64         |
| 3.7.4.   | IK 9 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen).....                                                                           | 71         |
| 3.7.5.   | IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks) .....                                                                         | 74         |
| 3.7.6.   | IK 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%).....                        | 77         |
| 3.7.7.   | IK 12 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup LPSPL Sorong (%).....                                                                       | 80         |
| 3.7.8.   | IK 13 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai) .....                                                             | 82         |
| 3.7.9.   | IK 16 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) .....                                                                  | 92         |
| 3.8.     | Akuntabilitas Anggaran .....                                                                                                                 | 96         |
| 3.9.     | Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya .....                                                                                 | 103        |
| <b>4</b> | <b>PENUTUP .....</b>                                                                                                                         | <b>112</b> |
| 4.1.     | Kesimpulan.....                                                                                                                              | 112        |
| 4.2.     | Rekomendasi .....                                                                                                                            | 114        |
| 4.3.     | Tindaklanjut Atas Rekomendasi Periode Sebelumnya.....                                                                                        | 114        |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Lokasi satuan kerja dan wilayah kerja LPSPL Sorong .....                                                                                     | 6  |
| Tabel 1.2 Komposisi Pegawai LPSPL Sorong .....                                                                                                         | 7  |
| Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2025 berdasarkan PK LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan .....       | 11 |
| Tabel 2.2 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2025 berdasarkan PK LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut .....        | 13 |
| Tabel 2.3 Perubahan anggaran pada perubahan kedua Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong dengan DJPRL dan DJPK .....                                          | 14 |
| Tabel 3.1 IK Target dan Realisasi Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2025 .....                                                                                | 15 |
| Tabel 3.2 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi) ..... | 18 |
| Tabel 3.3 Capaian IKU 2 Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang) .....        | 32 |
| Tabel 3.4 Capaian IK 3 Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) .....         | 37 |
| Tabel 3.5 IK 4 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai) .....          | 41 |
| Tabel 3.6 LKE Penilaian Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong .....         | 42 |
| Tabel 3.7 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen) .....                              | 46 |
| Tabel 3.8 Matriks Profil dan Status Perizinan Pemanfaatan PPK di Raja Ampat .....                                                                      | 47 |
| Tabel 3.9 Matriks Profil Pemanfaatan PPK di Maluku Utara (Hasil Survei Lapangan) .....                                                                 | 48 |
| Tabel 3.10. Ringkasan Profil Pemanfaatan di Provinsi Maluku .....                                                                                      | 49 |
| Tabel 3.11 Capaian IK 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen) .....           | 52 |
| Tabel 3.12. Jumlah subjek hukum yang telah masuk tahap verifikasi berdasarkan Provinsi .....                                                           | 53 |
| Tabel 3.13 Kategori nilai PM SAKIP .....                                                                                                               | 57 |
| Tabel 3.14 Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) .....                                                                                   | 58 |
| Tabel 3.15 Hasil Penilaian AKIP pada LPSPL Sorong Tahun 2025 .....                                                                                     | 58 |
| Tabel 3.16 Bobot Penilaian IKPA .....                                                                                                                  | 61 |
| Tabel 3.17 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai) .....                                                      | 61 |
| Tabel 3.18 Tabel Bobot Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satker .....                                                                                     | 68 |
| Tabel 3.19 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup Lpspl Sorong (Nilai) .....                                                                | 69 |
| Tabel 3.20 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen) .....                                                                              | 71 |
| Tabel 3.21 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks) .....                                                                              | 75 |
| Tabel 3.22 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%) .....                            | 78 |

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 3.23 Capaian IK 13 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)                    | 81  |
| Tabel 3.24 Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                             | 87  |
| Tabel 3.25 Rincian Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 Lingkup LPSPL Sorong        | 88  |
| Tabel 3.26 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)     | 90  |
| Tabel 3.27 Bobot Penilaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                           | 93  |
| Tabel 3.28 Capaian IK 16 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                | 94  |
| Tabel 3.29 Rincian Sumber Anggaran LPSPL Sorong Tahun 2025                                              | 97  |
| Tabel 3.30 Realisasi Anggaran Per Indikator pada Perjanjian Kinerja                                     | 99  |
| Tabel 3.31 Membandingkan capaian kinerja LPSPL Sorong dengan Unit Pelaksana Teknis lain pada tahun 2025 | 103 |
| Tabel 4.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2025                                                          | 114 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPSPL Sorong                                                                                                                                                                       | 5  |
| Gambar 1.2 Wilayah Kerja LPSPL Sorong                                                                                                                                                                             | 6  |
| Gambar 3.1 NKO LPSPL Sorong Tahun 2025                                                                                                                                                                            | 15 |
| Gambar 3.2 Dokumentasi Kunjungan Lapang Defra's Permanent Secretary, UK Embassy, bersama Direktur Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kepulauan Raja Ampat | 22 |
| Gambar 3.3 Dokumentasi Rapat Pokja CKKD Wetar                                                                                                                                                                     | 23 |
| Gambar 3.4 Rapat Koordinasi dan Cross Visit Pengelola Kawasan Konservasi                                                                                                                                          | 24 |
| Gambar 3.5 Pelaksanaan Surveillance Patrol Inside KKD Raja Ampat dan KKD Mare                                                                                                                                     | 27 |
| Gambar 3.6 Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Kawasan Konservasi                                                                                                                                                      | 29 |
| Gambar 3.7 Pelatihan Pokmaswas Level Pemula                                                                                                                                                                       | 36 |
| Gambar 3.8 Pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi terancam punah dan/atau apendiks CITES                                                                                                                     | 40 |
| Gambar 3.9 Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Saumlaki                                                                                                                                                        | 45 |
| Gambar 3.10 Kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil di Wilker LPSPL Sorong                                                                                                                            | 49 |
| Gambar 3.11 Gambar Verifikais Teknis (a) dan Asistensi Proposal Perizinan KKPRL di wilayah kerja LPSPL Sorong                                                                                                     | 52 |
| Gambar 3.12. Grafik Peningkatan PNPB Persetujuan KKPRL tahun 2025                                                                                                                                                 | 53 |
| Gambar 3.13 Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendukung IK 6                                                                                                                                                       | 56 |
| Gambar 3.14 Dokumentasi pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja LPSPL Sorong setiap bulan                                                                                                                         | 60 |
| Gambar 3.15 Nilai IKPA LPSPL Sorong                                                                                                                                                                               | 62 |
| Gambar 3.16 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025                                                                                                                                                                     | 69 |
| Gambar 3.17 Tangkapan Layar Laporan SPIP TW IV tahun 2024, SPIP TW I Tahun 2025, SPIP TW II dan SPIP TW III Tahun 2025                                                                                            | 72 |

|                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.18 Indeks Profesionalitas ASN Triwulan Tahun 2025.....                                                                                 | 75 |
| Gambar 3.19 Screenshot aplikasi SIDAK KKP .....                                                                                                 | 79 |
| Gambar 3.20 Lampiran Capaian WBK UPT DJPKRL .....                                                                                               | 83 |
| Gambar 3.21 Rapat Mingguan Pembangunan WBK WBBM Lingkup LPSPL Sorong .....                                                                      | 85 |
| Gambar 3.22 Tangkapan layar persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan IV tahun anggaran 2025 ..... | 91 |
| Gambar 3.23 Tangkapan layar lampiran hasil penilaian evaluasi mandiri monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.....                 | 95 |

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan Data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong juga menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan.

### 1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini adalah untuk menyampaikan capaian kinerja program atau kegiatan yang dilaksanakan LPSPL Sorong pada tahun 2025.

### 1.3 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini akan diterapkan secara merata di seluruh daerah dan akan dievaluasi secara berkala. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) memiliki peran strategis dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan terkait perencanaan, pemanfaatan, dan

pengawasan ruang laut. Selain itu, Ditjen PKRL juga bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya kelautan, termasuk rehabilitasi, restorasi, pemanfaatan ekonomi, konservasi ekosistem laut dan biota, penanggulangan bencana kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.

LPSPL Sorong berkedudukan di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dengan wilayah kerja yang meliputi Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan. LPSPL Sorong sejak tahun 2011 telah memiliki 2 (dua) satker definitif yang berkedudukan di Kota Ambon dan Kabupaten Merauke (Permen-KP No. 65/PERMEN-KP/2020 jo Permen-KP No. PER-23/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas Permen-KP No. PER-22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut).

LPSPL Sorong memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut mulai dari target rutin tahunan hingga tantangan yang diturunkan melalui Astacita Presiden Republik Indonesia, yaitu:

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi, dan implementatif melalui:
  - a. Fasilitasi Penyusunan materi teknis ruang dalam perumusan RTR Provinsi/RZ KAW dan RTR KSN/T dan Integrasi Dukungan penyusunan materi teknis ruang laut yang disusun oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
  - b. Pendampingan Integrasi antara rencana tata ruang wilayah provinsi dengan RZWP3K, Integrasi antara rencana tata ruang KSN dengan rencana zonasi KSN/T di wilayah kerja LPSPL Sorong;
  - c. Pendampingan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang didelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong;
  - d. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang/ rencana zonasi di wilayah kerja LPSPL Sorong;

- e. Dukungan pemberian KKPRL dan/atau insentif pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
  - f. Pengelolaan data KKPRL.
2. Pengelolaan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut yang lestari dan berkelanjutan melalui:
- a. Pendampingan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di wilayah kerja LPSPL Sorong;
  - b. Evaluasi Efektivitas Pengelolaan KKPD di wilayah kerja LPSPL Sorong;
  - c. Penyediaan data sebaran dan status populasi jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja LPSPL Sorong;
  - d. Pemulihan populasi/ Pengayaan jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong;
  - e. Inisiasi daerah perlindungan habitat penting jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong;
  - f. Rehabilitasi Habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja LPSPL Sorong;
  - g. Penanganan Biota Dilindungi di wilayah kerja LPSPL Sorong;
  - h. Pelayanan perizinan/peredaran pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah kerja LPSPL Sorong;
  - i. Inisiasi jejaring dan Kerjasama konservasi Kawasan dan keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
  - j. Pemberian Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja LPSPL Sorong.
3. Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri melalui:
- a. Identifikasi dan Pendampingan Bantuan Sarana dan Prasarana di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah kerja LPSPL Sorong;
  - b. Dukungan Identifikasi dalam rangka fasilitasi KKPRL untuk masyarakat lokal dan tradisional di wilayah kerja LPSPL Sorong;
  - c. Dukungan dalam rangka Pemanfaatan PPK/T di wilayah kerja LPSPL Sorong.
4. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui:
- a. Identifikasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan ditanggulangi pencemarannya di wilayah kerja LPSPL Sorong;

- b. Identifikasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja LPSPL Sorong.
- 5. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PKRL melalui:
  - a. Pengelolaan SDM Aparatur dan tata laksana di LPSPL Sorong;
  - b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja di LPSPL Sorong;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik di LPSPL Sorong;
  - d. Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara, Pengadaan Barang Jasa dan Umum di LPSPL Sorong;

#### 1.4 Tugas dan Fungsi

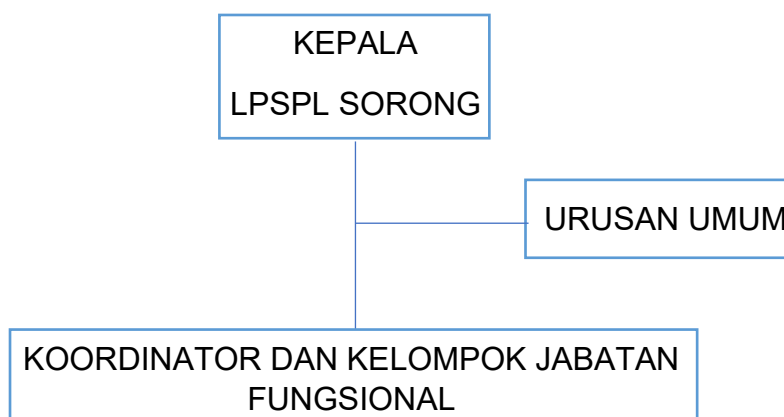
Berdasarkan Permen KP Nomor 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Dirjen PRL). Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (UPT PKRL) tersebut dipimpin oleh kepala. UPT PRL terdiri atas UPT KKPN dan UPT PSPL. Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri atas: Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) dan Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL). Klasifikasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut tersebut didasarkan pada analisis beban kerja.

LPSPL Sorong sebagai salah satu UPT PRL mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;

- c. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- e. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Struktur organisasi LPSPL Sorong sesuai dengan peraturan tersebut, sebagaimana berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPSPL Sorong

Susunan organisasi Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri atas: Urusan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PRL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dibentuk satuan kerja sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. Satuan kerja tersebut merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang dipimpin oleh koordinator satuan kerja. Koordinator satuan kerja tersebut ditetapkan oleh Dirjen PRL. Berikut lokasi, satuan kerja, dan wilayah kerja LPSPL Sorong berdasarkan Permen KP Nomor 65/PERMEN-KP/2020:

Tabel 1.1 Lokasi satuan kerja dan wilayah kerja LPSPL Sorong

| UPT                                                   | Lokasi                            | Satuan Kerja | Wilayah Kerja             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|
| Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) | Sorong, Provinsi Papua Barat Daya | Ambon        | Provinsi Maluku           |
|                                                       |                                   | Ternate      | Provinsi Maluku Utara     |
|                                                       |                                   | Merauke      | Provinsi Papua Selatan    |
|                                                       |                                   | -            | Provinsi Papua            |
|                                                       |                                   | -            | Provinsi Papua Pegunungan |
|                                                       |                                   | -            | Provinsi Papua Tengah     |
|                                                       |                                   | -            | Provinsi Papua Barat      |
|                                                       |                                   | -            | Provinsi Papua Barat Daya |

Wilayah Kerja LPSPL Sorong sesuai lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 seperti terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.2 Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Pada triwulan III tahun 2025, jumlah SDM yang dimiliki LPSPL Sorong mencapai 45 orang yang terdiri dari 29 orang PNS, 2 orang PPPK, 20 orang tenaga kontrak jasa perorangan, dan 2 PPNNP dengan komposisi pegawai sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai LPSPL Sorong

| No     | Uraian                                              | Tingkat Pendidikan |    |       |    | Total |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------|----|-------|----|-------|
|        |                                                     | SMA/Sederajat      | D3 | D4/S1 | S2 |       |
| 1.     | Pegawai Negeri Sipil (PNS)                          | 1                  | 1  | 21    | 6  | 29    |
| 2.     | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) | -                  | -  | 2     | -  | 2     |
| 3.     | Tenaga Kontrak Jasa Perorangan (JLP)                | 10                 | 2  | 8     | -  | 20    |
| 4.     | Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)       | -                  | 1  | 1     | -  | 2     |
| Jumlah |                                                     | 11                 | 4  | 32    | 6  |       |

### 1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 adalah:

#### a. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

#### b. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran mengenai sasaran program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2024-2029, rencana kerja dan anggaran LPSPL Sorong tahun 2025, dan penetapan kinerja LPSPL Sorong

#### c. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

#### d. BAB IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis 2024-2029

RPJMN 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Emas. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP.

RPJMN 2025-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Presiden menetapkan 5 arahan utama sebagai strategi pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi. Kelima arahan utama ini dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 yaitu :

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Visi KKP tahun 2025-2029 adalah “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PKRL 2024-2029 adalah “Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2024-2029, KKP misi sesuai misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional,

3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam rangka mendukung Misi KKP tersebut, Ditjen PKRL mempunyai 3 (tiga) Misi yaitu:

1. peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
3. peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Ditjen PKRL.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Penjabaran dari Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2024-2029, yang didukung oleh Sasaran Program (SP) Ditjen PKRL terdiri dari:

SS-1 Terwujudnya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan,

SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan,

SS-3 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas,

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh Ditjen PKRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan dari pelaksanaan program pengelolaan kelautan dan ruang laut serta program dukungan manajemen.

## **2.2 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2025**

Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 dan diubah dengan Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang ditanda tangani pada tanggal Juni 2025 yang memuat 16 Indikator Kinerja dengan anggaran sebesar Rp39.402.209.000,00 yang mendukung kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan.

Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja LPSP Sorong Tahun 2025 berdasarkan PK LPSP Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                                                                                    | INDIKATOR KINERJA |                                                                                                                                       | TARGET |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.               | Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSP Sorong                                 | 1.                | Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSP Sorong (Provinsi) | 3      |
| 2.               | Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSP Sorong                                                | 2.                | Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSP Sorong (Orang)                      | 20     |
| 3.               | Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSP Sorong | 3.                | Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSP Sorong (Jenis)                      | 3      |
| 4.               | Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja LPSP Sorong                                                                    | 4.                | Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSP Sorong (Nilai)               | 2      |
| 5.               | Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan pulau - pulau kecil di Wilayah Kerja LPSP Sorong                                                      | 5.                | Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau - pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSP Sorong (Dokumen)                              | 1      |
| 6.               | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSP Sorong                                                                              | 6.                | Nilai PM SAKIP Lingkup LPSP Sorong (Nilai)                                                                                            | 70     |
|                  |                                                                                                                                                    | 7.                | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPSP Sorong (Nilai)                                                                    | 89     |
|                  |                                                                                                                                                    | 8.                | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSP Sorong (Nilai)                                                                 | 71,5   |

| SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA |                                                                                                            | TARGET |
|------------------|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |  | 9.                | Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)                                                   | 4      |
|                  |  | 10.               | Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)                                                   | 80     |
|                  |  | 11.               | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%) | 95     |
|                  |  | 12.               | Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPSPL Sorong (%)                                                | 100    |
|                  |  | 13.               | Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                       | 75     |
|                  |  | 14.               | Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                           | 80     |
|                  |  | 15.               | Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)                   | 76     |
|                  |  | 16.               | Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                            | 91     |

Selain itu terdapat Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang ditanda tangani pada Mei 2025 yang memuat 1 Indikator Kinerja dengan anggaran Rp885.000.000,00 yang mendukung kegiatan Perlindungan dan Penataan Ruang Laut Lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut.

Tabel 2.2 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2025 berdasarkan PK LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                       | TARGET | SASARAN KEGIATAN                                                                                               | TARGET |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.               | Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong | 1.     | Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen) | 2      |

Sumber anggaran LPSPL Sorong pada tahun 2025 berasal dari Rupiah Murni Rp 8,450,539,000, pinjaman luar negeri Rp 30,151,670,000 dan PNBPNP Rp. 1,625,000,000, akan tetapi pada halaman IV.A DIPA Nomor: DIPA-032.07.2.477440/2024 dijelaskan bahwa terdapat jumlah dana yang tidak dapat dicairkan sejumlah Rp. 10,502,610,000 yang merupakan belanja barang (52). Pada revisi DIPA dengan nomor SP DIPA-032.07.2.477440/2025 tanggal 17 Juni 2025 terdapat pembukaan blokir dana yang bersumber dari PNBPNP sebesar Rp882.895.000,00 sehingga total anggaran yang diblokir sebesar Rp 9.619.715.000,00. sehingga mempengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan.

Terdapat perubahan PK ke dua yang dilakukan pada Desember 2025 karena adanya perubahan komponen anggaran yang terkait dengan anggaran PNBPNP pada Perjanjian Kinerja dengan DJPRL dengan nilai semula Rp825.000.000,00 menjadi Rp3.825.000.000,00 dan perubahan pada kegiatan dukungan manajemen yang semula senilai Rp8.450.539.000,00 menjadi Rp7.443.472.000,00 yang tertuang pada perjanjian kinerja dengan DJPK.

Tabel 2.3 Perubahan anggaran pada perubahan kedua Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong dengan DJPRL dan DJPK

#### DJPRL

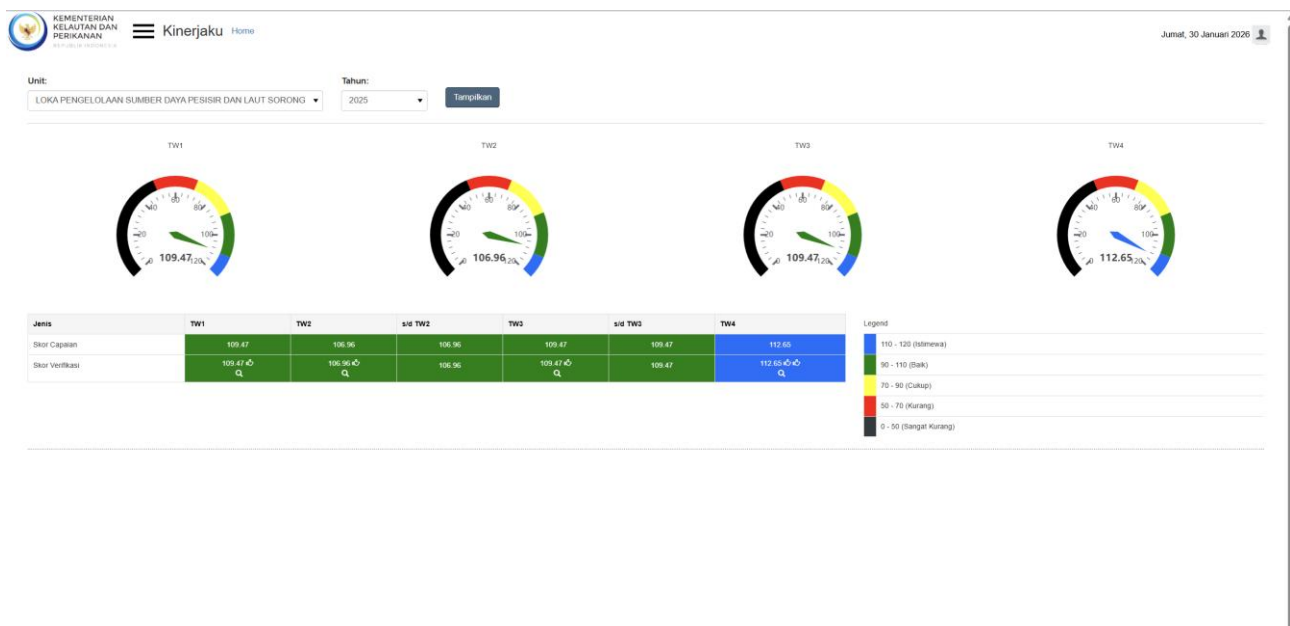
| NO.                                                                                           | KEGIATAN            | Semula             | Menjadi              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 1.                                                                                            | Penataan Ruang Laut | 825.000.000        | 3.825.000.000        |
| <b>Total Anggaran Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong Tahun 2025</b> |                     | <b>825.000.000</b> | <b>3.825.000.000</b> |

#### DJPK

| NO.                                                                                           | KEGIATAN                                                                       | Semula                | Menjadi               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.                                                                                            | Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut | 30.651.670.000        | 30.651.670.000        |
| 2.                                                                                            | Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                    | 300.000.000           | 300.000.000           |
| 3.                                                                                            | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan                | 8.450.539.000         | 7.443.472.000         |
| <b>Total Anggaran Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong Tahun 2025</b> |                                                                                | <b>39.402.209.000</b> | <b>38.395.142.000</b> |

## BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja LPSPL Sorong dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi IKU/IKM. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja LPSPL Sorong pada Tahun 2025 adalah **112,65** (kategori istimewa), seperti gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 NKO LPSPL Sorong Tahun 2025.

Indikator Kinerja (IK) serta target dan realisasinya pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 IK Target dan Realisasi Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2025

| Sasaran Kegiatan 1.<br>Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong |                                                                                                                                        |           |        |            |           |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|-----------|-------------|
| IK                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | FREKUENSI | TARGET | TAHUN 2025 |           |             |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |           |        | TARGET     | REALISASI | % KINERJAKU |
| IK 1                                                                                                                                       | Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi) | Tahunan   | 3      | 3          | 6         | 120%        |
| Sasaran Kegiatan 2.<br>Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL                       |                                                                                                                                        |           |        |            |           |             |

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |            |      |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|--------|--------|
| <b>Sorong</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |            |      |      |        |        |
| IK 2                                                                                                                                                                                     | Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang)        | Tahunan    | 20   | 20   | 27     | 120%   |
| <b>Sasaran Kegiatan 3.</b><br><b>Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong</b> |                                                                                                                          |            |      |      |        |        |
| IK 3                                                                                                                                                                                     | Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)        | Tahunan    | 3    | 3    | 5      | 120%   |
| <b>Sasaran Kegiatan 4.</b><br><b>Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong</b>             |                                                                                                                          |            |      |      |        |        |
| IK 4                                                                                                                                                                                     | Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)           | Tahunan    | 2    | 2    | 2      | 100%   |
| <b>Sasaran Kegiatan 5.</b><br><b>Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan pulau - pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong</b>                                                      |                                                                                                                          |            |      |      |        |        |
| IK 5                                                                                                                                                                                     | Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau - pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)                | Tahunan    | 1    | 1    | 1      | 100%   |
| <b>Sasaran Kegiatan 6.</b><br><b>Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja LPSPL Sorong</b>                                                                    |                                                                                                                          |            |      |      |        |        |
| IK 6                                                                                                                                                                                     | Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai) | Tahunan    | 80   | 80   | 99,92  | 120%   |
| <b>Sasaran Kegiatan 7.</b><br><b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong</b>                                                                              |                                                                                                                          |            |      |      |        |        |
| IK 7                                                                                                                                                                                     | Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                                                              | Tahunan    | 80   | 80   | 88,10- | 120%   |
| IK 8                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                                      | Semesteran | 89   | 89   | 78,10  | 88,35% |
| IK 9                                                                                                                                                                                     | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                                   | Tahunan    | 71,5 | 71,5 | 98,57  | 120%   |
| IK 10                                                                                                                                                                                    | Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)                                                                 | Triwulan   | 4    | 4    | 4      | 100%   |

|       |                                                                                                            |          |     |     |       |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-------|---------|
| IK 11 | Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)                                                   | Semester | 80  | 80  | 85,98 | 107,47% |
| IK 12 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%) | Tahunan  | 95  | 95  | 98,88 | 116,33% |
| IK 13 | Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPSPL Sorong (%)                                                | Tahunan  | 100 | 100 | 100   | 100%    |
| IK14  | Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                       | Tahunan  | 75  | 75  | 81,64 | 108,85% |
| IK 15 | Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                           | Tahunan  | 80  | 80  | 88,50 | 110,63% |
| IK 16 | Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)                   | Tahunan  | 76  | 76  | 100   | 120%    |
| IK 17 | Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                            | Tahunan  | 91  | 91  | 100   | 120%    |

### 3.1 Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan 1 Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 1 ini kedalam 1 IKU yaitu Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi).

#### 3.1.1. Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)

Daerah yang difasilitasi dan/atau dilakukan pendampingan penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong adalah jumlah daerah (provinsi) di wilayah kerja LPSPL Sorong yang dilakukan fasilitasi oleh LPSPL Sorong dalam upaya pengelolaan Kawasan konservasi.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi dan/atau dilakukan pendampingan penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi

Tabel 3.2 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)

|                   |                                                                                                                                        |           |           |                                  |                   |                       |                    |                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| SK.1              | Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong                    |           |           |                                  |                   |                       |                    |                               |
| IKU.1             | Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi) |           |           |                                  |                   |                       |                    |                               |
| Realisasi<br>2024 | Tahun 2025                                                                                                                             |           |           |                                  | Tahun 2024        |                       | Renstra 2025-2029  |                               |
|                   | Target                                                                                                                                 | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd<br>TW tahun<br>2023 | Target PK<br>2024 | % Realisasi<br>thd PK | Target s.d<br>2029 | % Capaian thd<br>Renstra 2025 |
| -                 | 3                                                                                                                                      | 6         | 120%      | -                                | 3                 | 120%                  | -                  | -                             |

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 September 2025

### 1. *Capaian IK Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi) Tahun 2025*

Target IK Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi) pada tahun 2025 yaitu 3 Provinsi sedangkan capaiannya adalah 6 Provinsi yaitu Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan, Papua, Maluku dan Maluku Utara.

Provinsi Papua Barat Daya, terdapat 6 Kawasan Konservasi yang statusnya telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebanyak 2 kawasan merupakan Kawasan Konservasi Nasional (KKN Kep. Raja Ampat dan KKN Waigeo Sebelah Barat), kemudian sebanyak 4 kawasan lainnya pengelolaannya didelegasikan kepada Pemerintah Daerah (KKD Raja Ampat, KKD Seribu Satu Sungai Teoenebikia, KKD Misool Utara, dan KKD Jeen Womom). Terhadap Kawasan Konservasi tersebut, telah dilakukan Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) oleh Tim Penilai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Nilai EVIKA tahun 2025 untuk KKD Jeen Womom adalah 47,43% dengan status pengelolaan Dikelola secara Optimum (level Perak). Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan penilaian tahun sebelumnya. Nilai EVIKA tahun 2025 untuk KKD Raja Ampat adalah 86,46% dengan status pengelolaan Dikelola Berkelanjutan (level Emas). Nilai tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai EVIKA tahun 2025 untuk KKD Seribu Satu Sungai Teoenebikia adalah 8,59% dengan status pengelolaan Dikelola secara Minimum (level Perunggu). Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dari penilaian tahun sebelumnya. Nilai EVIKA tahun 2025 untuk KKD Misool Utara adalah 67,56% dengan status pengelolaan Dikelola secara Optimum

(level Perak). Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan penilaian tahun sebelumnya.

Provinsi Papua Barat, terdapat 2 Kawasan Konservasi yang statusnya telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, yang pengelolaannya didelegasikan kepada Pemerintah Daerah (KKD Kaimana dan KKD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch). Terhadap Kawasan Konservasi tersebut, telah dilakukan Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) oleh Tim Penilai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Nilai EVIKA tahun 2025 untuk KKD Kaimana adalah 52,11% dengan status pengelolaan Dikelola secara Optimum (level Perak). Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan penilaian tahun sebelumnya. Nilai EVIKA tahun 2025 untuk KKD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch adalah 66% dengan status pengelolaan Dikelola secara Optimum (level Perak). Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebanyak 40% perempuan terlibat dalam kelompok penilaian EVIKA Kawasan Konservasi di Perairan Papua Barat, yang berasal dari pihak pengelola kawasan (DKP Provinsi Papua Barat), tim penilai, dan pendamping kegiatan.

Provinsi Papua Selatan terdapat 1 Kawasan Konservasi yang statusnya telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, yang pengelolaannya didelegasikan kepada Pemerintah Daerah (KKD Pulau Kolepom). Kawasan Konservasi tersebut, telah dilakukan Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) oleh Tim Penilai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Penilaian EVIKA tahun 2025 KKD Pulau Kolepom memperoleh score 13,02% dengan status pengelolaan Minimum (level perunggu). Score EVIKA KKD Pulau Kolepom mengalami peningkatan dibandingkan penilaian tahun sebelumnya yang dimana tahun 2024 mendapatkan perolehan score 10,81%.

Provinsi Papua terdapat 2 Kawasan Konservasi yang statusnya telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, yang pengelolaannya didelegasikan kepada Pemerintah Daerah (KKD Biak Numfor) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKN Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya). Terhadap ke 2 Kawasan Konservasi tersebut, telah dilakukan Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

oleh Tim Penilai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Penilaian EVIKA tahun 2025 untuk KKD Biak Numfor memperoleh score 13,79% dengan status pengelolaan Minimum (level perunggu) dan KKN Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya memperoleh score 90,30% dengan status pengelolaan Berkelanjutan (level emas). Score EVIKA 2 KK tersebut mengalami peningkatan dibandingkan penilaian tahun sebelumnya, tahun 2024 KKD Biak Numfor mendapatkan perolehan score 10,12% dan KKN Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya 85,81%.

Provinsi Maluku telah dilaksanakan secara terstandar sebagai instrumen penilaian kinerja pengelolaan kawasan konservasi perairan. 2. Dari 13 kawasan konservasi yang dievaluasi, sebanyak 8 kawasan berada pada status Dikelola Optimum (Perak) dan 5 kawasan masih berada pada status Dikelola Minimum (Perunggu), yang menunjukkan bahwa capaian pengelolaan belum merata antar kawasan. Secara umum, aspek perencanaan dan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi telah tersedia dan berfungsi, namun belum sepenuhnya terkonversi menjadi capaian hasil dan dampak pengelolaan yang optimal. Tantangan utama pengelolaan kawasan konservasi di Provinsi Maluku terletak pada penguatan implementasi pengelolaan, peningkatan efektivitas pengawasan, serta konsistensi pendampingan dan pelibatan masyarakat. Hasil EVIKA Tahun 2025 menjadi dasar objektif dalam penetapan prioritas perbaikan pengelolaan, penguatan kinerja Satuan Unit Organisasi Pengelola, serta penyusunan langkah peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.

Provinsi Maluku Utara terdapat 6 Kawasan Konservasi yang statusnya telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, yang pengelolaannya didelegasikan kepada Pemerintah Daerah (KKD Pulau Rao-Tanjung Dehegila, KKD Kepulauan Guraici, KKD Pulau Mare, KKD Kepulauan Widi, dan KKD Pulau Makian dan Pulau Moti dan KKD Kepulauan Sula). Terhadap ke 6 Kawasan Konservasi tersebut, telah dilakukan Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) oleh Tim Penilai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Hasil Penilaian EVIKA tahun 2025 KKD Pulau Rao-Tanjung Dehegila, KKD Kepulauan Guraici, KKD Pulau Mare, KKD Kepulauan Widi, dan KKD Pulau Makian dan Pulau Moti dan KKD Kepulauan Sula mendapatkan score berturut-turut 68.35% optimum (perak),

61.53% optimum (perak), 60.82% optimum (perak), 59.76% optimum (perak), 55.46% optimum (perak) dan 34.76% minimum (perunggu). 5 Kawasan konservasi mengalami kenaikan score dari tahun sebelumnya sedangkan 1 KKD Pulau Mare mengalami penurunan score.

## **2. *Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024***

Indikator Kinerja ini baru ada pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Tahun 2024.

## **3. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah***

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru sehingga belum terdapat didalam target renstra. Oleh karena itu capaian Indikator Kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian target jangka menengah

## **4. *Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya***

Efisiensi Sumberdaya Anggaran, Manusia, dan Waktu pada Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong adalah adanya komunikasi dan Kerjasama yang baik antara LPSPL Sorong dengan mitra konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong. Hal ini menyebabkan efisiensi waktu dan anggaran karena pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan biaya yang ditimbulkan lebih efisien.

## **5. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala, dan Solusi***

### **a. Analisis Keberhasilan**

LPSPL Sorong aktif melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan efektivitas Kawasan konservasi Daerah. Hal ini juga didukung oleh SDM LPSPL Sorong yang memiliki kemampuan dalam upaya mendukung pengelolaan Kawasan Konservasi seperti inventarisasi sumber daya ekologi, sosial, ekonomi dan budaya di dalam Kawasan Konservasi sehingga mampu berkontribusi secara langsung untuk mendukung peningkatan efektivitas Kawasan konservasi.

### **b. Analisis Kegagalan/Kendala**

Pelaksanaan IK ini direncanakan menggunakan anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) *Ocean for Prosperity* namun anggaran tersebut baru dapat direalisasikan pada Juni 2025 karena adanya penghentian sementara kegiatan

LAUTRA berdasarkan Surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) *Oceans for Prosperity Project*.

**c. Solusi**

LPSPL Sorong dapat meningkatkan kerja sama dengan mitra konservasi dan pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan IKU ini dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi anggaran yang ada.

**6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)**

Mendukung capaian Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 LPSPL Sorong telah melakukan kegiatan Pendampingan Kunjungan Lapang Defra's Permanent Secretary, UK Embassy, bersama Direktur Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kepulauan Raja Ampat. Kunjungan ini bertujuan memantau pelaksanaan program yang didanai Global Fund for Coral Reefs (GFCR) oleh Konservasi Indonesia dan berdiskusi dengan pengelola kawasan konservasi, seperti BLUD UPTD Raja Ampat dan BKKPN Kupang.



Gambar 3.2 Dokumentasi Kunjungan Lapang Defra's Permanent Secretary, UK Embassy, bersama Direktur Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kepulauan Raja Ampat

LPSPL Sorong juga mengikuti kegiatan Rapat Pokja Penyusunan CKKD Wetar. Penetapan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Wetar penting untuk memperkuat Kabupaten MBD sebagai wilayah konservasi. Poin kunci dari pertemuan ini meliputi penentuan tema tematik kawasan (diusulkan "Perikanan" untuk peningkatan biomassa),

integrasi potensi ekonomi seperti perikanan tangkap dan carbon trade berbasis lamun, serta partisipasi masyarakat dan mitigasi dampak kegiatan pertambangan Saratoga di Wetar Utara. KKD Wetar telah direncanakan memiliki luas 260.767 ha melalui analisis MARXAN, dengan zonasi meliputi Zona Inti (11.116 ha), Zona Pemanfaatan Terbatas untuk budidaya, pariwisata, dan perikanan tangkap (248.104 ha). Prioritas konservasi mencakup terumbu karang, lamun, mangrove, serta area pemijahan ikan dan migrasi mamalia laut. Dalam diskusi, LPSPL Sorong menyoroti perlunya sinkronisasi alur pelayaran Wetar-Timor Leste, peran masyarakat adat, dan harmonisasi zonasi dengan KSNT PPKT. Dokumen RPZ diharapkan mengakomodir rekomendasi ini guna menjamin keberlanjutan pengelolaan kawasan.



Gambar 3.3 Dokumentasi Rapat Pokja CKKD Wetar.

Sebagai upaya mendukung peningkatan efektivitas Kawasan Konservasi LPSPL Sorong juga melakukan kegiatan sosialisasi terkait jenis ikan dilindungi terancam punah di Jembatan Puri Kota Sorong. Lokasi ini dipilih karena merupakan pasar ikan dan titik kumpul bagi para nelayan penangkap ikan di wilayah perairan Kawasan Konservasi Raja Ampat. LPSPL Sorong juga mengikuti Pembahasan Rencana Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2025 dalam pertemuan ini LPSPL Sorong menekankan agar memperhatikan Kawasan konservasi Sorong Selatan yang telah ditetapkan dan mempertahankan keberadaan Kawasan Konservasi Sorong Selatan.

LPSPL Sorong juga telah melakukan kegiatan Rapat Koordinasi *dan Cross Visit* Pengelola Kawasan Konservasi pada tanggal 7–10 Juli 2025 di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini dihadiri oleh pengelola kawasan konservasi dan perwakilan dari dinas teknis kelautan dan perikanan, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, serta Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya. Tujuan utama

kegiatan ini adalah memperkuat sinergi antardaerah, mendorong pembelajaran lintas lokasi, serta menyusun kebutuhan kawasan yang dapat didukung/sinergikan dengan program Lautra.



Gambar 3.4 Rapat Koordinasi *dan Cross Visit* Pengelola Kawasan Konservasi

Mendukung Upaya pengawasan dan monitoring pemanfaatan kawasan konservasi dilakukan Surveillance patrol inside di Kawasan Konservasi Daerah Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya dan Kawasan Konservasi Daerah Mare, Provinsi Maluku Utara. Patroli di KKP Raja Ampat mencakup beberapa area utama, termasuk Area I (Kepulauan Ayau-Asia), Area II (Teluk Mayalibit), Area III (Selat Dampier), Area V (Kofiau-Boo), dan Area VI (Kepulauan Fam) yang dilakukan secara berkala semenjak Juli – Desember 2025.

### Temuan Utama dan Aktivitas yang Dilakukan

#### Aktivitas Pemanfaatan Kawasan:

- **Perikanan Tangkap:** Ditemukan beragam aktivitas perikanan, mayoritas dilakukan oleh nelayan tradisional yang menggunakan longboat dengan mesin 15 PK atau ketinting. Alat tangkap yang dominan adalah pancing ulur (handline) dan panah (speargun). Aktivitas ini terpantau di zona pemanfaatan, zona lainnya, namun beberapa juga ditemukan di zona inti.
- **Pariwisata:** Aktivitas pariwisata cukup tinggi, terutama di sekitar Selat Dampier dan Kepulauan Fam. Ditemukan wisatawan mancanegara (dari Australia, Amerika, Jerman, dll.) yang melakukan kegiatan *diving* dan *snorkeling*. Kapal-kapal pinisi wisata juga terpantau beroperasi di zona yang telah ditentukan.
- **Budidaya:** Ditemukan beberapa kegiatan budidaya, seperti Keramba Jaring Apung (KJA) milik masyarakat untuk budidaya ikan kerapu hidup di Desa Yanbebar (Batanta) dan Kepulauan Ayau. Selain itu, teridentifikasi juga aktivitas budidaya mutiara oleh PT Arta Samudra dan CV Yefga.

- **Penelitian:** Di Teluk Mayalibit, terpantau adanya kegiatan penelitian oleh Fauna & Flora International (FFI) yang fokus pada observasi perilaku lumba-lumba.

### **Pelanggaran dan Penindakan:**

1. **Pelanggaran Zonasi (Zona Inti):** Ini adalah pelanggaran yang paling sering ditemukan di hampir semua area patroli. Banyak nelayan yang tertangkap melakukan aktivitas penangkapan ikan di dalam zona inti, seperti di sekitar Pulau Nelayan (Area III) dan di perairan Ayau (Area I). Tim patroli secara konsisten melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman mengenai batas-batas zonasi, dan mengarahkan para nelayan untuk keluar dari zona terlarang.
2. **Pemanfaatan Satwa Dilindungi:**
  - **Penyu:** Sebuah temuan signifikan terjadi di Kepulauan Ayau pada bulan September, di mana ditemukan satu ekor penyu sisik hidup di dalam KJA milik warga yang berlokasi di zona inti. Setelah pendekatan persuasif dan sosialisasi mengenai status perlindungan penyu, pemilik KJA bersedia melepaskan penyu tersebut. Proses pelepasliaran dilakukan oleh tim gabungan. Pada bulan Juli di lokasi yang sama, ditemukan juga nelayan yang menangkap penyu hijau menggunakan panah.
  - **Hiu:** Pada patroli Juli di Selat Dampier, tim menemukan dua kapal (KM Ria Purnama dan KM La Vero 3) yang melakukan pemanfaatan hiu menggunakan alat tangkap rawai. Berbagai jenis hiu (seperti *Carcharhinus falciformis*, *Sphyrna sp*, dll.) ditemukan di atas kapal. Petugas PSDKP dan BLUD Raja Ampat segera mengambil tindakan tegas dengan menyita dan memusnahkan seluruh hasil tangkapan hiu tersebut.
3. **Penggunaan Alat Tangkap Terlarang:** Di Selat Dampier, ditemukan nelayan yang menggunakan kompresor sebagai alat bantu pernapasan untuk menangkap ikan, sebuah metode yang dilarang. Tim patroli membongkar *camp* singgah milik nelayan tersebut sebagai tindakan tegas yang bersifat edukatif.
4. **Administrasi dan Perizinan:** Beberapa KJA yang beroperasi diketahui belum memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Selain itu, dalam kegiatan pariwisata, ditemukan dua wisatawan asing yang tidak mengetahui kewajiban membayar PIN Raja Ampat.

**Keanekaragaman Hayati:** Selama patroli, tim berulang kali menjumpai mamalia laut, terutama lumba-lumba hidung botol, di perairan Selat Dampier dan Kofiau-Boo. Kemunculan ini menjadi indikator positif kesehatan ekosistem laut di kawasan tersebut.

Patroli di KKD Pulau Mare, Maluku Utara, juga menunjukkan tantangan serupa terkait kepatuhan terhadap zonasi.

#### **Temuan Utama dan Aktivitas:**

- **Dominasi Aktivitas Perikanan:** Sebagian besar aktivitas yang ditemukan adalah penangkapan ikan oleh nelayan lokal dari Desa Maregam dan Marekofo, serta nelayan dari pulau sekitar seperti Tidore.
- **Pelanggaran Berulang di Zona Inti:** Tim patroli secara konsisten menemukan nelayan yang beraktivitas di dalam dan di sekitar zona inti. Posisi zona inti yang terekspos ke arah Kota Tidore menjadi salah satu pemicu tingginya potensi pelanggaran dari nelayan luar.
- **Penggunaan Alat Tangkap Ilegal:** Pada patroli September, tim menemukan kapal yang membawa jaring (*kalase*), yang merupakan alat tangkap yang dilarang penggunaannya di KKD Pulau Mare berdasarkan Rencana Zonasi (RZP).
- **Bangunan Ilegal:** Ditemukan sebuah bangunan berupa *shelter* yang didirikan di atas pasir timbul yang masuk dalam zona inti di bagian utara Pulau Mare.

#### **Tindakan yang Dilakukan:**

- Tim gabungan aktif melakukan sosialisasi langsung di laut kepada para nelayan mengenai status KKD Pulau Mare, aturan zonasi, dan jenis alat tangkap yang dilarang.
- Nelayan yang ditemukan di zona inti diarahkan untuk segera berpindah ke zona perikanan berkelanjutan.
- Terhadap kapal yang membawa jaring, tim memberikan himbauan keras dan sosialisasi terkait larangan serta pentingnya kepemilikan surat izin seperti SIUP/SIPI.

#### **Catatan Khusus Berdasarkan Hasil Patroli**

1. **Tantangan Utama adalah Kepatuhan Zonasi:** Pelanggaran zona inti menjadi temuan paling konsisten di kedua kawasan konservasi. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi yang lebih masif dan mungkin pemasangan tanda batas fisik yang lebih jelas di beberapa titik strategis.

2. **Efektivitas Patroli Gabungan:** Keterlibatan berbagai instansi (PSDKP, Polairud, BLUD, DKP) dalam satu tim terbukti sangat efektif, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang memerlukan penindakan hukum seperti pemanfaatan hiu dan penyu.
3. **Pendekatan Persuasif dan Edukatif:** Mayoritas tindakan yang diambil di lapangan adalah sosialisasi dan edukasi. Ini merupakan pendekatan yang baik untuk membangun kesadaran jangka panjang di tingkat masyarakat, meskipun tindakan tegas tetap diperlukan untuk pelanggaran berat.
4. **Kendala Operasional:** Laporan dari Kofiau-Boo menyebutkan adanya kendala teknis (kerusakan mesin speedboat) yang menghambat jangkauan patroli. Hal ini menyoroti pentingnya kesiapan logistik dan sarana prasarana yang andal untuk mendukung efektivitas pengawasan di wilayah yang luas dan terpencil.
5. **Peran Informasi Masyarakat:** Informasi dari nelayan lokal di Kofiau-Boo mengenai aktivitas kapal penampung dari luar daerah menjadi masukan berharga bagi tim patroli untuk menargetkan pengawasan. Ini menunjukkan pentingnya membangun hubungan baik dengan masyarakat setempat.



Gambar 3.5 Pelaksanaan Surveillance Patrol Inside KKD Raja Ampat dan KKD Mare

Memperkuat efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Pulau Mare dan perairan sekitarnya, Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSP) Sorong menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek). Kegiatan ini secara khusus

dirancang untuk meningkatkan kapasitas Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) serta instansi dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Tujuan utama dari Bimtek ini adalah untuk memberikan pemahaman teoritis yang mendalam dan keterampilan teknis yang praktis terkait metode survei, pemantauan, dan pengelolaan sumber daya pesisir. Pelatihan ini menjadi fondasi penting untuk mempersiapkan para peserta sebelum melaksanakan kegiatan monitoring biofisik dan sosial ekonomi di lapangan, sehingga data yang dihasilkan valid dan sesuai standar.

Kegiatan ini diikuti oleh total 36 peserta dengan partisipasi perempuan mencapai 60%. Peserta merupakan perwakilan dari berbagai lembaga dan kelompok yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan KKD Pulau Mare, antara lain:

- LPSPL Sorong
- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara
- Badan Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BKCPD) Maluku Utara
- DKP Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan
- PSDKP Ternate
- Universitas Khairun Ternate
- Perwakilan Penyuluh Perikanan
- Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dari Desa Maregam dan Desa Marekofo
- LSM terkait seperti WCS

Bimtek disajikan dengan menggabungkan sesi teori dan praktik untuk memastikan pemahaman yang komprehensif. Materi utama yang dibahas meliputi:

#### 1. **Monitoring Ekosistem Pesisir:**

- **Mangrove:** Teknik identifikasi jenis, peran ekologis, dan metode pemantauan.
- **Lamun:** Pengenalan jenis, fungsi ekosistem, serta teknik pengukuran tutupan dan kepadatan.
- **Terumbu Karang:** Metode identifikasi karang, desain sampling, dan teknik survei menggunakan metode *Reef Check* atau *Line Intercept Transect (LIT)*.

#### 2. **Monitoring Kualitas Air:**

- Pengenalan parameter fisika-kimia penting (suhu, salinitas, pH, DO).
- Teknik pengambilan dan analisis sampel air.

### 3. Monitoring Sosial Ekonomi dan Budaya:

- o Metode identifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir.
- o Teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan *Focus Group Discussion (FGD)*.

Untuk memperkuat pemahaman, kegiatan ini dilengkapi dengan **simulasi praktik langsung**. Dalam simulasi ini, peserta dilatih untuk menggunakan alat peraga, mengisi lembar data, dan melakukan observasi sesuai dengan prosedur standar survei.



Gambar 3.6 Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Kawasan Konservasi

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan dalam rangka implementasi Proyek Ocean for Prosperity (LAUTRA), Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan melaksanakan kegiatan monitoring komprehensif di Kawasan Konservasi (KK) Pulau Mare. Kegiatan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan nilai efektivitas pengelolaan kawasan dan memastikan pengelolaan ekosistem terumbu karang beserta ekosistem terkait lainnya berjalan secara berkelanjutan.

Tujuan utama dari kegiatan monitoring ini adalah untuk mengumpulkan data dasar (baseline) mengenai kondisi biofisik, sosial ekonomi, dan budaya di dalam kawasan konservasi. Data yang terkumpul akan menjadi acuan untuk evaluasi dan perencanaan pengelolaan KK Pulau Mare di masa mendatang.

Kegiatan ini melibatkan 40 peserta yang merupakan kolaborasi dari berbagai institusi, termasuk LPSPL Sorong, DKP Provinsi Maluku Utara, BKKPD Maluku Utara, Peneliti BRIN, Dosen dan civitas akademika Universitas Khairun Ternate, Pokmaswas (Maregam, Marekofo, Tugulufa), dan LSM Wildlife Conservation Society (WCS).

## Monitoring Biofisik

### 1. Ekosistem Terumbu Karang:

- **Lokasi:** Monitoring dilakukan di 12 stasiun yang tersebar di berbagai zona kawasan.
- **Metode:** Tim menggunakan metode *Underwater Photo Transect (UPT)* untuk data kesehatan terumbu karang (*Reef Health Monitoring*), *Belt Transect* untuk monitoring ikan karang, dan megabentos.
- **Output:** Pemasangan transek permanen di 12 stasiun untuk memudahkan monitoring berkelanjutan di masa depan. Data foto bawah air akan dianalisis lebih lanjut menggunakan perangkat lunak CPCe.

### 2. Ekosistem Lamun:

- **Lokasi:** Pengamatan dilakukan di 12 stasiun, di mana 9 stasiun ditemukan memiliki ekosistem lamun. Tiga stasiun di sisi barat pulau tidak ditemukan lamun karena substrat pantai yang berbatu dan paparan gelombang tinggi.
- **Temuan:** Teridentifikasi 9 spesies lamun, dengan 4 spesies dominan ditemukan di semua stasiun, yaitu *Thalassia hemprichii*, *Syringodium isoetifolium*, *Cymodocea rotundata*, dan *Enhalus acoroides*.

### 3. Ekosistem Mangrove:

- **Lokasi:** Survei dilakukan di 9 stasiun pengamatan di sekitar Pulau Marekofo dan Maregam.
- **Temuan:** Teridentifikasi 19 spesies mangrove dari 9 famili berbeda. Famili Rhizophoraceae menjadi yang paling beragam.
- **Output:** Tim berhasil mengumpulkan data diameter batang, jumlah semaian, biota asosiasi, serta data tutupan dan ketebalan mangrove menggunakan drone yang akan dianalisis untuk menghasilkan Indeks Nilai Penting (INP).

### 4. Kualitas Perairan:

- **Lokasi:** Pengambilan sampel dilakukan di 16 titik yang mewakili setiap zona.
- **Hasil In-situ:** Rata-rata suhu perairan 28,53°C, oksigen terlarut (DO) 5,78 mg/L, dan pH 8,26.
- **Output:** Sampel nutrisi (amonia, nitrat), fosfat, TSS, Fe, fitoplankton, dan zooplankton telah berhasil dikumpulkan dan akan dianalisis lebih lanjut di laboratorium.

## B. Monitoring Sosial Ekonomi dan Budaya

- **Metode:** Survei dilakukan dengan membagikan kuesioner dan melakukan wawancara langsung kepada 78 responden di Desa Maregam (40 responden) dan Desa Marekofo (38 responden).
- **Temuan:**
  - Masyarakat secara umum mengetahui status kawasan konservasi di wilayah mereka.
  - Ditemukan adanya kearifan lokal yang kuat, seperti "**Boboso**" (larangan mengonsumsi jenis ikan tertentu bagi keturunan Kesultanan Tidore) dan "**Goya**" (larangan menebang pohon di bukit yang kini meluas hingga ke vegetasi mangrove di pesisir).
  - Masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pengelolaan laut dan menyuarakan kekhawatiran terkait isu *destructive fishing* (pengeboman ikan) yang terkadang masih terjadi, serta berharap adanya peningkatan pengawasan.

Selain itu dilakukan juga kegiatan pendampingan reviu Rencana Zonasi KKD Raja Ampat di Papua Barat Daya dan KKD Mare di KKD Maluku Utara serta pendampingan reviu Rencana Pengelolaan KKD Babar di Provinsi Maluku. Kegiatan ini dilaksanakan pada 17 November – 22 Desember 2025 yang terdiri dari pelaksanaan Rapat Kelompok Kerja, Konsultasi Teknis, Konsultasi Publik I ditingkat Masyarakat, Konsultasi Publik II di Tingkat Organisasi Pemerintah Daerah dan Penyusunan Draft Final hasil Reviu Rencana Zonasi di masing masing kawasan konservasi. Luaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Draft Final Rencana Zonasi KKD Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya, Draft Final Rencana Zonasi KKD Mare di Maluku Utara dan Draft Final Rencana Pengelolaan KKD Babar di Maluku.

## 7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

LPSPL Sorong tidak memiliki rencana aksi untuk Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola dari Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong menjadi Loka Pengelolaan Ruang Laut Sorong. Hal ini berdampak pada berubahnya tugas dan fungsi organisasi.

### 3.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong, LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 2 ini kedalam 1 IKU, yaitu masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang).

#### 3.2.1. IK 2 Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang)

Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang) adalah Masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya agar dapat melakukan kegiatan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong.

Tabel 3.3 Capaian IKU 2 Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang)

| SK.2              | Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong              |           |           |                                  |                   |                       |                    |                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| IKU.2             | Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang) |           |           |                                  |                   |                       |                    |                               |
| Realisasi<br>2024 | Tahun 2025                                                                                                        |           |           |                                  | Tahun 2024        |                       | Renstra 2025-2029  |                               |
|                   | Target                                                                                                            | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd<br>TW tahun<br>2024 | Target PK<br>2024 | % Realisasi<br>thd PK | Target s.d<br>2029 | % Capaian thd<br>Renstra 2025 |
| 90                | 20                                                                                                                | 27        | 120%      | - 63                             | 20                | 120%                  | 50                 | 54%                           |

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2025

#### 1. Capaian IK Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang) Tahun 2025

Target IK Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang) pada tahun 2025 yaitu 20 Orang. Capaian Indikator Kinerja ini pada 2025 adalah 27 orang persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 120%.

Kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Raja Ampat pada tanggal 8 - 9 Desember 2025, bertempat di Kampung Pam, Kepulauan Fam. Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek *Oceans for Prosperity Project* - LAUTRA, yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi serta memperluas peluang ekonomi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Sebanyak 27 orang peserta yang berasal dari Kampung Pam, Kampung Saukabu, dan Kampung Saupapir terlibat dalam rangkaian kegiatan ini, yang terbagi menjadi dua fokus pelatihan utama: pengolahan produk perikanan dan keterampilan perikanan tangkap.

Pada hari pertama, Senin 8 Desember 2025, dilaksanakan pelatihan pengolahan produk perikanan dengan materi pembuatan *Fish Stik* ikan tenggiri yang dipandu oleh narasumber Nur Widi Astuti, seorang pelaku usaha sekaligus *local champion* pemberdayaan ekonomi. Pelatihan ini diikuti oleh 12 peserta yang dibagi menjadi tiga kelompok kerja, di mana masing-masing kelompok dibekali paket peralatan lengkap mulai dari kompor 22 sumbu, wajan, hingga kemasan *standing pouch*. Dalam sesi ini, peserta tidak hanya diajarkan teknik mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, tetapi juga mendapatkan wawasan mengenai pemilihan ikan segar untuk menghindari bau amis serta teknik penyimpanan agar produk tahan lama. Hasil akhirnya, setiap kelompok sukses memproduksi 6 *pouch* Fish Stik dengan berat bersih 60 gram per kemasan, sehingga total produksi mencapai 18 *pouch*.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan pada hari kedua, Selasa 9 Desember 2025, dengan pelatihan pembuatan alat tangkap *Sabiki Tonda* yang diikuti oleh 15 orang peserta. Pelatihan ini dipandu oleh Helmy Friendly Polnaya, S.Pi, M.Si, instruktur ahli muda dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon. Materi pelatihan mencakup pengenalan alat, pemilihan bahan yang tahan lama seperti senar monofilament dan mata kail baja tahan karat, serta teknik perakitan umpan tiruan yang efektif untuk ikan pelagis. Setiap peserta menerima paket bahan yang terdiri dari kain sipon, bulu mutiara, mata kail berbagai ukuran, dan senar damil no. 80. Melalui pelatihan ini, masyarakat berhasil merakit pancing *Sabiki Tonda* secara mandiri yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi hasil tangkapan nelayan di wilayah tersebut.

## **2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025**

Sasaran kegiatan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan IKU Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang) merupakan Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target baru oleh sebab itu indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

## **3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator kinerja Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang) memiliki target renstra sebanyak 50 Orang. Capaian pada tahun 2025 adalah 20 orang, sehingga persentase capaian indikator kinerja ini terhadap target renstra adalah 40%.

## **4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Efisiensi Sumberdaya Anggaran, Manusia, dan Waktu pada Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong adalah adanya komunikasi dan Kerjasama yang baik antara LPSPL Sorong dengan UPT KKP lain di wilayah kerja LPSPL Sorong, pemerintah daerah dan mitra konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong. Hal ini menyebabkan efisiensi waktu dan anggaran karena pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan biaya yang ditimbulkan lebih efisien.

## **5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi**

### **a. Analisis Keberhasilan**

LPSPL Sorong memiliki hubungan yang baik dan mendapat dukungan dari Pengelola Kawasan Konservasi Daerah serta Satuan Kerja Instansi Pemerintah terkait lainnya di wilayah kerja LPSPL Sorong. Selain itu banyak mitra kerja konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong yang aktif dalam melakukan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat di dalam kawasan konservasi yang siap mendukung rencana kerja LPSPL Sorong.

### **b. Analisis Kegagalan/Kendala**

IKU ini direncanakan menggunakan anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) Ocean for Prosperity namun anggaran tersebut belum dapat

dicairkan pada Juni 2025 karena adanya penghentian sementara kegiatan LAUTRA berdasarkan Surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Oceans for Prosperity Project.

**c. Solusi**

LPSPS Sorong dapat meningkatkan kerja sama dengan mitra konservasi dan pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan IKU ini dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi anggaran yang ada.

**6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 2**

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mendukung capaian IK ini adalah Pelatihan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Level Pemula. Tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi anggota Pokmaswas, memperkuat peran aktif masyarakat dalam aksi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya secara berkelanjutan, meningkatkan sinergi antara Pokmaswas dengan Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi dan aparat pemerintah terkait lainnya.

Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta yang merupakan perwakilan dari Pokmaswas atau calon Pokmaswas dari 4 kawasan/calon kawasan konservasi. Selama tiga hari efektif, para peserta dibekali dengan berbagai materi yang esensial untuk menjalankan tugas sebagai pengawas berbasis masyarakat. Materi yang disampaikan mencakup:

1. **Building Learning Commitment:** Membangun komitmen dan semangat belajar bersama.
2. **Kelembagaan Pokmaswas:** Pemahaman mengenai struktur, peran, dan fungsi organisasi Pokmaswas.
3. **Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan:** Pengetahuan dasar mengenai pentingnya konservasi dan jenis-jenis biota yang perlu dilindungi.
4. **Prosedur Operasional Standar (POS) Pokmaswas:** Panduan langkah-demi-langkah dalam menjalankan tugas pengawasan.
5. **SOP Pokmaswas:** Prosedur teknis terkait pelaporan dan penanganan temuan di lapangan.
6. **Komunikasi Efektif:** Keterampilan berkomunikasi yang baik untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Untuk mengukur efektivitas pelatihan, penyelenggara melakukan evaluasi pembelajaran melalui *pre-test* dan *post-test*. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan dari para peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian materi.



Gambar 3.7 Pelatihan Pokmaswas Level Pemula

## 7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

LPSPL Sorong tidak memiliki rencana aksi untuk Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola dari Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong menjadi Loka Pengelolaan Ruang Laut Sorong. Hal ini berdampak pada berubahnya tugas dan fungsi organisasi.

### 3.3 Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong, LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 3 ini kedalam 1 IKU yaitu Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis).

#### 3.3.1. IK 3 Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)

Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

- a. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species;
- b. Pendampingan/Sosialisasi pemanfaatan jenis ikan;

Target jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan adalah Hiu, Pari, dan Arwana di wilayah kerja LPSPL Sorong. Formula perhitungan IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan melalui Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau *look alike species* dan Pendampingan/Sosialisasi pemanfaatan jenis ikan yang dimanfaatkan di wilayah kerja LPSPL Sorong dalam kurun waktu 1 Tahun.

Tabel 3.4 Capaian IK 3 Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)

| SK.3              | Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong |           |           |                                  |                   |                       |                    |                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| IKU.3             | Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)                                   |           |           |                                  |                   |                       |                    |                               |
| Realisasi<br>2024 | Tahun 2025                                                                                                                                          |           |           |                                  | Tahun 2025        |                       | Renstra 2025-2029  |                               |
|                   | Target                                                                                                                                              | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd<br>TW tahun<br>2024 | Target PK<br>2025 | % Realisasi<br>thd PK | Target s.d<br>2029 | % Capaian thd<br>Renstra 2025 |
| 6                 | 3                                                                                                                                                   | 5         | 120%      | - 1                              | 3                 | 120%                  | 25                 | 20%                           |

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2025

### 1. Capaian IK Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) Triwulan Tahun 2025

Target IK Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) pada tahun 2025 yaitu 3 Orang. Ccapaian Indikator Kinerja ini pada 2025 adalah 5 jenis yaitu Hiu, Pari, Arwana, Teripang dan Napoleon. Persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 120%.

Berdasarkan hasil kegiatan pelayanan jensi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, terancam punah dan/atau apendiks CITES tercatat jumlah Surat Rekomendasi DN untuk hiu, pari dan teripang non apendiks adalah 574 surat, SR LN sebanyak 1 surat, SAJI DN untuk jenis hiu dan pari Apendiks CITES, arwana serta napoleon sebanyak 544 surat, SAJI LN sebanyak 2 Surat.

## **2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025**

Capaian IK Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) pada tahun 2024 adalah 6 jenis yaitu hiu, pari, teripang, arwana, napoleon dan sidat sedangkan capaian pada tahun 2025 adalah 5 Jenis yaitu hiu, pari, teripang, arwana dan napoleon. Terdapat penurunan capaian pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024, hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 tidak terdapat pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan jenis ikan sidat.

## **3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah**

Realisasi IK jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong sampai dengan tahun 2025 adalah 5 jenis sedangkan target renstra untuuk Indikator Kinerja ini adalah 25 jenis. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2025 capaian terhadap rentra adalah 20%.

## **4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Efisiensi Sumberdaya Anggaran, Manusia, dan Waktu pada Verifikasi Online. Adanya SOP pelayanan jenis yang mengatur jumlah dan kategori produk yang akan di BAP di lokasi/gudang dengan jumlah produk yang di BAP di kantor LPSPL Sorong termasuk pelayanan verifikasi online menyebabkan penghematan dari segi waktu dan beban APBN yang ditimbulkan untuk melakukan verifikasi. Selain itu, LPSPL Sorong terhubung dalam jejaring media sosial (WAG) dengan mitra kerja baik pemerintah maupun pelaku usaha sehingga secara aktif dapat memberi informasi ataupun sosialisasi terkait regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, terancam punah dan appendiks CITES di wilayah kerjanya tanpa bertemu/tatap muka langsung sehingga hal ini menghemat biaya koordinasi.

## **5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi**

### **a. Analisis Keberhasilan**

Terdapat sosialisasi SOP pelayanan Hiu dan Pari di wilayah kerja LPSPL Sorong kepada pelaku usaha Hiu dan Pari secara berkala, adanya transparansi dalam pelayanan penerbitan SR dan SAJI-DN, pelayanan berbasis aplikasi e-SAJI juga mempermudah dalam melakukan pelayanan, dan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para pelaku usaha Hiu dan Pari. Komitmen tersebut tertulis pada Maklumat Pelayanan dan Pakta Integritas. Hal ini juga didukung SDM LPSPL

Sorong yang dapat diandalkan/tersertifikasi dalam mengidentifikasi jenis ikan yang dimanfaatkan serta penguasaan penggunaan system aplikasi e-SAJI. Selain itu, nilai indeks kepuasan masyarakat pada triwulan III tahun 2025 pada aplikasi susan KKP adalah 97,22 (sangat baik). Pelayanan LPSPL Sorong juga telah tersertifikasi ISO 9001:2015 dan mendapat predikat pelayanan prima dari Inspektorat Jendral KKP. Saat ini guna meningkatkan kualitas pelayanan LPSPL Sorong juga sedang berproses untuk tersertifikasi ISO 37001:2016.

**b. Analisis Kegagalan/Kendala**

Belum terdapat regulasi turunan terkait pelimpahan pemanfaatan jenis ikan pasca ditetapkannya UU 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi pelaku usaha jenis ikan terancam punah dan apendiks CITES untuk melakukan perdagangan. Permasalahan ini juga menyebabkan terbatasnya peran LPSPL Sorong dalam upaya pengelolaan jenis ikan dilindungi, terancam punah dan atau apendiks CITES.

Selain itu terdapat permasalahan keterbatasan verifikator pelayanan pemanfaatan jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong akibat terbatasnya pegawai LPSPL Sorong sedangkan Jumlah pelaku usaha pemanfaat jenis ikan dilindungi terancam punah dan atau apendiks CITES terus bertambah sehingga menyebabkan penumpukan permohonan penerbitan SAJI dan/atau SR.

**c. Solusi**

LPSPL Sorong dapat berkoordinasi dengan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik terkait regulasi turunan dan kepastian pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah dan atau apendiks CITES yang dikelola KKP dan memastikan peran KKP terkait Management Authority CITES pasca ditetapkannya UU 32 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Keterbatasan verifikator jenis ikan dilindungi di wilayah kerja LPSPL Sorong dapat ditanggulangi dengan cara melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha jenis ikan dilindungi, terancam punah dan apendiks CITES di wilayah kerja LPSPL Sorong terkait masa berlaku SAJI dan SR yang mencapai 60 hari. Sehingga pelaku usaha dapat mengajukan permohonan dengan jarak waktu pengiriman yang lebih panjang.

## 6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 3

LPSPS Sorong pada tahun 2025 melakukan kegiatan pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi terancam punah, dilindungi dan/atau apendiks CITES, penilaian survei kepuasan Masyarakat dan persiapan pembagian kuota tahap pertama dan kedua.



Gambar 3.8 Pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi terancam punah dan/atau apendiks CITES

Jenis ikan yang dilakukan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tahun 2025 adalah Hiu, Pari, Teripang, Arwana dan Napoleon.

## 7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

LPSPS Sorong tidak memiliki rencana aksi untuk Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola dari Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong menjadi Loka Pengelolaan Ruang Laut Sorong. Hal ini berdampak pada berubahnya tugas dan fungsi LPSPS Sorong.

### 3.4 Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja LPSPS Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja LPSPS Sorong. LPSPS Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 1 ini kedalam 1 IK, yaitu IK Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPS Sorong (Nilai).

#### 3.4.1. IK 4 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPS Sorong (Nilai)

Nilai minimum kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik merupakan nilai terendah yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik.

Ruang Lingkup:

- Jenis Ikan dilindungi berdasarkan ketentuan nasional (Ikan yang dilindungi penuh dan dilindungi terbatas);
- Jenis ikan masuk dalam Apendiks CITES;
- Jenis ikan yang masuk dalam daftar Jenis Asing Invasif (JAI): dan
- Jenis Ikan yang masuk dalam daftar Sumber Daya Genetik.

Jenis ikan tersebut dilakukan intervensi melalui program pelayanan perizinan melalui (1) pengendalian aspek legal melalui penyiapan NSPK terkait pelayanan perizinan; (2) peningkatan kapasitas SDM pelayanan perizinan; (3) Sosialisasi, edukasi dan pendampingan pelayanan perizinan; (4) penguatan sarana prasarana pelayanan perizinan; (5) Pelaksanaan layanan perizinan; (6) Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan.

Tabel 3.5 IK 4 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai)

| SK.4              | Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja LPSPL Sorong                                         |           |           |                                  |                   |                       |                    |                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| IKU.4             | Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai) |           |           |                                  |                   |                       |                    |                               |
| Realisasi<br>2024 | Tahun 2025                                                                                                               |           |           |                                  | Tahun 2025        |                       | Renstra 2025-2029  |                               |
|                   | Target                                                                                                                   | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd<br>TW tahun<br>2024 | Target PK<br>2025 | % Realisasi<br>thd PK | Target s.d<br>2029 | % Capaian thd<br>Renstra 2025 |
| -                 | 80                                                                                                                       | 99,92     | 120%      | -                                | 80                | 120%                  | 80                 | 120%                          |

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2025

#### 1. *Capaian IK Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai) Tahun 2025*

Target IK Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai) pada tahun 2025 yaitu 80. Capaian Indikator Kinerja ini pada 2025 adalah 99,92 Persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 120%.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri yang menghitung nilai dari aspek Proses Penerbitan Surat Rekomendasi, Proses Penerbitan Surat

Angkut Jenis Ikan (SAJI), Survey Kepuasan Masyarakat dan Inovasi dan Konvensi dengan rincian sebagai berikut (Tabel 3.6)

Tabel 3.6 LKE Penilaian Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

| Aspek                                            | Bobot Aspek | Indikator                       | Bobot Indikator | Skor  | Nilai Skor | Skor IKU | Link Data Dukung                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|-------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proses Penerbitan Surat Rekomendasi              | 40%         | Dashboard Surat Rekomendasi     | 10%             | 100   | 10         | 40       | <a href="https://bit.ly/PenerbitanSR">https://bit.ly/PenerbitanSR</a>                             |
|                                                  |             | Rekap Penerbitan                | 10%             | 100   | 10         |          |                                                                                                   |
|                                                  |             | Dokumen yang diarsipkan         | 10%             | 100   | 10         |          |                                                                                                   |
|                                                  |             | Kesesuaian Baku Waktu Pelayanan | 40%             | 100   | 40         |          |                                                                                                   |
|                                                  |             | Penanganan Pengaduan            | 10%             | 100   | 10         |          |                                                                                                   |
|                                                  |             | Jumlah Permohonan yang diproses | 10%             | 100   | 10         |          |                                                                                                   |
|                                                  |             | Penggunaan Sistem Informasi     | 10%             | 100   | 10         |          |                                                                                                   |
| Proses Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) | 40%         | Dashboard Surat Rekomendasi     | 10%             | 100   | 10         | 40       | <a href="https://bit.ly/PenerbitanSAJI">https://bit.ly/PenerbitanSAJI</a>                         |
|                                                  |             | Rekap Penerbitan                | 10%             | 100   | 10         |          |                                                                                                   |
|                                                  |             | Dokumen yang diarsipkan         | 10%             | 100   | 10         |          |                                                                                                   |
|                                                  |             | Kesesuaian Baku Waktu Pelayanan | 40%             | 100   | 40         |          |                                                                                                   |
|                                                  |             | Penanganan Pengaduan            | 10%             | 100   | 10         |          |                                                                                                   |
|                                                  |             | Jumlah Permohonan yang diproses | 10%             | 100   | 10         |          |                                                                                                   |
|                                                  |             | Penggunaan Sistem Informasi     | 10%             | 100   | 10         |          |                                                                                                   |
| Survey Kepuasan Masyarakat                       | 10%         | Dilaksanakan                    | 70%             | 100   | 70         | 9,921    | <a href="https://bit.ly/SurveyKepuasanMasyarakat25">https://bit.ly/SurveyKepuasanMasyarakat25</a> |
|                                                  |             | Nilai SKM                       | 30%             | 97,36 | 29,21      |          |                                                                                                   |
| Inovasi dan Konvensi                             | 10%         | Terdapat Inovasi                | 50%             | 100   | 50         | 10       | <a href="https://bit.ly/InovasiKonvensi">https://bit.ly/InovasiKonvensi</a>                       |
|                                                  |             | Penerapan Konvensi              | 50%             | 100   | 50         |          |                                                                                                   |
|                                                  |             | <b>Total Skor</b>               | <b>99,92</b>    |       |            |          |                                                                                                   |

## **2. *Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025***

Sasaran Kegiatan Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja LPSPL Sorong dengan IK Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai) merupakan Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target baru. sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

## **3. *Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya***

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Efisiensi anggaran disebabkan LPSPL Sorong dalam melakukan pelayanan dapat dilakukan secara luring maupun daring.

## **4. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

### **a. Analisis Keberhasilan**

Ketercapaian target ini didukung oleh beberapa factor diantaranya sumberdaya manusia (SDM) LPSPL Sorong telah mengikuti bimbingan teknis terkait pelayanan publik dan/atau pelayanan prima sehingga kompetensinya mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa. Selain itu sebagai bentuk evaluasi kualitas layanan secara berkala LPSPL Sorong aktif melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

### **b. Analisis Kegagalan/Kendala**

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan IK ini adalah sehubungan dengan adanya surat instruksi presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan untuk mendukung pelaksanaan IK dan terdapat blokir PNPB hingga Juni 2025 sehingga pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran PNPB sempat tertunda.

### c. Solusi

Menghadapi tantangan ini LPSP Sorong berupaya melakukan kegiatan secara daring dan menggunakan form digital sehingga tidak menggunakan banyak biaya.

## 5. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 4

Tahun 2025 LPSP Sorong telah melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terkait kualitas pelayanan public. Pada triwulan I sebesar 98,82; triwulan II sebesar 97,22; triwulan III 96,04. Survei tersebut dilakukan kepada seluruh pengguna jasa LPSP Sorong dengan jumlah responden sebanyak 40 orang. Dilakukan juga tindak lanjut kegiatan survei kepuasan Masyarakat terkait. Selain itu telah dilakukan kegiatan konsultasi pelayanan publik terkait pemanfaatan jenis ikan dilindungi, terancam punah dan atau apendiks CITES di wilayah kerja LPSP Sorong dan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dalam Kegiatan Sosialisasi Standar Pelayanan Publik LPSP Sorong di Saumlaki.

Total peserta yang terlibat pada kegiatan Forum Konsultasi Publik di Saumlaki ini adalah 65 orang terbagi menjadi 30 orang luring dan 35 orang daring. Peserta luring terdiri dari 8 orang pengguna jasa/pelaku usaha, 1 orang tokoh masyarakat, 1 orang akademisi, 1 orang LSM, 11 orang pemerintah pusat, 2 orang pemerintah daerah, 4 orang penyelenggara layanan, serta 2 orang media massa.

Perwakilan peserta dari beberapa unsur yang hadir mengutarakan berbagai permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kesulitan untuk menampilkan foto sampel utuh pengajuan produk non sirip;
2. Belum adanya pemahaman jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES;
3. Belum adanya pemahaman alur pelayanan penerbitan dokumen SAJI dan Surat Rekomendasi

Rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan oleh LPSP Sorong pasca pertemuan Forum Konsultasi Publik adalah

1. Akan dilakukan peninjauan ulang SOP Verifikasi Lapang
2. LPSP Sorong akan membuat dan menyebarkan media sosialisasi jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES berupa poster, leaflet, dan media sosialisasi dalam bentuk Softfile

Hasil akhir dari pertemuan ini adalah Peserta yang hadir menyetujui dan sepakat terhadap standar pelayanan LPSP Sorong tersebut, serta bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik.



Gambar 3.9 Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Saumlaki

## 6. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

LPSP Sorong tidak memiliki rencana aksi untuk Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola dari Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong menjadi Loka Pengelolaan Ruang Laut Sorong. Hal ini berdampak pada berubahnya tugas dan fungsi LPSP Sorong.

### 3.5 Sasaran Kegiatan 5 Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan pulau – pulau kecil di Wilayah Kerja LPSP Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja LPSP Sorong, LPSP Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 5 ini kedalam 1 IK yaitu IK Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSP Sorong (Dokumen).

#### 3.5.1. IK 5 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSP Sorong (Dokumen)

Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil. Teknik menghitung capaian IKU ini dengan cara

menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong. Target capaian IK ini adalah 1 dokumen.

Tabel 3.7 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)

| SK.5              | Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan pulau – pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong            |           |           |                                  |                   |                       |                    |                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| IKU.5             | Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen) |           |           |                                  |                   |                       |                    |                               |
| Realisasi<br>2024 | Tahun 2025                                                                                                |           |           |                                  | Tahun 2025        |                       | Renstra 2025-2029  |                               |
|                   | Target                                                                                                    | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd<br>TW tahun<br>2024 | Target PK<br>2025 | % Realisasi<br>thd PK | Target s.d<br>2029 | % Capaian thd<br>Renstra 2025 |
| -                 | 1                                                                                                         | 1         | 100%      | -                                | 1                 | 100%                  | 3                  | 30%                           |

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2025

### 1. *Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen) Triwulan III Tahun 2025*

Target IK identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen) pada tahun 2025 yaitu 1 dokumen. Capaian Indikator Kinerja ini pada 2025 adalah 1 dokumen Persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Hasil identifikasi pemanfaatan pulau pulau kecil diperoleh hasil sebagai berikut

#### a. **Provinsi Papua Barat Daya**

Identifikasi di Provinsi Papua Barat Daya diperoleh enam entitas usaha pariwisata yang beroperasi di gugusan pulau-pulau kecil Kabupaten Raja Ampat. Identifikasi difokuskan pada aspek legalitas ruang, kepatuhan perizinan, dan dampak sosio-ekologis.

Hasil verifikasi lapangan mengungkapkan bahwa pemanfaatan ruang di wilayah ini didominasi oleh sarana akomodasi wisata (*resort*) yang dikelola oleh Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Secara umum, ditemukan bahwa kegiatan usaha telah memberikan kontribusi ekonomi yang nyata melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun, terdapat temuan krusial terkait ketidaksesuaian tata ruang, di mana beberapa lokasi usaha terindikasi berada di dalam kawasan Hutan Lindung, yang memerlukan mekanisme penyelesaian khusus (seperti izin pinjam pakai atau kerja sama pemanfaatan). Selain itu, terdapat variasi tingkat kepatuhan perizinan dasar, mulai dari

entitas yang memiliki izin lengkap hingga usaha berbasis masyarakat yang belum memiliki legalitas formal.

Tabel 3.8 Matriks Profil dan Status Perizinan Pemanfaatan PPK di Raja Ampat

| Nama Pelaku Usaha         | Lokasi Pulau | Status Modal | Luas Usaha (Ha) | Status Kawasan | Temuan Kunci & Status Izin                                                                  |
|---------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papua Explorer Resort     | P. Gam       | PMA          | 2,24            | APL            | Belum memiliki PKKPR dan Persetujuan Lingkungan, namun berada di zona APL yang sesuai.      |
| Raja Ampat Dive Lodge     | P. Mansuar   | PMDN         | 2,02            | Hutan Lindung  | Memiliki Izin Lingkungan & IMB, namun lokasi tumpang tindih dengan Hutan Lindung.           |
| Sorido Bay Resort         | P. Kri       | PMA          | 2,81            | Hutan Lindung  | Memiliki PKKPR & Izin Lingkungan, namun berada di area sensitif (Hutan Lindung).            |
| Kri Eco Resort            | P. Kri       | PMA          | 1,83            | Hutan Lindung  | Satu manajemen dengan Sorido Bay, perizinan lengkap namun terkendala status kawasan.        |
| Papua Paradise Eco Resort | P. Birie     | PMA          | 1,63            | APL            | Kepatuhan tinggi (PKKPR, Izin Lingkungan, PKKPR/Lengkap). Status lahan ulayat jelas.        |
| Dayan Dive Homestay       | P. Dayan     | PMDN         | 0,92            | APL            | Usaha masyarakat lokal. Belum memiliki izin formal (KKPR/Lingkungan). Lahan berbasis lisan. |
| Raja 4 Divers             | P. Pef       | PMA          | 0,89            | Hutan Lindung  | Memiliki Izin Lingkungan. Terletak di zona pemanfaatan terbatas Selat Dampier.              |

#### b. Provinsi Maluku Utara: Identifikasi Pulau Sangat Kecil

Kegiatan di Provinsi Maluku Utara mencakup studi citra satelit (*desk study*) dan survei insitu yang difokuskan pada pulau-pulau sangat kecil (<100 km<sup>2</sup>) di Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Pulau Morotai. Hasil identifikasi menunjukkan adanya dikotomi kepatuhan antara sektor swasta dan pemerintah daerah. Pelaku usaha swasta

yang bergerak di sektor ekstraktif (budidaya mutiara) dan pariwisata eksklusif cenderung memiliki kelengkapan dokumen perizinan yang lebih baik, termasuk sertifikasi lahan (SHM) dan izin lingkungan. Sebaliknya, unit usaha pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (UPTD) dan kelompok masyarakat (Pokdarwis) umumnya belum melengkapi perizinan dasar seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan dokumen lingkungan hidup, meskipun potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari lokasi tersebut tergolong signifikan. Isu tumpang tindih dengan kawasan Hutan Lindung juga teridentifikasi pada beberapa aset wisata strategis.

Tabel 3.9 Matriks Profil Pemanfaatan PPK di Maluku Utara (Hasil Survei Lapangan)

| Lokasi / Pulau               | Pengelola                  | Jenis Pemanfaatan                | Luas (Ha)    | Status Lahan         | Analisis Legalitas & Potensi                                                                                         |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P. Maitara</b> (4 Lokasi) | Pemda & Pokdarwis          | Wisata Bahari (Pantai, Mangrove) | Variatif     | APL & Hutan Lindung  | Belum memiliki KKPRL, Izin Lingkungan, dan IMB. Potensi wisata tinggi namun lemah legalitas,.                        |
| <b>P. Ngele-ngele</b>        | PT. Morotai Marine Culture | Budidaya Mutiara                 | 12,99 (Laut) | APL                  | <b>Patuh Regulasi.</b> Memiliki SHM, KKPRL, Izin Lingkungan, dan Sertifikat CBIB. Potensi PNBP Rp 330 Juta,,.        |
| <b>P. Dodola</b>             | UPTD Dinas Pariwisata      | Wisata Bahari                    | 6,09         | Hutan Lindung & APL  | Belum memiliki KKPRL, Izin Lingkungan, maupun IMB. Potensi PNBP Rp 155 Juta,,.                                       |
| <b>P. Metita</b>             | PT. Halmahera Explorers    | Resort Wisata (PMA)              | 2,98         | <b>Hutan Lindung</b> | Memiliki rekomendasi pemanfaatan Hutan Lindung dan Izin Lingkungan. Belum ada rekomendasi PPK <100km <sup>2</sup> ,. |

### c. Provinsi Maluku

Teridentifikasi 463 aktivitas pemanfaatan di pulau-pulau kecil Provinsi Maluku, yang didominasi oleh usaha mikro dan kecil seperti toko, rumah makan, dan *homestay*. Studi kasus di Pulau Nusa Ela (luas <100 km<sup>2</sup>) menggambarkan model pemanfaatan pariwisata berintensitas rendah (*low-impact tourism*) yang adaptif terhadap daya dukung lingkungan terbatas. Temuan utama di lokasi ini adalah adanya dualisme legalitas; pemanfaatan lahan memiliki legitimasi kuat secara hukum adat (izin dari Negeri Ureng), namun belum terintegrasi ke dalam sistem perizinan berusaha nasional (OSS).

Keberadaan infrastruktur energi terbarukan (PLTS) teridentifikasi sebagai faktor kunci keberlanjutan operasional usaha di pulau terpencil.

Tabel 3.10. Ringkasan Profil Pemanfaatan di Provinsi Maluku

| Parameter              | Keterangan            | Data Kunci / Temuan                                                             |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statistik Makro</b> | Jumlah Aktivitas      | Teridentifikasi <b>463 aktivitas</b> pemanfaatan di pulau-pulau kecil.          |
|                        | Dominasi Sektor       | Toko (141 unit), Restoran (129 unit), Hotel/Homestay (83 unit).                 |
| <b>Studi Kasus</b>     | <b>Pulau Nusa Ela</b> | Pulau sangat kecil berpenghuni (70 KK) di Maluku Tengah,.                       |
|                        | Jenis Usaha           | <b>Nusa Ela Resort</b> (Luas $\pm 0,1$ Ha) & Villa Pribadi.                     |
|                        | Infrastruktur         | Didukung oleh PLTS Komunal berkapasitas 75 kWp.                                 |
|                        | Isu Legalitas         | Kesenjangan antara izin berbasis Hukum Adat (Negeri) dengan Hukum Negara (OSS). |

Berdasarkan hasil identifikasi diketiga Lokasi dapat diketahui bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil di ketiga lokasi sangat didominasi oleh sektor pariwisata, yang menunjukkan potensi ekonomi besar dari keindahan bahari. Terdapat kesenjangan yang signifikan terkait kepemilikan izin formal. Di Raja Ampat, tantangannya adalah pemenuhan izin KKPR. Di Maitara, sebagian usaha belum berizin. Sementara di Nusa Ela, pemanfaatan masih sangat bergantung pada legalitas adat dan belum tersentuh perizinan formal pemerintah. Di semua lokasi, pelibatan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan operasional usaha. Kearifan lokal, baik dalam bentuk arsitektur, ritual budaya, maupun hak ulayat, memegang peranan penting dalam dinamika pemanfaatan pulau. Secara umum, pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk pariwisata terbukti memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha turunan.



Gambar 3.10 Kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil di Wilker LPSPL Sorong

## **2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025**

Sasaran Kegiatan Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan pulau – pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong dengan IK Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen) merupakan Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target baru. sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

## **3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Efisiensi anggaran disebabkan LPSPL Sorong dalam melakukan identifikasi pemanfaatan pulau pulau kecil dapat dilakukan secara daring melalui citra satelit. LPSPL Sorong juga memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong membuat proses identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

## **4 Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi**

### **a. Analisis Keberhasilan**

Ketercapaian target ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya sumberdaya manusia (SDM) LPSPL Sorong yang handal dalam mengolah citra satelit dan data spasial sehingga proses pengerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

### **b. Analisis Kegagalan/Kendala**

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan IK ini adalah adanya blokir PNPB dan belum terdapat Maksimum Pencairan PNPB hingga triwulan III tahun 2025.

### **c. Solusi**

Mengatasi tantangan ini LPSPL Sorong melaksanakan pengumpulan informasi awal melalui pengolahan citra satelit dan koordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong.

## **5 Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 5**

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada triwulan tahun 2025 adalah identifikasi pemanfaatan Pulau Pulau Kecil di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya, Pulau Nusa Ela (Kabupaten Maluku Tengah) Provinsi Maluku, dan Pulau Maitara (Kota Tidore Kepulauan) Provinsi Maluku Utara.

## 6 Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi triwulan I tahun 2026 untuk mendukung IK ini adalah melakukan identifikasi pemanfaatan pulau pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong melalui citra satelit dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait aktivitas pemanfaatan Pulau Pulau Kecil di wilayah kerja LPSPL Sorong.

### 3.6 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong. LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 4 ini kedalam 1 IKU, yaitu IKU Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen).

#### 3.6.1. IK 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)

Kegiatan verifikasi dan pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang laut, antara lain dapat mengetahui:

- a. Melakukan penilaian teknis terhadap permohonan KKPRP yang masuk melalui OSS dan/atau aplikasi e-Sea
- b. Melakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut berupa identifikasi pengendalian dan penilaian kepatuhan KKPRP
- c. Mengetahui potensi dari PNBP;

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi dan verifikasi pemanfaatan ruang laut. Target capaian IK ini adalah 2 Dokumen yang terdiri dari dokumen Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dan Dokumen Pelaksanaan Verifikasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut.

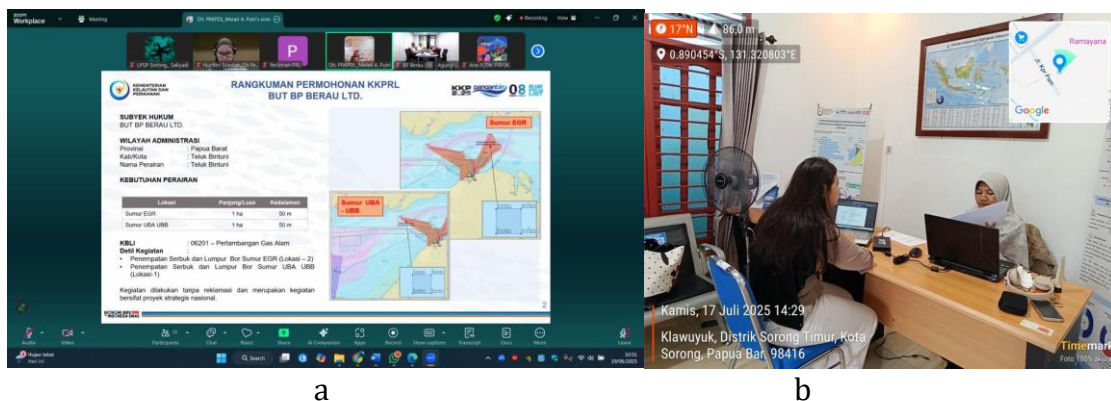
Tabel 3.11 Capaian IK 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)

| SK.6              | Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong |           |           |                            |                |                    |                   |                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| IKU.6             | Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)                          |           |           |                            |                |                    |                   |                            |
| Realisasi<br>2024 | Tahun 2025                                                                                                                              |           |           |                            | Tahun 2025     |                    | Renstra 2025-2029 |                            |
|                   | Target                                                                                                                                  | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd TW tahun 2024 | Target PK 2025 | % Realisasi thd PK | Target s.d 2029   | % Capaian thd Renstra 2025 |
| 3                 | 2                                                                                                                                       | 2         | 100%      | -1                         | 2              | 100%               | 2                 | 100%                       |

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2025

### 1. Capaian IK Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen) Tahun 2025

Capaian IK Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong memiliki target 2 dokumen capaian IK ini pada tahun 2025 adalah 2 Dokumen. Persentase capaian indikator kinerja ini adalah 100%.



Gambar 3.11 Gambar Verifikais Teknis (a) dan Asistensi Proposal Perizinan KKPRL di wilayah kerja LPSPL Sorong

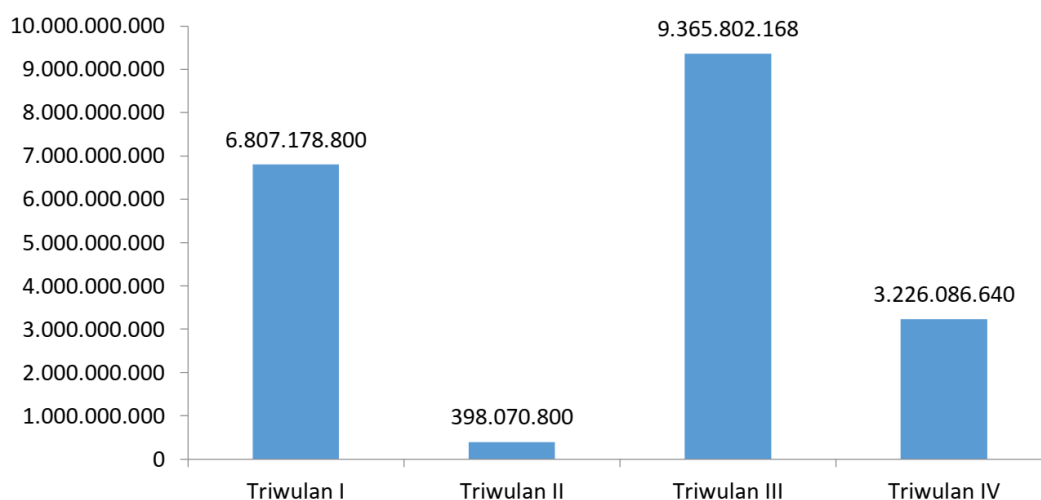
Pada periode tahun 2025, telah dilaksanakan 68 Penilaian teknis (23 penilaian teknis TW1 terhadap 27 Permohonan, 6 Penilaian teknis TW2 terhadap 8 permohonan, 19 Penilaian teknis TW 3 terhadap 32 permohonan dan 20 Penilaian teknis TW 4 terhadap 21 permohonan) pada 61 pemrakarsa dengan 88 pengajuan permohonan di 20 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi untuk berbagai jenis pemanfaatan ruang laut. Sebanyak 54 Penilaian dilaksanakan oleh Direktorat Penataan Ruang Laut, dan 14 Penilaian teknis dilaksanakan oleh UPT Loka PSPL Sorong. Sementara itu, untuk kegiatan Penilaian teknis yang dilanjutkan dengan verifikasi lapangan telah dilakukan kepada PT Nusa Karya

Arindo dan dan CV Regina Rahel. Sedangkan berdasarkan Provinsi, pengajuan permohonan KKPRL tertinggi di Provinsi Maluku Utara sebanyak 25 Permohonan yang diajukan 15 pemrakarsa (Tabel 3.12).

Tabel 3.12. Jumlah subjek hukum yang telah masuk tahap verifikasi berdasarkan Provinsi

| No | Provinsi         | Pemrakarsa | Permohonan |
|----|------------------|------------|------------|
| 1  | Maluku Utara     | 15         | 25         |
| 2  | Maluku           | 23         | 24         |
| 3  | Papua Barat Daya | 8          | 8          |
| 4  | Papua Barat      | 3          | 15         |
| 5  | Papua Tengah     | 1          | 3          |
| 6  | Papua            | 9          | 11         |
| 7  | Papua Selatan    | 1          | 1          |
| 8  | Lintas Provinsi  | 1          | 1          |
|    | Total            | 61         | 88         |

Dari keseluruhan 68 penilaian teknis untuk 88 permohonan dari 61 pemrakarsa, dan berdasarkan PP 85 tahun 2021 tentang PNPB dilingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, teridentifikasi potensi Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKPRL yang dimohonkan pada tahun 2025 mencapai 19,79 milyar rupiah (Tabel 3.12). Potensi nilai PNPB ini bersumber dari 55 Pemrakarsa yang berstatus Persetujuan KKPRL dan insentif PNPB Rp 0 Rupiah pada 6 Pemrakarsa dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan nilai 3,39 milyar rupiah.



Gambar 3.12. Grafik Peningkatan PNPB Persetujuan KKPRL tahun 2025

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut telah dilaksanakan pada 11 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi di wilayah kerja Loka PSPL Sorong yaitu di Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan (Maluku Utara), Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah (Maluku), Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat (Papua Barat Daya), Kabupaten Manokwari (Papua Barat), Kabupaten Nabire (Papua Tengah) dan Kota Jayapura (Papua). Untuk kegiatan Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPRL dilakukan terhadap 13 Subjek Hukum (Lebih 1 target dari 12 Target) yang terdiri dari 14 dokumen KKPRL yaitu Julio Franco (Perorangan), PT Papua Resort, PT Dokindo Aimas Papua, BPBL Ambon, PT Morotai Marine Culture, Pemda Kab. Morotai, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Kharisma Trinitas Indonesia, PT PLN BMPP Nusantara I, PT Golden Eksporindo Abadi, PT Indoensia Weda Bay Industrial Park, PT Pertamina Patra Niaga Masohi, PT Rajawali Laut Timur (2 KKPRL).

Adapun status penilaian kepatuhan tahun 2025 terdapat 2 Subjek hukum dengan status taat, 9 subjek hukum dengan status taat dengan catatan dan 3 subjek hukum dengan status tidak taat. Untuk kegiatan Identifikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (belum memiliki KKPRL) teridentifikasi 9 Subjek Hukum dengan 17 kegiatan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dari sektor kepelabuhanan, pipa kabel bawah laut, bandar udara perairan, perikanan dan pariwisata.

## **2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025**

Capaian IK ini pada tahun 2024 adalah 3 dokumen sedangkan capaian tahun 2025 adalah 2 dokumen. Capaian tahun 2025 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2024 disebabkan oleh saat tahun 2024 terdapat target untuk melaksanakan sosialisasi terkait aturan kegiatan pemanfaatan ruang laut sedangkan pada tahun 2025 tidak terdapat target tersebut karena kegiatan sosialisasi terkait kegiatan pemanfaatan ruang laut telah massif dilakukan oleh LPSPL Sorong semenjak tahun 2021 – 2024.

## **3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen) memiliki target jangka menengah adalah 2 dokumen dan capaian hingga tahun 2025 adalah 2 dokumen atau setara dengan 100% capaian target jangka menengah.

#### **4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi anggaran dan efisiensi sumberdaya manusia (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan. LPSPL Sorong dalam melaksanakan verifikasi memanfaatkan teknologi komunikasi secara online, sehingga mengakibatkan efisiensi anggaran. Efisiensi sumberdaya diakibatkan karena SDM LPSPL Sorong telah mengikuti bimbingan teknis terkait penyelenggaraan KKPRL sehingga dapat diandalkan dalam melaksanakan proses identifikasi, verifikasi, dan monitoring kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Adanya satuan kerja pada provinsi lain juga mengakibatkan adanya efisiensi sumberdaya.

#### **5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi**

##### **d. Analisis Keberhasilan**

Ketercapaian target ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya sumberdaya manusia (SDM) LPSPL Sorong telah mengikuti bimbingan teknis terkait penyelenggaraan KKPRL sehingga kompetensinya menunjang pelaksanaan kegiatan, koordinasi aktif dengan dengan Direktorat Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, serta Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait.

##### **e. Analisis Kegagalan/Kendala**

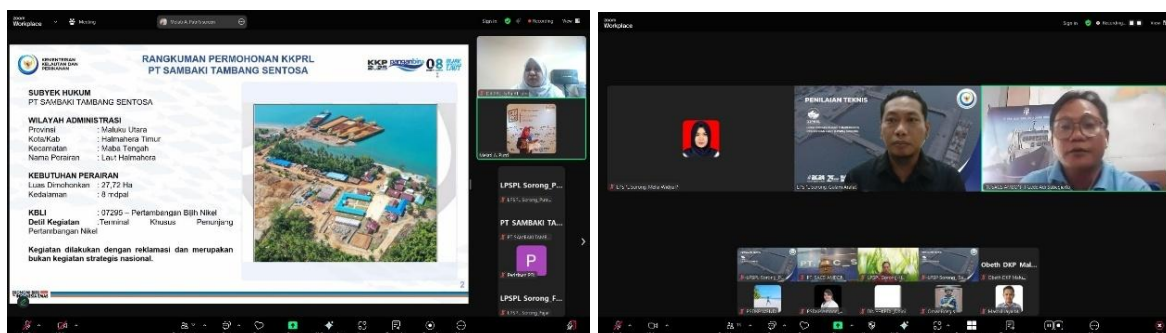
Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan IK ini adalah sehubungan dengan adanya surat instruksi presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan untuk mendukung pelaksanaan IK.

##### **f. Solusi**

Menghadapi tantangan ini LPSPL Sorong berupaya melakukan kegiatan secara daring, namun terdapat tantangan lain yaitu detail informasi yang diperoleh hanya berdasar pada proses wawancara tanpa ada peninjauan lapangan, oleh karena itu disarankan agar dibuat SOP untuk pelaksanaan kegiatan monitoring atau pengendalian secara daring untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tetap memenuhi standar informasi yang diperlukan.

## 6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 6

Tahun 2025 LPSPL Sorong telah melaksanakan kegiatan pendukung seperti asistensi dan konsultasi pendampingan pengurusan KKPRL, ikut serta dalam ekspose pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut, bimbingan teknis terkait pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut dan pelatihan penggunaan drone untuk pemetaan kegiatan pemanfaatan ruang laut.



Gambar 3.13 Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendukung IK 6

## 7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Pada triwulan I tahun 2026 LPSPL Sorong akan melaksanakan kegiatan penilaian teknis KKPRL resiko rendah dan pelayanan terkait pendampingan penyusunan perizinan kegiatan pemanfaatan ruang laut di Wilayah kerja LPSPL Sorong.

### 3.7 Sasaran Kegiatan 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong, maka LPSPL Sorong menjabarkan dalam 11 IK, yaitu (i) IK 6 Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai), (ii) IK 7 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai), (iii) IK 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai), (iv) IK 9 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen), (v) IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks) (vi) IK 11 nilai Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%), (vii) IK 12 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPSPL Sorong (%), (viii) IK 13 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai) (ix) IK 14 Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai), (x) IK 15 Persentase rencana umum

pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%), (xi) IK 16 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai).

### 3.7.1. IK 6 Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

- perencanaan kinerja (30%);
- pengukuran kinerja (30%);
- pelaporan kinerja (15%); dan
- evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL sesuai dengan kategori (Tabel 3.13)

Tabel 3.13 Kategori nilai PM SAKIP

| Predikat | Nilai   | Interpretasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AA       | >90-100 | Sangat Memuaskan<br>Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.                                                                                                                                         |
| A        | >80-90  | Memuaskan<br>Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.                                                                                                                                                                                |
| BB       | >70-80  | Sangat Baik<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. |
| B        | >60-70  | Baik<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.                                                                                                                                |
| CC       | >50-60  | Cukup<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C        | >30-50  | Kurang<br>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.                                                                                                                                                                                                                                            |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D | 0-30 | Sangat Kurang<br>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP. |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Tabel 3.14 Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)**

|                       |                                                                        |           |           |                                  |                   |                       |                    |                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| SK.7                  | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong |           |           |                                  |                   |                       |                    |                                  |
| IKU.7                 | Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                            |           |           |                                  |                   |                       |                    |                                  |
| Realisasi<br><br>2024 | Tahun 2025                                                             |           |           |                                  | Tahun 2025        |                       | Renstra 2025-2029  |                                  |
|                       | Target                                                                 | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd<br>TW tahun<br>2024 | Target PK<br>2025 | % Realisasi<br>thd PK | Target s.d<br>2029 | % Capaian<br>thd Renstra<br>2025 |
|                       | 85,30                                                                  | 80        | 88,10     | 110,12%                          | 2,80              | 80                    | 110,12%            | 70                               |

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2025

### 1. Capaian IK Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai) Tahun 2025

Target IK nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong yang ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong tahun 2025 adalah 80. LPSPL Sorong telah melakukan pleno penilaian SAKIP yang di evaluasi oleh Setditjen PKRL. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai nilai capaian indikator kinerja ini adalah 88,10. Rincian hasil penilaian AKIP LPSPL Sorong adalah Perencanaan Kinerja sebesar 25,20; Pengukuran Kinerja sebesar 26,10; Pelaporan Kinerja sebesar 13,80 dan Evaluasi Internal sebesar 23,00 (Tabel 3.15).

**Tabel 3.15 Hasil Penilaian AKIP pada LPSPL Sorong Tahun 2025**

| No                          | Komponen Yang Dinilai | Bobot      | Nilai 2025   |
|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------|
| 1                           | Perencanaan Kinerja   | 30         | 25.20        |
| 2                           | Pengukuran Kinerja    | 30         | 26.10        |
| 3                           | Pelaporan Kinerja     | 15         | 13.80        |
| 4                           | Evaluasi Internal     | 25         | 23.00        |
| <b>Nilai Hasil Evaluasi</b> |                       | <b>100</b> | <b>88.10</b> |
| <b>Predikat Penilaian</b>   |                       |            | <b>A</b>     |

### 2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2025

Capaian tahun 2024 adalah 85,30 sedangkan capaian pada tahun 2025 adalah 88,10. Terdapat peningkatan nilai sebesar 2,80. Peningkatan tersebut terjadi karena LPSPL Sorong senantiasa melakukan perbaikan tatakelola kinerja instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban instansi pemerintah.

### **3. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah***

Indikator Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai) memiliki target jangka menengah 70. Capaian pada tahun 2025 adalah 88,10 persentase capaian tahun 2025 terhadap target jangka menengah ada 120%.

### **4. *Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya***

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi sumberdaya anggaran. Sebagian kegiatan pendukung dalam progress pencapaian indikator kinerja ini dapat dilakukan secara daring (*online*) sehingga efisiensi pada belanja perjalanan dinas.

### **5. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

#### **a. Analisis Keberhasilan**

Keberhasilan diupayakan melalui kelengkapan dokumen dan setiap perubahan diikuti dengan perubahan dokumen perencanaan maupun dokumen monitoring evaluasi. Penyesuaian dokumen tersebut disesuaikan untuk menjamin akuntabilitas kinerja LPSPL Sorong.

#### **b. Analisis Kegagalan/Kendala**

Pada Tahun 2025 belum terdapat kendala dalam progress pencapaian indikator kinerja ini, karena semua dokumen telah dipenuhi.

#### **c. Solusi**

Pada tahun 2025 belum terdapat kendala sehingga belum terdapat solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut.

### **6. *Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 7***

LPSPL Sorong melakukan pemenuhan dokumen pendukung PM SAKIP diantaranya Perjanjian Kinerja, Rincian Target, Manual IKU, Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja Tahun 2024, Laporan Kinerja Triwulan I – III Tahun 2025. Selain itu dilakukan juga evaluasi pencapaian kinerja LPSPL Sorong secara berkala disetiap bulan melalui rapat bulanan.



Gambar 3.14 Dokumentasi pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja LPSPL Sorong setiap bulan

## 7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Pada triwulan I tahun 2026 akan dilaksanakan verifikasi data capaian kinerja triwulan I tahun 2026, penyusunan laporan kinerja TW I tahun 2026 dan melakukan monitoring evaluasi bulanan.

### 3.7.2. IK 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Indikator tersebut antara lain Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Data Kontrak (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), Penyerapan Anggaran (20%), dan Capaian Output (25%).

Cara hitung IK ini menggunakan rumus

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Tabel 3.16 Bobot Penilaian IKPA

| No | Uraian Indikator IKPA  | Bobot (%)              |
|----|------------------------|------------------------|
| 1  | Revisi DIPA            | 10                     |
| 2  | Deviasi RPD            | 15                     |
| 3  | Penyerapan Anggaran    | 20                     |
| 4  | Belanja Kontraktual    | 10                     |
| 5  | Penyelesaian Tagihan   | 10                     |
| 6  | Pengelolaan UP dan TUP | 10                     |
| 7  | Dispensasi SPM         | (Pengurang Nilai IKPA) |
| 8  | Capaian Output         | 25                     |

Tabel 3.17 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

|                |                                                                                  |           |           |                            |                |                    |                   |                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| SK.7           | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong           |           |           |                            |                |                    |                   |                            |
| IKU.8          | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai) |           |           |                            |                |                    |                   |                            |
| Realisasi 2024 | Tahun 2025                                                                       |           |           |                            | Tahun 2025     |                    | Renstra 2025-2029 |                            |
|                | Target                                                                           | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd TW tahun 2024 | Target PK 2025 | % Realisasi thd PK | Target s.d 2029   | % Capaian thd Renstra 2025 |
| 95,20          | 89                                                                               | 78,10     | 88,35%    | -17,78                     | 89             | 88,35%             | 92                | 84,89%                     |

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2025

### 1. Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai) Tahun 2025

Berdasarkan aplikasi OMSPAN pada <https://spanint.kemenkeu.go.id> dan surat nomor 111/SJ.2/RC.610/I/2026 tentang Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025 bahwa nilai IKPA LPSPL Sorong tahun 2025 yaitu 78,64 dengan target 89 sehingga pada Tahun 2025 capaiannya 88,35% dari target. Nilai IKPA tidak mencapai target disebabkan oleh besarnya deviasi halaman III DIPA LPSPL Sorong dan rendahnya serapan anggaran. Rincian capaian Indikator Kinerja ini yaitu Revisi DIPA (Nilai Akhir 10); Revisi HAL III DIPA (Nilai Akhir 13,61); Penyerapan Anggaran (Nilai Akhir 19,92); Deviasi Halaman III DIPA (9,36); Penyerapan Anggaran (10,99); Belanja Kontraktual (6,33); Penyelesaian Tagihan (10,00); Pengelolaan UP dan TUP (6,35); dan Capaian Output (25) serta berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024, dispensasi SPM dihitung sebagai bagian di luar komponen nilai IKPA, dan tetap menjadi komponen pengurang nilai IKPA, sampai dengan Tahun 2024 tidak ada Dispensasi SPM (Nilai Akhir 0) sehingga Total Nilai IKPA LPSPL Sorong pada Tahun 2025 yaitu 78,64.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker                                       | Keterangan  | Kualitas Perencanaan Anggaran |                          | Kualitas Pelaksanaan Anggaran |                     |                      |                        | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Dispensasi SPM (Pengurang) | Nilai Akhir (Nilai Total/Konvers Bobot) |
|----|-----------|---------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|    |           |         |             |                                                     |             | Revisi DIPA                   | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran           | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Capaian Output                      |             |                |                            |                                         |
| 1  | 066       | 032     | 477440      | LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG | Nilai       | 100.00                        | 62.43                    | 54.97                         | 63.33               | 100.00               | 63.47                  | 100.00                              | 78.04       | 100%           | 0.00                       | 78.04                                   |
|    |           |         |             |                                                     | Bobot       | 10                            | 15                       | 20                            | 10                  | 10                   | 25                     |                                     |             |                |                            |                                         |
|    |           |         |             |                                                     | Nilai Akhir | 10.00                         | 9.36                     | 10.99                         | 6.33                | 10.00                | 6.35                   | 25.00                               |             |                |                            |                                         |
|    |           |         |             |                                                     | Nilai Aspek | 81.22                         |                          | 70.44                         |                     |                      |                        | 100.00                              |             |                |                            |                                         |

Gambar 3.15 Nilai IKPA LPSPL Sorong

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong pada tahun 2025 sebesar 78,04 sedangkan pada tahun 2024 sebesar 95,82. Capaian ini menurun sebesar 17,78. Turunnya nilai IKPA disebabkan oleh besarnya deviasi halaman III DIPA LPSPL Sorong dan rendahnya serapan anggaran.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Nilai IKPA LPSPL Sorong pada tahun 2025 sebesar 78,10 sedangkan pada target jangka menengah sebesar 92 atau sebesar 84,89% dari target. Rendahnya nilai IKPA disebabkan karena disebabkan oleh besarnya deviasi halaman III DIPA LPSPL Sorong dan rendahnya serapan anggaran.

## 4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi sumberdaya anggaran. IKPA digunakan dalam mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Efisiensi anggaran terlihat bahwa target kinerja telah dilaksanakan namun terdapat sisa anggaran.

## 5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

### a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas perencanaan anggaran melalui pelaksanaan revisi DIPA; menjaga kualitas pelaksanaan anggaran

melalui monitoring penyerapan anggaran setiap bulan, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP-TUP dan dispensasi SPM serta berusaha meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memaksimalkan capaian output. LPSPL Sorong secara rutin melakukan monitoring capaian output dengan perencanaan dan realisasi anggaran setiap bulannya melalui rapat bulanan.

**b. Analisis Kegagalan/Kendala**

Tantangan terhadap pelaksanaan IK ini adalah adanya penundaan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dari PLN hingga Juni 2025 berdasarkan surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Oceans for Prosperity Project dan selain itu terdapat blokir penggunaan PNPB hingga Juni 2025 serta hingga akhir Triwulan II tidak terdapat MP PNPB. Hal ini mengakibatkan proses penyerapan anggaran tertunda. Oleh karena itu disarankan agar LPSPL Sorong dapat melakukan revisi halaman III DIPA. Kendala TW III lainnya dalam pencapaian target nilai IKPA adalah ketidaktepatan waktu dalam pengelolaan UP/TUP, karena sempat terkendala pada proses TTE pada aplikasi SAKTI, sehingga penyelesaian pengelolaan UP/TUP tertunda beberapa hari dan tanggal jatuh tempo.

**c. Solusi**

LPSPL Sorong melakukan monitoring IKPA secara mingguan untuk memberikan informasi kepada seluruh pegawai LPSPL Sorong terkait deviasi belanja sehingga dapat dijadikan acuan pada perencanaan kegiatan periode berikutnya. Mengatasi tantangan deviasi halaman III DIPA disarankan untuk melakukan revisi halaman III DIPA secara periodik. LPSPL Selain itu LPSPL Sorong juga berkomitmen dalam melakukan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan serta tidak terlambat dalam pertanggungjawaban UP TUP.

**6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK**

LPSPL Sorong melakukan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulan serta monitoring update nilai kinerja anggaran pada aplikasi OMSPAN dan Monitoring IKPA secara mingguan. Selain itu secara rutin nilai kinerja anggaran disampaikan pada rapat bulanan.

## 7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Pada triwulan I akan dilakukan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI, melakukan revisi POK dan halaman III DIPA untuk acuan pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV.

### 3.7.3. IK 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Penilaian kinerja anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai kinerja anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap:

1. Kinerja anggaran tingkat Satker;
2. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I; dan
3. Kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga.

Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:

#### 1. Variabel Efektivitas

Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari;
2. Capaian indikator kinerja program untuk level Unit Eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari;
3. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
4. Variabel Efisiensi;

#### 2. Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi:

1. Penggunaan SBK; dan/atau
2. Efisiensi SBK.

Dalam rangka meningkatkan kualitas data capaian kinerja Kementerian/Lembaga yang dilaporkan melalui sistem informasi, dilakukan pengisian informasi data pra-pelaporan meliputi :

## 1. Manual indikator kinerja sasaran strategis

Pengisian manual indikator kinerja sasaran strategis dilakukan di tingkat Kementerian/Lembaga. Pengisian manual indikator dilakukan 1 (satu) kali pada tahun anggaran berjalan. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan indikator kinerja sasaran strategis, pengisian manual indikator dapat diperbarui pada tanggal 1 Januari hingga akhir Februari tahun anggaran berikutnya hanya untuk indikator yang berubah/bertambah. Informasi yang diisikan dalam manual indikator kinerja sasaran strategis, antara lain:

1. Definisi indikator kinerja sasaran strategis;
2. Formula perhitungan capaian indikator;
3. Tujuan;
4. Tingkat kendali;
5. Tingkat validitas indikator;
6. Polarisasi capaian;
7. Instansi penyedia data;
8. Sumber/aplikasi/media data;
9. Waktu data tersedia;
10. Periode pelaporan; dan/atau
11. Keterkaitan dengan indikator RPJMN/RKP.

## 2. Manual indikator kinerja program

Pengisian manual indikator kinerja program dilakukan di tingkat Unit Eselon I. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan indikator kinerja program, pengisian manual indikator dapat diperbarui pada tanggal 1 Januari hingga akhir Februari tahun anggaran berikutnya hanya untuk indikator yang berubah/bertambah. informasi yang diisikan dalam manual indikator kinerja program, antara lain:

1. Definisi indikator kinerja program;
2. Formula perhitungan capaian indikator;
3. Tujuan;
4. Tingkat kendali;
5. Tingkat validitas indikator;
6. Polarisasi capaian;
7. Instansi penyedia data;

8. Sumber/aplikasi/media data;
9. Waktu data tersedia;
10. Periode pelaporan; dan/atau
11. Keterkaitan dengan indikator RPJMN/RKP.

### 3. Manual RO berdasarkan referensi yang telah disediakan

Pengisian manual RO dilakukan di tingkat Unit Eselon I. Pengisian manual RO dilakukan sejak awal tahun anggaran sebagai prasyarat pelaporan capaian RO tahun anggaran berjalan. Manual RO dapat diperbarui apabila terdapat perubahan nomenklatur RO, perubahan satuan atau penambahan RO baru. Adapun referensi manual RO antara lain:

1. Statis/dinamis;
2. Cara pelaporan;
3. Polarisasi capaian; dan/atau
4. Polarisasi waktu.

Pengukuran indikator kinerja perencanaan anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai capaian setiap indikator. Pedoman ini akan mengatur pengukuran indikator kinerja perencanaan anggaran sebagai berikut:

### **Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker**

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

#### **Efektivitas**

##### **Capaian RO**

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left( \left( \sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- CRO : Capaian RO tingkat Satker  
 RVRO<sub>i</sub> : Realisasi Volume RO i  
 TVRO<sub>i</sub> : Target Volume RO i  
 n : Jumlah RO

#### **Efisiensi**

Penggunaan SBK Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang

telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

*Penggunaan SBK*

$$= \left( \frac{\sum RO \text{ SBKK} + \sum RO \text{ SBKU}}{\sum RO \text{ SBKK dalam PMK} + \sum RO \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

PPKA Perencanaan Anggaran K/L yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan salah satunya dapat mengidentifikasi RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU sebagai salah satu dasar penilaian kinerja penggunaan SBK.

### **Efisiensi SBK**

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left( \left( \sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

ESBK : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja

Indeks RA SBK<sub>i</sub> : Indeks Realisasi RO i SBK

n : Jumlah RO SBK

Dalam rangka penilaian kinerja perencanaan anggaran, efisiensi SBK perlu dikonversi agar menjadi skala nilai antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

Keterangan

NESBK : Nilai Efisiensi SBK

ESBK : Efisiensi SBK

### Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satker

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Satker sebagai berikut:

Tabel 3.18 Tabel Bobot Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satker

| Variabel       | Indikator         | Bobot |
|----------------|-------------------|-------|
| Efektivitas 75 | 1. Capaian RO     | 75    |
| Efisiensi 25   | 1. Penggunaan SBK | 10    |
|                | 2. Efisiensi SBK  | 15    |

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker menggunakan formula sebagai berikut:

NKA Satker = (CRO x WCRO) + (PenggunaanSBK x WPenggunaanSBK) + (NEAlokasi x WEAlokasi)

Keterangan

NKA Satker : Nilai Kinerja Anggaran Satker

CRO : Capaian RO

PenggunaanSBK : Penggunaan SBK

NEAlokasi : Nilai Efisiensi Alokasi

WCRO : Bobot Capaian RO

WPenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK

WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

### Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Untuk mempermudah interpretasi terhadap hasil perhitungan nilai kinerja

perencanaan anggaran, nilai kinerja perencanaan anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Kategori Sangat Baik, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 90 (Sembilan puluh).
2. Kategori Baik, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh).
3. Kategori Cukup, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh).
4. Kategori Kurang, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 50 (limapuluh) sampai dengan 60 (enam puluh).
5. Kategori Sangat Kurang, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran sampai dengan 50 (lima puluh)

Tabel 3.19 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup Lpspl Sorong (Nilai)

| SK.7           | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong |           |           |                            |                |                    |                   |                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| IKU.9          | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Djpkrl Lingkup Lpspl Sorong (Nilai) |           |           |                            |                |                    |                   |                            |
| Realisasi 2024 | Tahun 2025                                                             |           |           |                            | Tahun 2025     |                    | Renstra 2025-2029 |                            |
|                | Target                                                                 | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd TW tahun 2024 | Target PK 2025 | % Realisasi thd PK | Target s.d 2029   | % Capaian thd Renstra 2025 |
| 95,82          | 71,5                                                                   | 98,57     | 120%      | 2,75                       | 71,5           | 120%               | 81,5              | 120%                       |

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2025

#### 1. *Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)*

Berdasarkan aplikasi DJA SMART pada <https://monev.kemenkeu.go.id/> bahwa nilai kinerja anggaran LPSPL Sorong telah mencapai 100% dengan nilai 98,57 (Gambar 3.16). Target capaian IKM ini adalah tahunan dengan nilai 71,5. Persentase capaian berdasarkan target tahun 2025 adalah 120%. Tingginya capaian dikarenakan nilai dikarenakan LPSPL Sorong berhasil mengoptimalkan nilai perencanaan dan efisiensi anggaran dalam penilaian NKPA.

|     |                   |                                                     |                         | Efektivitas |                | Efisiensi     |  |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|---------------|--|
| No. | Kode Satuan Kerja | Satuan Kerja                                        | NK Perencanaan Anggaran | Capaian RO  | Penggunaan SBK | Efisiensi SBK |  |
| 1   | 032.07.477440     | LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG | 98,57                   | 100,00      | 85,71          | 100,00        |  |

Gambar 3.16 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025.  
(Sumber: Aplikasi DJA SMART 8 Januari 2025)

## **2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025**

Capaian IK ini pada tahun 2025 sebesar 98,57 sedangkan pada tahun 2024 sebesar 95,82. Nilai capaian tahun 2025 meningkat sebesar 2,75. Meningkatnya nilai capaian ini disebabkan oleh LPSPL Sorong berhasil mengoptimalkan nilai perencanaan dan efisiensi anggaran.

## **3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup LPSPL Sorong memiliki target jangka menengah sebesar 81,5 capaian LPSPL Sorong pada tahun 2025 adalah 98,57 atau memiliki persentase capaian 120% dari target jangka menengah.

## **4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi sumberdaya anggaran. Apabila nilai kinerja anggaran LPSPL Sorong dalam kategori baik maka terdapat efisiensi anggaran yang tercipta dari serapan anggaran dalam mencapai output terhadap standar biaya keluaran (SBK).

## **5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi**

### **a. Analisis Keberhasilan**

LPSPL Sorong secara rutin mengontrol realisasi anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan dan mengisi secara bertahap capaian pada aplikasi SAKTI. SDM LPSPL Sorong juga telah mengikuti bimbingan teknis terkait mengelola aplikasi SMART DJA. Selain itu setiap triwulan LPSPL melakukan revisi atau penyesuaian halaman III DIPA untuk meningkatkan nilai pelaksanaan anggaran.

### **b. Analisis Kegagalan/Kendala**

Tantangan terhadap pelaksanaan IK ini adalah adanya surat instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang entang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja. Selain itu terdapat pendanaan pencairan anggaran kegiatan yang bersumber dari PLN untuk project Lautra hingga Juni 2025 berdasarkan surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Oceans for Prosperity Project dan selain itu terdapat blokir penggunaan PNPB hingga Juni 2025 serta hingga akhir Triwulan II tidak terdapat MP PNPB. Hal ini mengakibatkan proses

penyerapan anggaran tertunda. Oleh karena itu disarankan agar LPSPL Sorong dapat melakukan revisi halaman III DIPA.

### c. Solusi

LPSPL Sorong dapat melakukan revisi halaman III DIPA dan pemantauan DIPA secara berkala untuk menyesuaikan ketersediaan anggaran yang dapat digunakan.

## 6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 9

LPSPL Sorong melakukan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulan serta monitoring update nilai kinerja anggaran pada aplikasi DJA SMART. Secara rutin nilai kinerja anggaran disampaikan pada rapat bulanan.

## 7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Pada triwulan I tahun 2026 akan dilakukan penginputan capaian rincian output pada aplikasi SAKTI dan melakukan revisi atau penyesuaian halaman III DIPA.

### 3.7.4. IK 9 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan I Tahun 2025. Cara penghitungan Indikator kinerja ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 3.20 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)

| SK.7              | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong |           |           |                                  |                   |                       |                    |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| IKU.9             | Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)               |           |           |                                  |                   |                       |                    |                                  |
| Realisasi<br>2024 | Tahun 2025                                                             |           |           |                                  | Tahun 2025        |                       | Renstra 2025-2029  |                                  |
|                   | Target                                                                 | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd<br>TW tahun<br>2024 | Target PK<br>2025 | % Realisasi<br>thd PK | Target s.d<br>2029 | % Capaian<br>thd Renstra<br>2025 |
| 4                 | 4                                                                      | 4         | 100%      | 0                                | 4                 | 100%                  | 4                  | 100%                             |

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2025

### 1. *Capaian IK Indeks Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen) Triwulan III Tahun 2025*

Indikator kinerja ini pada triwulan tahun 2025 telah tercapai 4 dokumen atau capaiannya 100% yaitu dokumen SPIP triwulan IV tahun 2024, SPIP triwulan I tahun 2025, SPIP triwulan II tahun 2025 dan SPIP triwulan III tahun 2025. Capaian ini telah disampaikan ke Direktur Jenderal PRL dengan surat nomor: B.32/LPSPL.1/TU.140/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Penyampaian SPIP Triwulan IV Tahun 2024, surat nomor B.377/LPSPL.1/TU.140/IV/2025 tanggal 15 April 2025 April perihal penyampaian SPIP Triwulan I Tahun 2025 dan surat nomor B.667/LPSPL.1/TU.140/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 Perihal Penyampaian Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 di Lingkup LPSPL Sorong. Laporan SPIP triwulan III telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Pengemselalui surat nomor B.1063/LPSPL.1/TU.140/X/2025.



Gambar 3.17 Tangkapan Layar Laporan SPIP TW IV tahun 2024, SPIP TW I Tahun 2025, SPIP TW II dan SPIP TW III Tahun 2025

### 2. *Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025*

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2024 dan 2025 yaitu triwulanan. Target indikator kinerja ini pada tahun 2024 dan tahun 2025 yaitu 4 dokumen. Capaian pada tahun 2024 yaitu 4 dokumen atau 100% sama dengan capaian tahun 2025.

### **3. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah***

Indikator kinerja ini memiliki target jangka menengah sampai dengan tahun 2025 adalah 4 Dokumen. Capaian indikator kinerja ini sampai dengan tahun 2025 adalah 4 dokumen. Persentase capaian sampai dengan tahun 2025 terhadap target jangka menengah untuk indikator kinerja SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong adalah 100%.

### **4. *Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya***

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi anggaran. Adanya dokumen SPIP ini memudahkan pengendalian secara terpadu terhadap semua kegiatan lingkup LPSPL Sorong yang dilakukan melalui sistem pengendalian yang sudah ada standardisasinya, tanpa perlu langsung ke lapangan maupun penugasan dengan penganggaran. Efisiensi anggaran terjadi karena dalam pencapaian indikator kinerja ini dapat dilakukan secara daring (*online*).

### **5. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

#### **a. Analisis Keberhasilan**

LPSPL Sorong melakukan penyusunan laporan SPIP secara rutin bulanan dan triwulanan sehingga selalu tersedia data dan informasi pengendalian terupdate. Selain itu pemenuhan dokumen SPIP terupdate didukung adanya kerjasama dari SDM sesuai tugasnya masing-masing.

#### **b. Analisis Kegagalan/Kendala**

Tidak ada kendala pada pencapaian target indikator ini, kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila tidak ada kerjasama dan komitmen SDM untuk selalu menyediakan data dan informasi organisasi terupdate untuk kebutuhan pengendalian.

#### **c. Solusi**

Untuk menghindari kegagalan dalam menyusun dokumen SPIP, maka diperlukan koordinasi dan kerjasama dari beberapa pegawai yang memiliki tugas terkait penyusunan dokumen SPIP.

### **6. *Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 9***

Kegiatan pendukung capaian Indikator Kinerja ini pada triwulan III adalah penyusunan laporan SPIP TW II Tahun 2025.

## 7. Rencana Aksi Triwulan I TA 2025

Pada triwulan I tahun 2026 akan dilakukan penyusunan SPIP triwulan IV tahun 2025 dan SPIP rutin bulanan.

### 3.7.5. IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Penghitungan indikator kinerja ini dilakukan dengan cara

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$$

IP = Indeks Profesionalisme

IP<sub>i</sub> = Indeks Profesionalisme ke-i

IP<sub>1</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP<sub>2</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP<sub>3</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP<sub>4</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$  = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$  = Bobot Indikator Kualifikasi ke-k \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{31} * R_{31}$  = Bobot Indikator Kualifikasi ke-1 \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-1

$W_{4m} * R_{4m}$  = Bobot Indikator Kualifikasi ke-m \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Tabel 3.21 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)

| SK.7           | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong |           |           |                            |                |                    |                   |                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| IKU.9          | Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)               |           |           |                            |                |                    |                   |                            |
| Realisasi 2024 | Tahun 2025                                                             |           |           |                            | Tahun 2025     |                    | Renstra 2025-2029 |                            |
|                | Target                                                                 | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd TW tahun 2024 | Target PK 2025 | % Realisasi thd PK | Target s.d 2029   | % Capaian thd Renstra 2025 |
| 93,16          | 80                                                                     | 85,98     | 120%      | -7,16                      | 80             | 120%               | 80                | 107,47%                    |

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2025

## 1. Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks) Tahun 2025

Berdasarkan tautan IP ASN pada <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn/eselon> bahwa indeks profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong tahun 2025 yaitu 85.98 dengan kategori tinggi.



IP ASN 2025

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

IP ASN 2024

Silakan ketik Nama Unit Kerj

Cari

| No | Unit Kerja                                           | Jumlah Pegawai Yang Dihitung | Kualifikasi (bobot 25) |            | Kompetensi (bobot 40) |            | Kinerja (bobot 30) |            | Disiplin (bobot 5) |            | TOTAL | Keterangan    |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|-------|---------------|
|    |                                                      |                              | IP                     | Prosentase | IP                    | Prosentase | IP                 | Prosentase | IP                 | Prosentase |       |               |
| 1  | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | 46                           | 23.04                  | 92.16 %    | 28.86                 | 72.15 %    | 24.67              | 82.23 %    | 5                  | 100 %      | 81.58 | TINGGI        |
| 2  | DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM                      | 27                           | 22.78                  | 91.12 %    | 33.62                 | 84.05 %    | 25                 | 83.33 %    | 5                  | 100 %      | 86.4  | TINGGI        |
| 3  | DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK            | 31                           | 23.55                  | 94.2 %     | 32.1                  | 80.25 %    | 25                 | 83.33 %    | 5                  | 100 %      | 85.65 | TINGGI        |
| 4  | DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL             | 44                           | 23.52                  | 94.08 %    | 28.93                 | 72.32 %    | 25.91              | 86.37 %    | 5                  | 100 %      | 83.36 | TINGGI        |
| 5  | DIREKTORAT JASA BAHARI                               | 30                           | 23.67                  | 94.68 %    | 30                    | 75 %       | 26.33              | 87.77 %    | 5                  | 100 %      | 85    | TINGGI        |
| 6  | DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN                      | 38                           | 23.03                  | 92.12 %    | 31.36                 | 78.4 %     | 26.45              | 88.17 %    | 5                  | 100 %      | 85.83 | TINGGI        |
| 7  | BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PADANG           | 57                           | 21.75                  | 87 %       | 35.18                 | 87.95 %    | 27.11              | 90.37 %    | 5                  | 100 %      | 89.04 | TINGGI        |
| 8  | BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PONTIANAK        | 44                           | 21.93                  | 87.72 %    | 34.73                 | 86.83 %    | 24.77              | 82.57 %    | 5                  | 100 %      | 86.43 | TINGGI        |
| 9  | BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT MAKASSAR         | 50                           | 22.5                   | 90 %       | 34.52                 | 86.3 %     | 27.8               | 92.67 %    | 5                  | 100 %      | 89.82 | TINGGI        |
| 10 | BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT DENPASAR         | 49                           | 21.94                  | 87.76 %    | 34.5                  | 86.25 %    | 25.41              | 84.7 %     | 5                  | 100 %      | 86.85 | TINGGI        |
| 11 | LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SORONG            | 28                           | 21.79                  | 87.16 %    | 34.02                 | 85.05 %    | 25.18              | 83.93 %    | 5                  | 100 %      | 85.98 | TINGGI        |
| 12 | BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG    | 47                           | 21.49                  | 85.96 %    | 34.68                 | 86.7 %     | 26.28              | 87.6 %     | 4.91               | 98.2 %     | 87.36 | TINGGI        |
| 13 | LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU  | 39                           | 22.18                  | 88.72 %    | 37.05                 | 92.62 %    | 27.82              | 92.73 %    | 5                  | 100 %      | 92.05 | SANGAT TINGGI |
| 14 | LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SERANG            | 50                           | 22.5                   | 90 %       | 33.42                 | 83.55 %    | 27.5               | 91.67 %    | 5                  | 100 %      | 88.42 | TINGGI        |

Gambar 3.18 Indeks Profesionalitas ASN Triwulan Tahun 2025.

(Sumber: [http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/1758\\_per 1 Januari 2025](http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/1758_per_1_Januari_2025))

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indeks Profesionalitas ASN LPSPL Sorong pada tahun 2024 mencapai 93,16 sedangkan pada tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 85,98. Penurunan capaian 7,16 dari tahun 2025. Hal ini disebabkan karena berkurangnya jumlah pegawai yang memperoleh nilai SKP sangat baik karena menyesuaikan dengan peraturan surat edaran Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang tata cara penetapan predikat kinerja pegawai aparatur sipil negara.

### **3. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah***

Indeks Profesionalitas ASN LPSPL Sorong tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 85,98 sedangkan target jangka menengah sebesar 80. Capaian tersebut telah melampaui target jangka menengah sebesar 5,98 poin atau melampaui 107,47% dari target jangka menengah. Hal ini disebabkan karena peran aktif pimpinan LPSPL Sorong untuk mendorong pegawai untuk melakukan peningkatan kapasitas.

### **4. *Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya***

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi sumberdaya anggaran. Sumberdaya manusia (SDM) LPSPL Sorong sebagian besar mengikuti Bimtek/Webinar/Workshop/Seminar/Diklat melalui daring sehingga tidak ada pengeluaran biaya perjalanan yang besar untuk meningkatkan kapasitas SDM LPSPL Sorong.

### **5. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

#### **a. Analisis Keberhasilan**

- b. Kualifikasi: tingkat Pendidikan ASN LPSPL Sorong meningkat setiap tahunnya melalui tugas belajar maupun ijin belajar.
- c. Kompetensi: masing-masing ASN LPSPL Sorong memiliki kompetensi beranekaragam yang didapatkan dari Bimtek/Webinar/Workshop/Seminar/Diklat. Kompetensi tersebut diakui dengan penerbitan sertifikat atas kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti dengan minimal pembelajaran 20 jam pembelajaran (JP).
- d. Kinerja: pengisian sasaran kinerja pegawai (SKP) secara individu sudah menggunakan SKP online, sehingga sudah ada rincian target kinerja yang harus dicapai masing-masing individu dalam jangka waktu tertentu.
- e. Disiplin: tingkat kehadiran individu telah di monitoring secara berkala oleh kepegawaian sehingga meningkatkan nilai pada indikator ini.

**f. Analisis Kegagalan/Kendala**

Tidak terdapat kendala dalam mencapai indikator ini, namun pegawai yang telah mengikuti bimbingan teknis/workshop/seminar ada yang belum mengupdate sertifikatnya pada MyASN.

**g. Solusi**

Kepegawaian LPSPL Sorong melakukan monitoring secara berkala dan memberikan himbauan kepada pegawai LPSPL Sorong untuk update data peningkatan kapasitas di MyASN.

**6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 10**

Kegiatan pendukung pelaksanaan Indikator Kinerja ini adalah pegawai LPSPL Sorong telah mengikuti kegiatan pelatihan, bimtek dan/atau seminar serta mengunggah data dukungnya di portal MyASN, pengusulan pencantuman gelar dan penilaian kinerja pegawai.

**7. Rencana Aksi Triwulan I TA 2026**

Pada triwulan I tahun 2026, pegawai LPSPL Sorong secara mandiri maupun ditugaskan untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis/seminar/workshop. Serta melakukan penginputan sertifikat kompetensi pelatihan secara mandiri oleh masing-masing pegawai untuk mendukung IP ASN pada dimensi kompetensi. Bagian kepegawaian akan melakukan monitoring secara berkala melalui WA grup bagi pegawai yang belum menginput data sertifikat pada e-pegawai. Masing-masing pegawai akan mulai mengupload Sertifikat Pelatihan Bimtek/Seminar/Workshop pada aplikasi MyASN dan pengisian arsip sertifikat secara mandiri pada gdrive yang disiapkan oleh bagian kepegawaian. Kepegawaian LPSPL Sorong juga melakukan share informasi terkait kegiatan bimtek maupun seminar.

**3.7.6. IK 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%)**

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 30 September 2025 atau Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut

adalah TUNTAS) oleh LPSPL Sorong. Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti LPSPL Sorong}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada LPSPL Sorong}} \times 100$$

Tabel 3.22 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%)

|                   |                                                                                                            |           |           |                                  |                   |                       |                    |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| SK.7              | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong                                     |           |           |                                  |                   |                       |                    |                                  |
| IKU.12            | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%) |           |           |                                  |                   |                       |                    |                                  |
| Realisasi<br>2024 | Tahun 2025                                                                                                 |           |           |                                  | Tahun 2025        |                       | Renstra 2025-2029  |                                  |
|                   | Target                                                                                                     | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd<br>TW tahun<br>2024 | Target PK<br>2025 | % Realisasi<br>thd PK | Target s.d<br>2029 | % Capaian<br>thd Renstra<br>2025 |
|                   | 100                                                                                                        | 95        | 98,88     | 104,08%                          | -1,12             | 95                    | 104,08%            | 85                               |

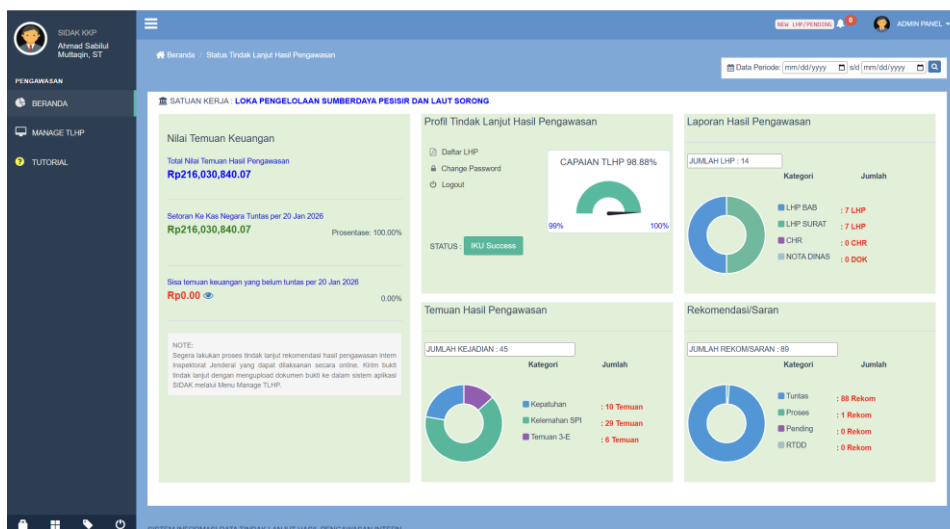
Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2025

### 1. *Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%) Tahun 2025*

Tahun 2025 LPSPL Sorong telah melakukan dua kali pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Hasil pemeriksaan pertama dilakuakn berdasarkan surat Inspektorat Jenderal KKP Nomor: B.108/ITJ.1/HP.510/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 perihal Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal s.d Triwulan I Tahun 2025 lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan, LPSPL Sorong telah menindaklanjuti 3 dari 3 rekomendasi sehingga capaian IK persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) Triwulan I Tahun 2025 adalah 100%.

Hasil pemeriksaan kedua berdasarkan surat nomor B.226/ITJ/HP.550/XI/2025 tentang Hasil Pemantauan PHLN Oceans for Prosperity Project (Proyek – LAUTRA) Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan LPSPL Sorong LPSPL Sorong memperoleh 2 rekomendasi. Hal tersebut telah ditindak lanjuti namun masih dalam proses verifikasi tim Inspektorat Jenderal sehingga diperoleh nilai akhir 98,88%. Hal ini juga didukung oleh surat penyampaian Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B. B.233 /DJPK.1/TU.210/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja

Lingkup Ditjen PK Triwulan IV Tahun 2025" nilai capaian LPSPS Sorong untuk Indikator kinerja ini adalah 98,88%. Persentase capaian Indikator Kiinerja ini adalah 104,08%.



Gambar 3.19 Screenshot aplikasi SIDAK KKP  
Sumber : sidak.kkp.go.id tanggal 1 Januari 2026

## 2. *Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Tahun 2025*

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2024 dan 2025 yaitu triwulanan. Target indikator kinerja ini pada tahun 2024 yaitu 80 sedangkan pada tahun 2025 yaitu 95. Capaian pada tahun 2024 yaitu 100% sedangkan pada tahun 2025 yaitu 98,88%. Nilai capaian tahun 2025 lebih rendah 1,12% dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh masih berprosesnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal terhadap LPSPL Sorong.

## 3. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah*

Realisasi kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup LPSPL Sorong pada tahun 2024 yaitu 100% sedangkan target nilai posisi akhir pada dokumen Renstra 2020-2024 adalah 80% sehingga capaian pada tahun 2024 telah tercapai 120% atau lebih besar dari target nilai posisi akhir pada dokumen Renstra 2020-2024.

## 4. *Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya*

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran terjadi karena penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan secara online pada laman sidak.go.id dan koordinasi dilakukan secara daring dengan aplikasi penunjang.

## 5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

### a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong selalu memonitoring secara rutin/berkala semua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Itjen sehingga selalu ada progress tindaklanjut pada aplikasi SIDAK. Setiap pegawai yang terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan tersebut memiliki tanggungjawab masing-masing dengan fungsi kontrol dari Kepala LPSPL Sorong.

### b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak ada kendala pada pencapaian target indikator ini, kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila tidak ada koordinasi dan komitmen organisasi untuk memperbaiki kinerja organisasi berdasarkan rekomendasi yang telah ada.

### c. Solusi

Belum terdapat solusi yang dilakukan karena tidak ada kendala yang menyebabkan kegagalan. Untuk mengantisipasi atau meminimalisir kegagalan agar dilakukan koordinasi antar pegawai dalam menyelesaikan rekomendasi yang ada.

## 6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 11

LPSPL Sorong telah melakukan pemantauan aplikasi SIDAK untuk memperhatikan hasil pengawasan Itjen KKP.

## 7. Rencana Aksi Triwulan I TA 2026

Pada triwulan I tahun 2026, LPSPL Sorong melakukan monitoring aplikasi SIDAK secara berkala, serta akan menindaklanjuti jika terdapat rekomendasi yang terbit pada triwulan IV tahun 2025.

### 3.7.7. IK 12 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)

Temuan LHP BPK LPSPL Sorong yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK LPSPL Sorong Tahun 2025. Cara menghitung IK ini dilakukan dengan rumus

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK LPSPL Sorong yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK LPSPL Sorong}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target.**

Contoh:

Target = 100

Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerja adalah 100.

Tabel 3.23 Capaian IK 13 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)

|                   |                                                                                                            |           |           |                                  |                   |                       |                    |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| SK.7              | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong                                     |           |           |                                  |                   |                       |                    |                                  |
| IKU.12            | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%) |           |           |                                  |                   |                       |                    |                                  |
| Realisasi<br>2024 | Tahun 2025                                                                                                 |           |           |                                  | Tahun 2025        |                       | Renstra 2025-2029  |                                  |
|                   | Target                                                                                                     | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd<br>TW tahun<br>2024 | Target PK<br>2025 | % Realisasi<br>thd PK | Target s.d<br>2029 | % Capaian<br>thd Renstra<br>2025 |
| 100               | 100                                                                                                        | 100       | 100,00%   | 0                                | 100               | 100,00%               | 100                | 100,00%                          |

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2025

### 1. *Capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup LPSPL Sorong (%) Tahun 2025*

Capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup LPSPL Sorong (%) tahun 2025 adalah 100%. Capaian ini sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Tahun 2025 tidak terdapat pemeriksaan BPK terhadap LPSPL Sorong oleh karena itu capaiannya dinilai 100%. Hal ini juga didukung oleh surat 119/DJPK.1/TU.210/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lingkup Ditjen PK Tahun 2025.

### 2. *Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025*

Capaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar 100% atau memiliki nilai capaian yang sama.

### 3. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah*

Realisasi IKM persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup LPSPL Sorong pada tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebesar 100%.

### 4. *Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya*

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi sumberdaya manusia. LPSPL Sorong memiliki pengelola keuangan (PPK, PBJ, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan) dan bmn yang kompeten dan bersertifikat.

## 5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

### a. Analisis Keberhasilan.

LPSPL Sorong segera menindaklanjuti permintaan dokumen dan menyelesaikan temuan dari BPK. Segala tindak lanjut yang dilaksanakan LPSPL Sorong disampaikan secara resmi dan berjenjang.

### b. Analisis Kegagalan/Kendala

Pada tahun 2025 belum terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini, namun kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila organisasi tidak kooperatif menindaklanjuti temuan BPK.

### c. Solusi

Belum terdapat solusi karena tidak terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini.

## 6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 11

LPSPL Sorong mengikuti pelaksanaan pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan kegiatan Ocean Prosperity Project yang dilaksanakan pada tahun 2024 yang dilakukan terhadap Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

## 7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

LPSPL akan melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan BPK jika terdapat hasil pemeriksaan pada triwulan I tahun 2026.

### 3.7.8. IK 13 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Standar penilaian antara lain:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Cara perhitungan indikator ini adalah Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (inspektorat V) dan/atau inspektorat mitra DJPKRL dan/atau tim pembangunan zona integritas DJPKRL. Jika pada tahun anggaran berjalan tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian yang digunakan adalah capaian nilai WBK tahun sebelumnya.

Tabel 3.49 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

| SK.11 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup LPSPL Sorong          |            |           |           |                         |                |                    |                   |                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| IKU.14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di LPSPL Sorong (Nilai) |            |           |           |                         |                |                    |                   |                            |
| Realisasi 2024                                                         | Tahun 2025 |           |           |                         | Tahun 2025     |                    | Renstra 2025-2029 |                            |
|                                                                        | Target     | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd tahun 2024 | Target PK 2025 | % Realisasi thd PK | Target s.d 2025   | % Capaian thd Renstra 2029 |
| 81,64                                                                  | 75         | 81,64     | 108,85%   | -                       | 75             | 108,85%            | 75                | 108,85%                    |

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2025

### 1. Capaian IK Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai) Tahun 2025

Berdasarkan mandiri oleh tim penilai dan sekretarian WBK LPSPL Sorong, pada tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 87,04. Penilaian mandiri dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dari masing masing tim kerja pembangunan ZI lingkup LPSPL Sorong.

Hasil Capaian Nilai WBK

| No | Unit Kerja      | Waktu Penilaian                                                                      | Nilai WBK |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | BKKPN Kupang    | Hasil Pemantauan Pengusulan WBBM TPN oleh Inspektorat Jenderal tanggal 12 Juni 2025  | 89,52     |
| 2  | LKKPN Pekanbaru | Hasil Pemantauan Pengusulan WBBM TPN oleh Inspektorat Jenderal tanggal 10 Maret 2025 | 91,04     |
| 3  | BPSPL Padang    | Hasil Seleksi Pengusulan WBK TPN oleh Inspektorat Jenderal tanggal 20 September 2024 | 90,40     |
| 4  | BPSPL Pontianak | Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP Tahun 2022                                        | 90,81     |
| 5  | BPSPL Denpasar  | Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP Tahun 2022                                        | 87,57     |
| 6  | BPSPL Makassar  | Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP Tahun 2022                                        | 87,41     |
| 7  | LPSPL Serang    | Hasil Pemantauan Pengusulan WBK TPN oleh Inspektorat Jenderal tanggal 10 Juni 2025   | 80,04     |
| 8  | LPSPL Sorong    | Hasil Penilaian TPI KKP Tahun 2021                                                   | 81,64     |

Gambar 3.20 Lampiran Capaian WBK UPT DJPKRL

Berdasarkan pertemuan verifikasi pelaporan kinerja disepakati nilai yang digunakan untuk pembangunan WBK WBBM adalah nilai yang diberikan oleh inspektorat V sehingga kembali digunakan nilai 81,64 sesuai dengan penilaian tahun 2021. Hal ini juga didukung oleh Surat Penyampaian dari Sekretariat 127/DJPK.1/TU.210/I/2026

tanggal 14 Januari 2026 tentang Capaian Nilai Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Keluatan.

## **2. *Perbandingan Capaian Tahun 2024 dan Tahun 2025***

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2023 dan 2024 yaitu tahunan. Tahun 2023 nilai yang diperoleh sebesar 81,64 dan tahun 2024 sebesar 81,64. Capaian tersebut sama dikarenakan tidak dilakukan penilaian WBK pada tahun 2024 dan nilai masih berdasarkan hasil penilaian WBK oleh Inspektorat Jenderal V pada tahun 2021.

## **3. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah***

Target jangka menengah untuk IKM unit kerja berpredikat menuju WBK di LPSPL Sorong adalah sebesar 75 sedangkan Realisasi IKM ini sebesar 81,64. Capaian LPSPL Sorong telah melampaui target dengan capaian 108,85%. Keberhasilan ini disebabkan karena LPSPL Sorong senantiasa memenuhi dokumen pendukung pembangunan WBK dan memantau progres pembangunan WBK melalui pelaksanaan pertemuan untuk membahas progres pembangunan WBK setiap hari Rabu.

## **4. *Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya***

Efisiensi penggunaan sumberdaya ada pada sumberdaya manusia (SDM), dengan kondisi SDM LPSPL Sorong yang terbatas, LPSPL Sorong dapat mencapai target pada tahun sebelumnya. Efisiensi penggunaan anggaran ada pada pemenuhan dokumen WBK dapat memanfaatkan teknologi informasi sehingga meminimalkan belanja perjalanan dinas.

## **5. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi***

### **a. Analisis Keberhasilan**

LPSPL Sorong memiliki 6 (enam) kelompok kerja yang tertuang pada surat tugas Kepala LPSPL Sorong Nomor: SP.70/LPSPL.1/TU.110/II/2025, yang selalu memonitor pelaksanaan kinerja organisasi dalam rangka mencapai predikat WBK sehingga masing-masing komponen penilaian dapat dimonitoring kemajuannya.

### **b. Analisis Kegagalan/Kendala**

Kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila tidak ada dokumen terkait proses terbentuknya predikat WBK di organisasi LPSPL Sorong, penataan tatalaksana,

penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang setiap tahapannya harus didokumentasikan dan diarsipkan. Jumlah SDM LPSPL Sorong yang setiap tahunnya berkurang juga membuat tidak maksimalnya pencapaian nilai WBK.

### c. Solusi

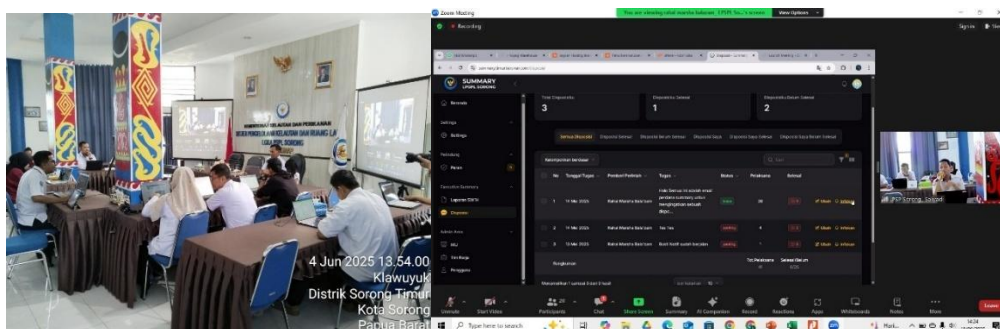
LPSPL Sorong melakukan pertemuan setiap minggu pada hari rabu dengan seluruh pegawai untuk monitoring status kelengkapan dokumen WBK, sekretaris pembangunan zona integritas memantau dan menghimbau agar setiap kelompok kerja melengkapi dokumen yang belum tersedia, serta mengupdate persentase pemenuhan dokumen yang telah disusun dan diupload.

## 6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 13

Tahun 2025, LPSPL Sorong melakukan monitoring mingguan pembangunan WBK lingkup LPSPL Sorong, pemenuhan dokumen WBK WBBM dan monitoring evaluasi Pembangunan WBK.

## 7. Rencana Aksi Triwulan I TA 2026

Tahun 2025 akan dilaksanakan pemenuhan dokumen secara berkala, monitoring kelengkapan dokumen dan menyampaikan persentase pemenuhan dokumen yang telah disusun dan diupload.



Gambar 3.21 Rapat Mingguan Pembangunan WBK WBBM Lingkup LPSPL Sorong

### 3.7.9. IK 14 Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta

arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

b) Pengawasan system kearsipan internal

- Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- Sumber daya kearsipan yang meliputi

c) Pengawasan pengelolaan arsip aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

d) Pengawasan penyelamatan arsip statis internal sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Formula perhitungan Indikator Ini antara lain

1. Nilai pengawasan kearsipan internal LPSPL Sorong akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal LPSPL Sorong merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
  - a. Aspek pengelolaan arsip dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
    - Penciptaan Arsip
    - Penggunaan Arsip
    - Pemeliharaan Arsip
    - Penyusutan Arsip
  - i. Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b. Aspek sumberdaya kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Sumberdaya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

| Kategori | Interval Skor               |
|----------|-----------------------------|
| AA       | Sangat Memuaskan > 90 – 100 |
| A        | Memuaskan > 80 – 90         |
| BB       | Sangat Baik > 70 – 80       |
| B        | Baik > 60 – 70              |
| CC       | Cukup > 50 – 60             |
| C        | Kurang > 30 – 50            |
| D        | Sangat Kurang 0 – 30        |

Tabel 3.24 Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPS Sorong (Nilai)

| SK.11          | Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup LPSPS Sorong          |           |           |                         |                |                    |                   |                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| IKU.15         | Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPS Sorong (Nilai) |           |           |                         |                |                    |                   |                            |
| Realisasi 2024 | Tahun 2025                                                       |           |           |                         | Tahun 2025     |                    | Renstra 2025-2029 |                            |
|                | Target                                                           | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd tahun 2024 | Target PK 2025 | % Realisasi thd PK | Target s.d 2025   | % Capaian thd Renstra 2029 |
| 91,92          | 80                                                               | 88,50     | 110,63%   | - 3,42                  | 80             | 110,63%            | 80                | 110,63%                    |

Sumber Data: LPSPS Sorong, per 31 Desember 2025

### 1. *Capaian IK Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPS Sorong (Nilai) Tahun 2025*

Tahun 2025 IK Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPS Sorong (Nilai) memiliki capaian 88,55 dari target 80. Persentase capaian terhadap indikator kinerja ini adalah 110,63%. Nilai ini diperoleh dari hasil penilaian internal kearsipan.

Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LPSPS Sorong berdasarkan Nota Dinas nomor 2021/SJ.6/TU.220/XI/2025 tanggal 21 November 2025 tentang Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025 diperoleh nilai 88,55 dengan kategori A atau Memuaskan (Tabel 3.25). Rincian nilai tersebut adalah nilai aspek PAD sebesar 66,80 dan nilai aspek SDK 21,75.

Tabel 3.25 Rincian Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 Lingkup LPSPL Sorong

| NO | ASPEK                                                       | NILAI STANDAR | NILAI    | BOBOT SUB-ASPEK | NILAI SUB-ASPEK | BOBOT ASPEK | NILAI AKHIR  |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 1  | ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS                             | 2.200,00      |          |                 | 95,42           | 0,70        | 66,80        |
|    | 1. SUBASPEK PENCIPTAAN ARSIP                                | 700,00        | 640,00   | 0,20            | 18,29           |             |              |
|    | 1. SUBASPEK PENGGUNAAN ARSIP                                | 200,00        | 200,00   | 0,20            | 20,00           |             |              |
|    | 1. SUBASPEK PEMELIHARAAN ARSIP                              | 1.100,00      | 1.010,00 | 0,35            | 32,14           |             |              |
|    | 1. SUBASPEK PENYUSUTAN ARSIP                                | 200,00        | 200,00   | 0,25            | 25,00           |             |              |
| 2  | ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN                                 | 300,00        |          |                 | 72,50           | 0,30        | 21,75        |
|    | 2. SUBASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN                   | 200,00        | 90,00    | 0,50            | 22,50           |             |              |
|    | 2. SUBASPEK PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN                  | 100,00        | 100,00   | 0,50            | 50,00           |             |              |
|    | <b>TOTAL NILAI STANDAR/ NILAI/ BOBOT ASPEK/ NILAI AKHIR</b> |               |          |                 |                 | <b>1,00</b> | <b>88,55</b> |

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 adalah 91,92 sedangkan capaian pada tahun 2025 sebesar 88,55. Terdapat penurunan sebesar -3,42 yang disebabkan oleh adanya perubahan format penilaian kearsipan tahun 2025 yang berkaitan dengan sertifikasi pengelola kearsipan yang ada di komponen SDK.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 Lingkup LPSPL Sorong memiliki target jangka menengah sebesar 80. Capaian LPSPL Sorong tahun 2025 terhadap indikator kinerja ini adalah 88,55. Persentase capaian LPSPL Sorong tahun 2025 terhadap target jangka menengah adalah 110,63%.

#### **4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi sumberdaya manusia. Efisiensi sumberdaya disebabkan LPSPL Sorong memiliki pegawai dengan jabatan fungsional arsiparis sehingga tidak membutuhkan banyak pegawai dalam mencapai target kinerja ini.

#### **5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi**

##### **a. Analisis Keberhasilan**

LPSPL Sorong melakukan telaah terhadap lembar kerja evaluasi (LKE) untuk penilaian indikator kinerja ini serta memenuhi hal-hal yang digunakan untuk menjawab lembar kerja evaluasi tersebut.

##### **b. Analisis Kegagalan/Kendala**

Pada tahun 2025 belum terdapat kendala dalam mencapai target indikator kinerja ini.

##### **c. Solusi**

Belum terdapat solusi yang dilakukan karena tidak ada kendala pencapaian indikator ini.

#### **6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 14**

Tahun 2025 LPSPL Sorong telah melaksanakan Rapat Pembahasan Pengisian Peta Jabatan Fungsional Arsiparis, Rapat Koordinasi Monitoring Persuratan dan Kearsipan pada Aplikasi Portal Arsiparis (Dalam Jaringan), Asistensi Persiapan Penilaian Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup UPT, Identifikasi dan Inventarisasi Arsip di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Publikasi Jaringan Informasi Kearsipan serta penilaian internal kearsipan LPSPL Sorong.

#### **7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026**

Pada triwulan I tahun 2026 akan melaksanakan evaluasi pengarsipan tahun 2024, penyusunan target kearsipan tahun 2025, penataan arsip arsip aktif di unit pengolah dan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi portal.

### 3.7.10. IK 15 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Pengisian data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada triwulan berikutnya. Formula perhitungan capaian indikator ini adalah

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di

SIRUP =

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 3.26 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)

| SK.11          | Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup LPSPL Sorong                                  |           |           |                         |                |                    |                   |                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| IKU.15         | Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%) |           |           |                         |                |                    |                   |                            |
| Realisasi 2024 | Tahun 2025                                                                               |           |           |                         | Tahun 2025     |                    | Renstra 2025-2029 |                            |
|                | Target                                                                                   | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd tahun 2024 | Target PK 2025 | % Realisasi thd PK | Target s.d 2025   | % Capaian thd Renstra 2029 |
| -              | 76                                                                                       | 100       | 120,00%   | -                       | 76             | 120%               | 76                | 120%                       |

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2025

### 1. *Capaian IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%) Tahun 2025*

Indikator kinerja ini memiliki capaian 100% pada tahun 2025. Triwulan IV tahun 2025 total Pagu pada kertas kerja klarifikasi LPSPL Sorong sebesar Rp33,127,842,000,00 dengan rekap RUP terumumkan pada aplikasi SIRUP pagu yang terumumkan sebesar Rp33,127,842,000,00 sesuai dengan surat penyampaian sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor 41/SJ.7/PL.410/I/2026 tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025.

| NO | Nama_Satker                                               | Paket RUP Terumumkan |                 |                   | Statistik Moner                  |                        |                        |                         | % RUP TERUMUMKAN                               |         |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------|
|    |                                                           | Σ RUP PENYEDIA       | Σ RUP SWAKELOLA | Σ RUP             | Program 1<br>(Kode FD / EC / DL) | Program 2<br>(Kode HB) | Program 3<br>(Kode WA) | TOTAL<br>PAGU PENGADAAN | Selisih<br>Pagu Terumumkan -<br>Pagu Pengadaan | %       |
| 1  | BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG   | 40,994,400,000       | -               | 40,994,400,000    | 36,836,599,000                   | 272,130,000            | 3,885,671,000          | 40,994,400,000          | 0                                              | 100.00% |
| 2  | BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BPSP PADANG | 7,576,678,000        | -               | 7,576,678,000     | 174,516,000                      | 4,673,911,000          | 2,728,251,000          | 7,576,678,000           | 0                                              | 100.00% |
| 3  | BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR    | 27,424,390,000       | -               | 27,424,390,000    | 21,447,885,000                   | 1,027,302,000          | 4,949,203,000          | 27,424,390,000          | 0                                              | 100.00% |
| 4  | BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR    | 26,488,912,000       | -               | 26,488,912,000    | 19,886,050,000                   | 3,418,731,000          | 3,184,131,000          | 26,488,912,000          | 0                                              | 100.00% |
| 5  | BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK   | 16,024,348,000       | -               | 16,024,348,000    | 11,832,138,000                   | 2,225,040,000          | 1,967,170,000          | 16,024,348,000          | 0                                              | 100.00% |
| 6  | LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU       | 14,006,000,985       | -               | 14,006,000,985    | 10,488,817,000                   | 994,620,000            | 2,522,563,985          | 14,006,000,985          | 0                                              | 100.00% |
| 7  | LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG      | 7,133,555,000        | -               | 7,133,555,000     | 263,002,000                      | 3,953,616,000          | 2,916,937,000          | 7,133,555,000           | 0                                              | 100.00% |
| 8  | LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG       | 33,127,842,000       | -               | 33,127,842,000    | 28,419,306,000                   | 3,247,674,000          | 1,460,862,000          | 33,127,842,000          | 0                                              | 100.00% |
| 9  | SETDIJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT              | 2,153,460,465,551    | 50,834,466,000  | 2,204,394,931,551 | 1,322,441,260,000                | 861,749,091,551        | 20,204,580,000         | 2,204,394,931,551       | 0                                              | 100.00% |

Gambar 3.22 Tangkapan layar persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan IV tahun anggaran 2025

### 2. *Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025*

Indikator ini merupakan indikator baru yang ada pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun 2024.

### 3. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah*

Indikator kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong memiliki target jangka menengah sebesar 76. Capaian LPSPL Sorong tahun 2025 terhadap indikator kinerja ini adalah 100. Persentase capaian LPSPL Sorong tahun 2025 terhadap target jangka menengah adalah 120%.

### 4. *Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya*

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran disebabkan proses pelaksanaan penginputan data dan proses pengadaan telah dilakukan secara digital sehingga menghemat penganggaran dan mempermudah pendokumentasian data.

## 5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

### a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong melakukan memiliki pegawai yang bersertifikat PBJ dan telah memahami menggunakan aplikasi SIRUP selain itu LPSPL Sorong juga memiliki hubungan yang baik dengan Pejabat Pengadaan eksternal sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan efektif.

### b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tantangan terhadap pelaksanaan IK ini adalah adanya surat instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang entang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja. Selain itu terdapat Surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) *Oceans for Prosperity Project*. Sehingga proses pengadaan tertunda.

### c. Solusi

LPSPL Sorong dapat berkonsultasi dengan Setdijen DJPKRL terkait kondisi anggaran yang dapat digunakan dan melakukan percepatan proses pengadaan untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja ini.

## 6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 15

Tahun 2025 LPSPL Sorong melaksanakan penyusunan RUP, Kertas Kerja pengadaan serta proses rekrutmen konsultan individu pendukung program Lautra.

## 7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Pada triwulan I tahun 2026 LPSPL Sorong akan melaksanakan penyusunan RUP dan Kertas Kerja pengadaan.

### 3.7.9. IK 16 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) adalah hasil evaluasi Terhadap Pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup LPSPL Sorong yang menggambarkan nilai Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Komunikasi dengan Media dan Lembaga yang Optimal di Lingkup LPSPL Sorong.

Formula perhitungan indikator ini adalah Nilai diperoleh dari hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat dengan formula perhitungan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun nilai keterbukaan informasi publik dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal lingkup LPSPL Sorong sesuai dengan kriteria:

- informatif dengan nilai 97-100;
- menuju informatif dengan nilai 80-96;
- cukup informatif dengan nilai 60-79;
- kurang informatif dengan nilai 40-59;
- tidak informatif dengan nilai <39.

Penilaian dilakukan berdasarkan lima aspek utama, yaitu Mengumumkan Informasi Publik, Menyediakan Dokumen Informasi, Sarana Prasarana, Kelembagaan, dan Digitalisasi, dengan masing-masing aspek memiliki sub-nilai yang berkontribusi terhadap total nilai keseluruhan. Bobot penilaian ditentukan berdasarkan persentase capaian dari masing-masing aspek, yang kemudian dihitung untuk memperoleh hasil akhir. Evaluasi difokuskan pada relevansi, akurasi, dan kekinian informasi yang dipublikasikan sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi. Setiap jawaban dalam kuesioner harus didukung dengan bukti pelaksanaan, yang dapat berupa tautan website, dokumen digital, atau soft file. Apabila terdapat aspek yang tidak relevan atau tidak tersedia, maka unit organisasi wajib memberikan keterangan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan. Keterlambatan atau ketidaksempurnaan dalam penyediaan informasi akan berakibat pada pengurangan nilai.

Tabel 3.27 Bobot Penilaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik

| NO                                               | ASPEK YANG DINILAI            | SUB NILAI | PERSENTASI | TOTAL | BOBOT | HASIL |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|-------|-------|-------|
| TABULASI NILAI SAQ (Self Assessment Questionare) |                               |           |            |       |       |       |
| 1                                                | Mengumumkan Informasi public  | 15        | 60%        | 60    | 80%   | 80    |
| 2                                                | Menyediakan Dokumen Informasi | 25        |            |       |       |       |
| 3                                                | Sarana Prasarana              | 30        |            |       |       |       |
| 4                                                | Kelembagaan                   | 20        | 40%        | 40    |       |       |
| 5                                                | Digitalisasi                  | 10        |            |       |       |       |
| Jumlah                                           |                               | 100       | 100%       |       |       |       |
| TABULASI NILAI PRESENTASI UJI INFORMASI PUBLIK   |                               |           |            |       |       |       |
| 1                                                | Persentasi Publik             | 100       | 100%       | 100   | 20%   | 20    |
|                                                  | Jumlah                        | 100       | 100%       | 100   |       |       |
| TOTAL NILAI KESELURUHAN                          |                               |           |            |       | 100%  | 100   |

Bobot penilaian dalam keterbukaan informasi publik dihitung berdasarkan dua komponen utama, yaitu hasil pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) sebesar 80% dan presentasi informasi publik sebesar 20%. Penilaian dalam SAQ dilakukan dengan menilai lima aspek utama, yaitu Mengumumkan Informasi Publik, Menyediakan Dokumen Informasi, Sarana Prasarana, Kelembagaan, dan Digitalisasi, dengan total sub-nilai 100. Persentase capaian dari masing-masing aspek dihitung untuk menentukan skor akhir, yang kemudian dikalikan dengan bobot 80%. Dalam contoh tabel, persentase ketercapaian adalah 60% untuk sebagian aspek dan 40% untuk aspek lainnya, menghasilkan nilai total 100. Bobot akhir dari pengisian SAQ sebesar 80% memberikan nilai 80. Selanjutnya, 20% sisanya diperoleh dari aspek presentasi informasi publik, sehingga total nilai keterbukaan informasi publik mencapai 100%. Dengan metode ini, evaluasi dilakukan secara menyeluruh, memastikan keseimbangan antara pengisian kuesioner dan kemampuan unit organisasi dalam mempresentasikan informasi publik secara langsung.

Tabel 3.28 Capaian IK 16 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

| SK.11 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup LPSPL Sorong          |            |           |           |                         |                |                    |                   |                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| IKU.16 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) |            |           |           |                         |                |                    |                   |                            |
| Realisasi 2024                                                         | Tahun 2025 |           |           |                         | Tahun 2025     |                    | Renstra 2025-2029 |                            |
|                                                                        | Target     | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd tahun 2024 | Target PK 2025 | % Realisasi thd PK | Target s.d 2025   | % Capaian thd Renstra 2029 |
| -                                                                      | 91         | 100       | 109,89%   | -                       | 91             | 109,89%            | 91                | 109,89%                    |

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2025

### 1. Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) Tahun 2025 LPSPL Sorong memperoleh nilai 100 dengan kategori Informatif berdasarkan surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan nomor 25/PPID-KKP/XII/2025 tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025.

| NO  | UNIT ORGANISASI                                          | NILAI |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar  | 100   |
| 2.  | Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang    | 100   |
| 3.  | Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong     | 100   |
| 4.  | Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang     | 100   |
| 5.  | Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak | 100   |
| 6.  | Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar  | 100   |
| 7.  | Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang        | 100   |
| 8.  | Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru      | 100   |
| 9.  | Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap                     | 100   |
| 10. | Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi                      | 100   |

Gambar 3.23 Tangkapan layar lampiran hasil penilaian evaluasi mandiri monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik

## 2. *Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Tahun 2024 dan Tahun 2025*

Indikator ini merupakan indikator baru yang ada pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun 2024.

## 3. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah*

Indikator kinerja Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 Lingkup LPSPL Sorong memiliki target jangka menengah sebesar 91. Capaian LPSPL Sorong tahun 2025 terhadap indikator kinerja ini adalah 100. Persentase capaian LPSPL Sorong tahun 2025 terhadap target jangka menengah adalah 109,89%.

## 4. *Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya*

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi sumberdaya manusia. Efisiensi sumberdaya disebabkan LPSPL Sorong tim PPID yang mampu mengelola informasi publik di badan publik, menyediakan, mendokumentasikan, menyimpan, dan melayani permintaan informasi dari masyarakat secara cepat, tepat, dan efisien.

## 5. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi*

### a. *Analisis Keberhasilan*

LPSPL Sorong memiliki tim PPID yang bertugas melaksanakan IK keterbukaan informasi publik sehingga IK ini dapat berjalan secara optimal. Selain itu LPSPL

Sorong juga memiliki berbagai macam sosial media yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi publik kepada masyarakat.

**b. Analisis Kegagalan/Kendala**

Tantangan pelaksanaan IK ini adalah adanya penundaan pelaksanaan pengadaan lautra yang dilaksanakan berdasar Surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) *Oceans for Prosperity Project*. Sehingga informasi terkait pengadaan ini mengalami penundaan.

**c. Solusi**

Tim PPID LPSPL Sorong dapat berkoordinasi dengan pihak Sesditjen PKRL terkait kondisi anggaran lautra.

**6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 16**

Tahun 2025, LPSPL Sorong aktif menerbitkan publikasi pelayanan publik berupa pelayanan jenis ikan dilindungi dan pelayanan pemanfaatan ruang laut, pelayanan PPID dan informasi kegiatan LPSPL Sorong di sosial media, pemenuhan dokumen PPID dan Monev *Self Assessment Quisioner* (SAQ) tahun 2025.

**7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026**

Pada triwulan I tahun 2025 LPSPL Sorong akan menerbitkan informasi terkait pelayanan public berupa pelayanan pemanfaatan ruang laut dan informasi lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong.

### 3.8. Akuntabilitas Anggaran

Dalam rangka mendukung kinerja LPSPL Sorong pada tahun anggaran 2025, DIPA awal LPSPL Sorong tahun 2025 sebesar Rp40.227.209.000 yang bersumber dari Rupiah Murni Rp8,450,539,000,00; PNBP sebesar Rp1,625,000,000,00 dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp30,151,670,000,00 yang terbit pada tanggal 30 November 2024 dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tanggal 24 Januari 2025. Hal ini juga sesuai dengan DIPA Petikan pagu definitif (pagu awal) tahun 2025 dengan Nomor: SP DIPA-

032.07.2.477440/2025 tanggal 2 Desember 2024. Anggaran tersebut mendukung 3 (tiga) program yaitu program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp30,651,670,000,00, program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp1.125.000.000,00, dan program dukungan manajemen sebesar Rp8.450.539.000,00. Jika dijabarkan 3 program tersebut menjadi 4 kegiatan yaitu (1) Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut sebesar Rp30,651,670,000,00,00; (2) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp300,000,000,00; (3) Perencanaan Ruang Laut sebesar Rp825,000,000,00; dan (4) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp8,450,539,000,00. Pada revisi DIPA 1 s.d 4 terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp10.502.610.000,00 yang terdapat pada belanja 52 sedangkan pada Revisi DIPA ke 5 tanggal 17 Juni 2025 dengan nomor SP DIPA-032.07.2.477440/2025 terdapat pembukaan blokir dana yang bersumber dari PNPB sebesar Rp882.895.000,00 sehingga total anggaran yang diblokir sebesar Rp 9.619.715.000,00. Revisi DIPA ke 9 tanggal 30 Oktober 2025 dengan nomor SP DPA-032.07.2.477.440/2025 kode DS 4418-0015-6114-4300 terdapat perubahan anggaran menjadi (1) Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut sebesar Rp30,651,670,000,00,00; (2) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp300,000,000,00; (3) Perencanaan Ruang Laut sebesar Rp3,825,000,000,00; dan (4) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp7,443,472,000,00,00.

Realisasi anggaran pada tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Rincian serapan anggaran LPSPL Sorong Per RO (Lampiran V) yaitu Rp26,825,564,248 atau 36,46% dari anggaran Rp42,220,142,000 dengan gambaran sebagai berikut :

Tabel 3.29 Rincian Sumber Anggaran LPSPL Sorong Tahun 2025

| Uraian                              | Tahun 2025           |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                     | Anggaran             | Realisasi            | %            |
| <b>Sumber Anggaran Rupiah Murni</b> |                      |                      |              |
| Belanja Pegawai                     | 4,768,163,000        | 4,561,707,765        | 95,67        |
| Belanja Barang                      | 2,675,309,000        | 1,853,505,897        | 69,28        |
| Belanja Modal                       | 0                    | 0                    | 0            |
| Belanja Bantuan Sosial              | 0                    | 0                    | 0            |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>7,443,472,000</b> | <b>6,415,213,662</b> | <b>86,19</b> |

| Sumber Anggaran PNPB   |                       |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Belanja Pegawai        | 0                     | 0                     | 0            |
| Belanja Barang         | 2,275,000,000         | 2,350,000,000         | 64,43        |
| Belanja Modal          | 1,465,771,298         | 2,240,381,970         | 95,34        |
| Belanja Bantuan Sosial | 0                     | 0                     | 0            |
| <b>TOTAL</b>           | <b>4,625,000,000</b>  | <b>3,706,153,268</b>  | <b>80,13</b> |
| Sumber Anggaran PLN    |                       |                       |              |
| Belanja Pegawai        | 0                     | 0                     | 0            |
| Belanja Barang         | 16,537,917,000        | 5,079,470,822         | 30,71        |
| Belanja Modal          | 13,613,753,000        | 193,740,000           | 1,42         |
| Belanja Bantuan Sosial | 0                     | 0                     | 0            |
| <b>TOTAL</b>           | <b>30,151,670,000</b> | <b>5,273,210,822</b>  | <b>17,49</b> |
| <b>TOTAL AKUMULASI</b> | <b>42,220,142,000</b> | <b>15,394,577,752</b> | <b>36,46</b> |

Berdasarkan tabel (Tabel 3.29) tersebut dapat diketahui secara umum serapan LPSPL Sorong masih sangat rendah. Serapan terbesar berasal dana yang bersumber Rupiah Murni sebesar Rp6,415,213,662,00 dari belanja 51 dan belanja 52 dengan persentase serapan 86,19%. Sementara itu anggaran yang berasal dari PNPB memiliki realisasi sebesar Rp3,706,153,268,00 yang berasal dari belanja 52 dan 53 dengan persentase serapan 80,13% dan Pinjaman Luar Negeri serapannya sebesar 17,49% dengan realisasi serapan Rp5,273,210,822. Rendahnya serapan PNPB disebabkan karena pada triwulan III anggaran tersebut baru dilakukan buka blokir pada revisi POK ke 5 pada 17 Juni 2025 dan pelaksanaan kegiatan dilakukan pada akhir September. Anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri serapannya relative rendah hanya sebesar 17,49% disebabkan karena adanya penundaan pelaksanaan anggaran lainnya berdasarkan Surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Oceans for Prosperity Project sehingga pelaksanaan kegiatan baru dimulai pada awal Triwulan III. Tantangan lain dalam penyerapan anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri adalah rendahnya realisasi belanja 53 yang hanya sebesar Rp193,740,000,00 dari total anggaran 13,613,753,000,00 dengan persentase sebesar 1,42%. Hal ini disebabkan karena LPSPL Sorong tidak dapat merealisasikan pengadaan akibat tidak adanya penyedia jasa yang melakukan penawaran untuk mendukung proses pengadaan.

Sementara itu berdasarkan rincian realisasi anggaran LPSPS Sorong per RO (lampiran V) diketahui bahwa serapan LPSPS Sorong sebesar 26,825,564,248 jika dihitung menggunakan pagu tanpa blokir serapannya sebesar 36,46%.

Realisasi anggaran pada masing-masing indikator yang terdapat pada Perjanjian Kinerja LPSPS Sorong sebagai berikut (Tabel 3.30).

Tabel 3.30 Realisasi Anggaran Per Indikator pada Perjanjian Kinerja

| No.          | IKU                                                                                                                                    | Kegiatan Pendukung | Pagu (Rp)             | Pagu Efektif         | Realisasi (Rp)       | Blokir (Rp)          | Sisa (Rp)             | Realisasi Brutto (Pagu Keseluruhan) (%) | Realisasi Netto (Pagu Tanpa Nilai Blokir) (%) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1            | Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPS Sorong (Provinsi) | a                  | 16,537,917,000        | 8,853,203,000        | 5,079,470,822        | 7,684,714,000        | 11,458,446,178        | 30.71                                   | 57.37                                         |
| 2            | Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPS Sorong (Orang)                      | b                  |                       |                      |                      |                      |                       |                                         |                                               |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                        |                    | <b>16,537,917,000</b> | <b>8,853,203,000</b> | <b>5,079,470,822</b> | <b>7,684,714,000</b> | <b>11,458,446,178</b> | <b>30.71</b>                            | <b>57.37</b>                                  |
| 3            | Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPS Sorong (Jenis)                      | a                  | 500,000,000           | 346,329,000          | 345,418,399          | 153,671,000          | 154,581,601           | 49.80                                   | 99.74                                         |

| TOTAL |                                                                                                                          |   |                                                                                                          | 500,000,000   | 346,329,000   | 345,418,399 | 153,671,000 | 154,581,601 | 69.08  | 99.74  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| 4     | Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai) |   |                                                                                                          | -             | -             | -           | -           | -           | -      |        |
| TOTAL |                                                                                                                          |   |                                                                                                          | -             | -             | -           | -           | -           |        | 97.36  |
| 5     | Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau - pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen )               | a | Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar ) | 300,000,000   | 156,630,000   | 152,493,473 | 143,370,000 | 147,506,527 | 40,29  | 97.36  |
| TOTAL |                                                                                                                          |   |                                                                                                          | 300,000,000   | 156,630,000   | 152,493,473 | 143,370,000 | 147,506,527 |        | 97.36  |
| 8     | Dokumen Operasional isasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen )         | a | Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut                                                                        | 717,454,000   | 587,516,000   | 551,107,298 | 129,938,000 | 166,346,702 | 37.81  | 93.80  |
|       |                                                                                                                          | b | Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut                                                                        | 492,546,000   | 177,420,000   | 153,142,488 | 315,126,000 | 339,403,512 | 47.07  | 86.32  |
|       |                                                                                                                          | c | Sarana pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut                                                     | 265,000,000   | 265,000,000   | 263,609,640 | -           |             |        | 99.48  |
| TOTAL |                                                                                                                          |   |                                                                                                          | 1,475,000,000 | 1,029,936,000 | 967,859,426 | 445,064,000 | 505,750,214 | 85     | 93.97  |
| 9     | Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                                                              | a | Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan                                                              | 14,573,000    | 14,573,000    | 14,534,171  | -           | 38,829      | 75.79  | 99.73  |
| TOTAL |                                                                                                                          |   |                                                                                                          | 14,573,000    | 14,573,000    | 14,534,171  | -           | 38,829      | 99.73  | 99.73  |
| 10    | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)                                                                      | a | Layanan BMN                                                                                              | 9,104,000     | 9,104,000     | 9,103,650   | -           | 350         | 100.00 | 100.00 |
|       |                                                                                                                          | b | Layanan Perencanaan Program dan Anggaran                                                                 | 170,000       | 170,000       |             | -           | 170,000     | 0.00   | 0.00   |

|       |                                                                                                                                |   |                                                                      |                    |                    |                   |   |                    |        |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------|--------|--------|
|       | lingkup<br>LPSP<br>Sorong<br>(Nilai)                                                                                           | c | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan                                     | 10,583,00<br>0     | 10,583,0<br>00     | 10,582,85<br>0    | - | 150                | 100.00 | 100.00 |
| TOTAL |                                                                                                                                |   |                                                                      | 19,857,00<br>0     | 19,857,0<br>00     | 19,686,50<br>0    | - | 170,500            | 99.14  | 99.14  |
| 11    | Nilai<br>Kinerja<br>Perencana<br>an<br>Anggaran<br>Lingkup<br>LPSP<br>Sorong<br>(Nilai)                                        | a | Layanan<br>Perencanaan<br>Program dan<br>Anggaran                    |                    | -                  |                   |   | -                  |        |        |
| TOTAL |                                                                                                                                |   |                                                                      | -                  | -                  | -                 | - | -                  |        | 0.00   |
| 12    | Laporan<br>SPIP yang<br>disusun<br>lingkup<br>LPSP<br>Sorong<br>(Dokumen<br>)                                                  | a | Layanan<br>Monitoring,<br>Evaluasi, dan<br>Pelaporan                 |                    | -                  |                   |   | -                  |        |        |
| TOTAL |                                                                                                                                |   |                                                                      | -                  | -                  | -                 | - | -                  |        | 0.00   |
| 13    |                                                                                                                                | a | Layanan<br>Manajemen<br>SDM                                          | 180,000            | 180,000            | 170,000           | - | 10,000             | 0.00   |        |
| TOTAL |                                                                                                                                |   |                                                                      | 180,000            | 180,000            | 170,000           | - | 10,000             | 0.00   | 94.44  |
| 14    | Nilai Unit<br>Kerja<br>Berpredika<br>t Menuju<br>WBK di<br>LPSP<br>Sorong<br>(Nilai)                                           | a | Layanan<br>Organisasi<br>dan Tata<br>Kelola<br>Internal              | 208,000            | 208,000            | 208,000           | - | -                  | 0.00   |        |
| TOTAL |                                                                                                                                |   |                                                                      | 208,000            | 208,000            | 208,000           | - | -                  | 1.00   | 100.00 |
| 15    | Nilai<br>pengawasa<br>n<br>kearsipan<br>internal<br>Lingkup<br>LPSP<br>Sorong<br>(Nilai)                                       | a | Layanan<br>Persuratan,<br>Tata Usaha<br>dan<br>Kearsipan             | 219,321,0<br>00    | 219,321,<br>000    | 217,176,6<br>07   | - | 2,144,393          | 26.88  |        |
| TOTAL |                                                                                                                                |   |                                                                      | 219,321,0<br>00    | 219,321,<br>000    | 217,176,6<br>07   | - | 2,144,393          | 99.02  |        |
| 16    | Persentase<br>rencana<br>umum<br>pengadaan<br>PBJ yang<br>diumumkan<br>pada<br>SIRUP<br>lingkup<br>LPSP<br>Sorong<br>(%) (PLN) | a | Penjangkaua<br>n dan<br>pelibatan<br>Pemangku<br>Kepentingan         | 13,613,75<br>3,000 | 13,613,7<br>53,000 | 193,740,0<br>00   | - | 13,420,01<br>3,000 | 0.00   | 1.42   |
|       |                                                                                                                                | b | Sarana<br>pendukung<br>Penyelenggar<br>aan Penataan<br>Ruang<br>Laut | 2,350,000,<br>000  | 2,350,00<br>0,000  | 2,240,381,<br>970 |   |                    |        | 95.34  |
| TOTAL |                                                                                                                                |   |                                                                      | 15,963,75<br>3,000 | 15,963,7<br>53,000 | 2,434,121,<br>970 | - | 13,420,01<br>3,000 | -      | 15.25  |

|                 |                                                                 |   |                                 |                |                |                |               |                |       |        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------|--------|
| 17              | Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) | a | Layanan Kehumasan               | 170,000        | 170,000        | 170,000        | -             | -              | 0.00  | 100.00 |
| TOTAL           |                                                                 |   |                                 | 170,000        | 170,000        | 170,000        | -             | -              | 0.00  |        |
| 18              | Non IKU                                                         | a | Belanja Pegawai                 | 4,768,163,000  | 4,768,163,000  | 4,561,707,765  |               | 206,455,235    | 61.28 | 95.67  |
|                 |                                                                 | b | Belanja Operasional perkantoran | 2,421,000,000  | 1,603,334,000  | 1,601,560,619  | 817,666,000   | 819,439,381    | 78.13 | 99.89  |
| TOTAL           |                                                                 |   |                                 | 7,189,163,000  | 6,371,497,000  | 6,163,268,384  | 817,666,000   | 1,025,894,616  | 85.73 | 96.73  |
| TOTAL AKUMULASI |                                                                 |   |                                 | 42,220,142,000 | 32,975,657,000 | 15,394,577,752 | 9,244,485,000 | 26,825,564,248 | 36.46 | 46.68  |

Pada Tahun Anggaran 2025, LPSPL Sorong mengelola total pagu anggaran sebesar Rp42.220.142.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp15.394.577.752. Secara persentase, penyerapan anggaran ini berada pada angka 36,46% dari total pagu bruto. Terdapat dana blokir sebesar Rp9.244.485.000 yang mempengaruhi ruang gerak pelaksanaan kegiatan, sehingga apabila dihitung berdasarkan pagu efektif (dana yang tersedia untuk digunakan), kinerja realisasi sesungguhnya mencapai 46,68%. Kinerja keuangan ini sangat dipengaruhi oleh komposisi sumber dana, di mana penyerapan anggaran operasional rutin menunjukkan hasil yang sangat positif. Anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) berhasil terserap sebesar 86,19% dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 80,13%, sedangkan sumber dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) menjadi tantangan utama dengan realisasi yang tertahan di angka 17,49% dari alokasi yang sangat besar.

Efektivitas pelaksanaan program inti pengelolaan ruang laut menunjukkan capaian yang variatif namun produktif pada sektor-sektor kunci. Kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, khususnya pendataan dan informasi konservasi jenis ikan (IKU 3), terlaksana sangat optimal dengan realisasi mencapai 99,74%. Demikian pula dengan kegiatan penataan ruang laut, di mana penyusunan dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil (IKU 5) dan operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut (IKU 8) masing-masing mencatatkan penyerapan sebesar 97,36% dan 93,97%. Meskipun demikian, terdapat kendala pada kegiatan fasilitasi evaluasi kawasan konservasi (IKU 1 & 2) yang hanya sebesar 57,37%. Hal ini disebabkan oleh tertundanya pelaksanaan kegiatan akibat penundaan pelaksanaan

kegiatan yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri. Selain itu besarnya jumlah anggaran tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM yang dimiliki oleh LPSP Sorong untuk melaksanakan pelaksanaan kegiatan.

Tantangan terbesar yang mempengaruhi agregat kinerja tahun 2025 terletak pada pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri (PLN), khususnya pada IKU 16 terkait Rencana Umum Pengadaan. Komponen "Penjangkauan dan pelibatan Pemangku Kepentingan" memiliki alokasi anggaran yang dominan sebesar Rp13,6 miliar, namun realisasinya sangat minim di angka 1,42%. Hal ini kontras dengan komponen "Sarana pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut" dalam sumber dana yang sama, yang justru mampu terserap hingga 95,34%. Rendahnya serapan pada komponen pelibatan pemangku kepentingan disebabkan karena tidak adanya vendor yang mengajukan penawaran untuk mendukung upaya pengadaan, inilah yang menjadi faktor utama mengapa persentase realisasi total terlihat rendah secara statistik, meskipun kegiatan teknis lainnya berjalan lancar.

Di sisi lain, dukungan manajemen dan layanan internal perkantoran menunjukkan performa yang sangat prima dalam memfasilitasi operasional organisasi. Hal ini tercermin dari capaian sempurna 100% pada layanan Barang Milik Negara (BMN), layanan manajemen keuangan, serta layanan organisasi dan tata kelola internal menuju WBK. Kinerja pengawasan kearsipan internal juga sangat baik dengan capaian 99,02%. Selain itu, realisasi belanja pegawai dan operasional perkantoran (Non-IKU) terserap sangat efektif masing-masing sebesar 95,67% dan 99,89% dari pagu efektif, menandakan bahwa fungsi birokrasi dan dukungan administrasi LPSP Sorong telah berjalan stabil dan akuntabel sepanjang tahun 2025

### 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Membandingkan capaian kinerja LPSP Sorong dengan capaian kinerja Unit Kerja lain bertujuan untuk melihat apakah capaian LPSP Sorong sudah maksimal atau dapat ditingkatkan lagi dengan mengacu dari capaian unit kerja lainnya.

Tabel 3.31 Membandingkan capaian kinerja LPSP Sorong dengan Unit Pelaksana Teknis lain pada tahun 2025.

| No | Indikator Kinerja | LPSP Sorong Tahun 2025 | LPSP Serang Tahun 2025 | BPSPL Makassar Tahun 2025 |
|----|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|----|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|

|   |                                                                                                                                        | Target | Capaian | Kinerjaku | Target | Capaian | Kinerjaku | Target | Capaian | Kinerjaku |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|
| 1 | Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi) | 3      | 6       | 120       | 1      | 6       | 120       | 4      | 4       | 100       |
| 2 | Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang)                      | 20     | 27      | 120       | 11     | 11      | 100       | 40     | 70      | 120       |
| 3 | Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)                      | 3      | 5       | 120       | 5      | 5       | 100       | 5      | 10      | 120       |
| 4 | Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai)               | 80     | 99,92   | 120       | 80     | 96      | 120       | 80     | 99,91   | 120       |
| 5 | Dokumen identifikasi pemanfaatan                                                                                                       | 1      | 1       | 100       | 1      | 1       | 100       | 1      | 1       | 100       |

| No | Indikator Kinerja                                                                                              | LPSPL Sorong Tahun 2025 |         |           | LPSPL Serang Tahun 2025 |         |           | BPSPL Makassar Tahun 2025 |         |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------------------|---------|-----------|
|    |                                                                                                                | Target                  | Capaian | Kinerjaku | Target                  | Capaian | Kinerjaku | Target                    | Capaian | Kinerjaku |
|    | pulau - pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)                                       |                         |         |           |                         |         |           |                           |         |           |
| 6  | Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen) | 2                       | 2       | 100       | 2                       | 2       | 100       | 2                         | 2       | 100       |
| 7  | Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                                                    | 70                      | 88,10   | 120       | 70                      | 89,60   | 120       | 70                        | 92      | 120       |
| 8  | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                            | 89                      | 78,64   | 87,89     | 89                      | 96,52   | 108,44    | 89                        | 89,73   | 100,82    |
| 9  | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                         | 71,50                   | 98,57   | 120       | 71,5                    | 98,33   | 120       | 71,50                     | 100     | 120       |
| 10 | Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)                                                       | 4                       | 4       | 100%      | 4                       | 4       | 100%      | 4                         | 4       | 100%      |
| 11 | Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)                                                       | 80                      | 85,98   | 107,48    | 80                      | 88,42   | 110,53    | 80                        | 89,92   | 89,92     |
| 12 | Persentase                                                                                                     | 95                      | 98,88   | 104,08%   | 95                      | 100     | 105,26%   | 95                        | 100     | 105,26%   |

| No | Indikator Kinerja                                                                               | LPSPL Sorong Tahun 2025 |         |           | LPSPL Serang Tahun 2025 |         |           | BPSPL Makassar Tahun 2025 |         |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------------------|---------|-----------|
|    |                                                                                                 | Target                  | Capaian | Kinerjaku | Target                  | Capaian | Kinerjaku | Target                    | Capaian | Kinerjaku |
|    | Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%) |                         |         |           |                         |         |           |                           |         |           |
| 13 | Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPSPL Sorong (%)                                     | 100                     | 100     | 100       | 100                     | 100     | 100       | 100                       | 100     | 100       |
| 14 | Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                            | 75                      | 81,64   | 108,85    | 75                      | 80,04   | 106,72    | 75                        | 87,41   | 120       |
| 15 | Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                | 80                      | 88,5    | 110,63    | 80                      | 80,59   | 100,74    | 70                        | 85      | 120       |
| 16 | Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)        | 76                      | 100     | 120%      | 76                      | 100     | 120%      | 76                        | 100     | 120%      |
| 17 | Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                 | 91                      | 100     | 120       | 91                      | 100     | 120       | 91                        | 100     | 120       |

**Keterangan:**



: Capaian lebih tinggi dibandingkan LPSPL Serang dan BPSPL Makassar

: Capaian lebih tinggi dibandingkan LPSPL Serang namun lebih rendah dibandingkan dengan BPSPL Makassar

: Capaian sama dengan LPSPL Serang namun lebih rendah dibandingkan dengan

|   |                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------|
|   | BPSPL Makassar                                                           |
| : | Capaian sama dengan LPSPL Serang dan BPSPL Makassar                      |
|   | Capaian lebih rendah dibandingkan dengan LPSPL Serang dan BPSPL Makassar |

Dari tabel diatas diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan target antara LPSPL Sorong, LPSPL Serang dan BPSPL Makassar

### 1. Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (IKU 1)

- **Lebih Tinggi dari BPSPL Makassar:** LPSPL Sorong berhasil memfasilitasi 6 daerah, sedangkan BPSPL Makassar memiliki capaian 4 daerah.
- **Sama dengan LPSPL Serang:** Capaian LPSPL Sorong sama dengan LPSPL Serang (6 daerah)

LPSPL Sorong memiliki capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan BPSPL Makassar dan sama dengan LPSPL Serang disebabkan oleh LPSPL Sorong berperan aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan terkait pendampingan pengelolaan kawasan konservasi dan fasilitasi penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong.

### 2. Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi (IKU 2)

- **Lebih Tinggi dari LPSPL Serang:** LPSPL Sorong melatih 27 orang, lebih banyak dibandingkan LPSPL Serang (11 orang).
- **Lebih Rendah dari BPSPL Makassar:** Secara jumlah orang, capaian LPSPL Sorong masih di bawah BPSPL Makassar yang mencapai 70 orang, meskipun nilai kinerja (kinerjaku) keduanya sama-sama mencapai batas maksimal 120%

LPSPL Sorong memiliki capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan LPSPL Serang dan lebih rendah dibandingkan dengan BPSPL Makassar. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan target capaian Indikator Kinerja. LPSPL Sorong merencanakan pelaksanaan kegiatan yang berlokasi di wilayah Raja Ampat karena merupakan kawasan konservasi yang menjadi lokasi project Lautra.

### 3. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (IKU 3)

- **Lebih Tinggi dari LPSPL Serang (Secara Kinerja):** LPSPL Sorong mencatatkan nilai kinerja 120% (realisasi 5 dari target 3), sedangkan LPSPL Serang mencatatkan nilai kinerja 100% (realisasi 5 dari target 5) hal ini disebabkan karena LPSPL Sorong aktif melakukan kegiatan sosialisasi terkait pelayanan pemanfaatan jenis yang berdampak pada pelaku usaha lebih memahami aturan peredaran jenis ikan, dilindungi, terancam punah dan/atau apendiks CITES. Selain itu LPSPL Sorong memiliki kelengkapan data dan aktif melakukan pendataan jenis ikan dilindungi, terancam punah dan/atau apendiks CITES sehingga diwilayah Papua Barat Daya diberikan kuota pemanfaatan Napoleon pada tahun 2025.
- **Sama dengan BPSPL Makassar (Secara Kinerja):** Kedua UPT sama-sama mencapai nilai kinerja maksimal 120%, meskipun jumlah jenis yang ditangani BPSPL Makassar (10 jenis) lebih banyak secara kuantitas. Hal ini disebabkan karena BPSPL Makassar berada di lokasi transit atau pintu lalu lintas pengiriman berbagai produk jenis ikan dilindungi, terancam punah dan/atau apendiks CITES sehingga capaiannya lebih banyak dibandingkan dengan LPSPL Sorong.

### 4. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan (IKU 4)

**Lebih Tinggi dari LPSPL Serang dan BPSPL Makassar:** LPSPL Sorong mencatatkan nilai pelayanan tertinggi yaitu **99,92**. Angka ini lebih tinggi dibandingkan BPSPL Makassar (99,91) dan lebih tinggi dibandingkan LPSPL Serang (96). Hal ini disebabkan karena LPSPL Sorong berhasil mengoptimalkan upaya pelayanan publik di wilayah kerja LPSPL Sorong.

### 5. Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil (IKU 5)

- **Sama dengan LPSPL Serang dan BPSPL Makassar :** LPSPL Sorong, LPSPL Serang, dan BPSPL Makassar memiliki capaian yang sama, yaitu 1 dokumen dengan nilai kinerja 100% berupa dokumen laporan identifikasi pemanfaatan pulau pulau kecil.

## 6. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut (IKU 6)

- **Sama dengan UPT Lain:** Ketiga UPT memiliki capaian yang sama, yaitu 2 dokumen dengan nilai kinerja 100% yang terdiri dari laporan verifikasi teknis KKPRL dan laporan pengendalian KKPRL

## 7. Nilai PM SAKIP (IKU 7)

- **Lebih Rendah dari UPT Lain:** Nilai SAKIP LPSPL Sorong (88,10) tercatat lebih rendah dibandingkan LPSPL Serang (89,60) dan BPSPL Makassar (92). Hal ini disebabkan karena LPSPL Sorong belum memiliki inovasi dibidang perencanaan kinerja.

## 8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran / IKPA (IKU 8)

- **Lebih Rendah dari UPT Lain:** Capaian IKPA LPSPL Sorong sebesar 78,64 adalah yang terendah jika dibandingkan dengan LPSPL Serang (96,52) dan BPSPL Makassar (89,73). Hal ini disebabkan oleh rendahnya serapan LPSPL Sorong dan besarnya deviasi halaman III DIPA.

## 9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL (IKU 9)

- **Lebih Tinggi dari LPSPL Serang:** Nilai LPSPL Sorong (98,57) lebih unggul dibandingkan LPSPL Serang (98,33) namun **lebih Rendah dari BPSPL Makassar:** Capaian LPSPL Sorong masih di bawah BPSPL Makassar yang mencapai nilai sempurna 100. Tingginya nilai NKPA menunjukkan bahwa LPSPL Sorong telah berhasil melakukan efisiensi dan perencanaan anggaran dengan baik,

## 10. Laporan SPIP yang disusun (IKU 10)

- **Sama dengan UPT Lain:** Ketiga UPT memiliki capaian yang sama, yaitu 4 dokumen laporan yang terdiri dari Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024, Laporan SPIP Triwulan I tahun 2025, Laporan SPIP Triwulan II tahun 2025 dan Laporan SPIP Triwulan III tahun 2025.

## 11. Indeks Profesionalitas ASN (IKU 11)

- Indeks Profesionalitas ASN LPSPL Sorong (85,98) tercatat lebih rendah dibandingkan LPSPL Serang (88,42) dan BPSPL Makassar (89,92). Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian sistem penilaian SKP di internal LPSPL Sorong untuk kategori sangat baik sesuai dengan edaran Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 3 tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

#### **12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan (IKU 12)**

- **Lebih Rendah dari UPT Lain:** LPSPL Sorong mencapai 98,88%, sedangkan LPSPL Serang dan BPSPL Makassar keduanya mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena tindak lanjut yang telah dilakukan LPSPL Sorong masih dalam proses verifikasi oleh tim Inspektorat Jenderal.

#### **13. Persentase penyelesaian temuan BPK (IKU 13)**

- **LPSPL Sorong memiliki capaian yang sama dengan LPSPL Serang dan BPSPL Makassar** berhasil mencapai penyelesaian 100%. Tahun 2025 tidak terdapat pemeriksaan BPK yang dilakukan di LPSPL Sorong.

#### **14. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (IKU 14)**

- **Lebih Tinggi dari LPSPL Serang:** Nilai LPSPL Sorong (81,64) lebih tinggi dibandingkan LPSPL Serang (80,04).
- **Lebih Rendah dari BPSPL Makassar:** Nilai LPSPL Sorong lebih rendah dibandingkan BPSPL Makassar yang mencapai 87,41

Hal ini disebabkan karena LPSPL Sorong senantiasa melakukan pementuhan dokumen WBK secara berkala namun hingga tahun 2025 LPSPL Sorong belum menerima penilaian capaian WBK Kembali oleh Inspektorat Jenderal dan masih menggunakan hasil penilaian tahun 2021.

#### **15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (IKU 15)**

- **Lebih Tinggi dari UPT Lain:** LPSPL Sorong mencatatkan nilai tertinggi yaitu **88,5**, mengungguli BPSPL Makassar (85) dan LPSPL Serang (80,59). Hal ini disebabkan karena LPSPL Sorong memiliki arsiparis dan seluruh data dukung kearsipan telah terpenuhi dengan baik.

#### **16. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP (IKU 16)**

- LPSPL Sorong, BPSPL Makassar dan LPSPL Serang mencatatkan capaian yang sama yaitu 100%. Tahun 2025 LPSPL Sorong telah menyampaikan seluruh rencana pengadaan di aplikasi SIRUP dengan total Pagu pada kertas kerja klarifikasi LPSPL Sorong sebesar Rp33,127,842,000,00 dengan rekap RUP

terumumkan pada aplikasi SIRUP pagu yang terumumkan sebesar Rp33,127,842,000,00.

#### **17. Nilai Keterbukaan Informasi Publik (IKU 17)**

- LPSPL Sorong, BPSPL Makassar dan LPSPL Serang mencatatkan capaian yang sama yaitu 100 dengan kategori informatif. LPSPL Sorong telah melakukan pelayanan PPID dengan baik dan transparan selain itu data dukung LKE penilaian Keterbukaan Informasi Publik telah dilakukan dengan baik.

## BAB

### 4 PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) LPSPL Sorong pada Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan dalam mencapai Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. LPSPL Sorong mempunyai 13 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target kinerja diantaranya:
  - a. IK 1 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi) Sorong tercapai 6 Provinsi dari target 3 Provinsi dengan persentase kinerjaku 120,00%
  - b. IK 2 Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang) tercapai 27 orang dari target 20 orang dengan persentase kinerjaku 120%,
  - c. IK 3 Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) tercapai 5 jenis dari target 3 jenis dengan persentase kinerjaku 120%
  - d. IK 4 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai) tercapai 99,92 dari target 80 dengan persentase kinerjaku 120%
  - e. IK 6 Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) tercapai 88,10, jenis dari target 80 jenis dengan persentase kinerjaku 110,12%
  - f. IK 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai) tercapai 78,10 dari target 89 dengan persentase capaian 85,89%
  - g. IK 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai) tercapai 98,57 dari target 81,5 dengan persentase capaian 120,00%
  - h. IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks) tercapai 85,98 dari target 80 dengan persentase capaian 107,47%

- i. IK 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%) tercapai 98,88 dari target 85 dengan persentase capaian 116,33%
  - j. IK 12 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai) tercapai 81,64 dari target 75 dengan persentase capaian 108,85%
  - k. IK 14 Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) tercapai 88,50 dari target 80 dengan persentase capaian 110,63%
  - l. IK 15 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%) tercapai 100 dari target 76 dengan persentase capaian 120,00%
  - m. IK 16 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) lingkup LPSPL Sorong (%) tercapai 100 dari target 91 dengan persentase capaian 109,89%
2. LPSPL Sorong mempunyai 3 indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target kinerja yaitu
- a. IK 5 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen) tercapai 1 dokumen dari target 1 dokumen dengan persentase capaian 100%,
  - b. IK 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen) tercapai 2 dokumen dari target 2 dokumen dengan persentase capaian 100%,
  - c. IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen) tercapai 4 dokumen dari target 4 dokumen dengan persentase capaian 100%,
3. LPSPL Sorong mempunyai 1 indikator kinerja yang capaiannya dibawah target kinerja yaitu IK 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai) tercapai 78,10 dari target 89 dengan persentase capaian 84,89.
4. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Mandatory LPSPL Sorong Tahun 2025 adalah **112,65** (kategori istimewa).

#### 4.2. Rekomendasi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait kinerja Triwulan III Tahun 2025, yaitu:

1. Tahun 2025 LPSPL Sorong memiliki nilai deviasi halaman III DIPA yang tinggi dan pengelolaan UP TUP yang rendah hal ini menyebabkan IK Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran tidak tercapai, oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan RPD dengan realisasi anggaran, pemantauan UP TUP dan pemantauan IKPA secara berkala
2. Terdapat perpindahan sejumlah pegawai yang disebabkan oleh pemekaran organisasi akibatnya jumlah pegawai semakin sedikit, oleh karena itu direkomendasikan untuk melakukan analisis beban kinerja tahun 2025, dialog kinerja dan pembuatan matriks peran hasil untuk membagi pekerjaan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi pegawai

#### 4.3. Tindaklanjut Atas Rekomendasi Periode Sebelumnya

Terdapat rekomendasi yang telah tindak lanjuti untuk perbaikan kinerja LPSPL Sorong pada tahun 2025 diantaranya :

Tabel 4.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2025

| No                           | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                    | Tindak Lanjut                                                | Data Dukung                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Triwulan I Tahun 2025</b> |                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                       |
|                              | Terdapat blokir pada DIPA LPSPL Sorong yang akan dibuka oleh karena itu disarankan agar LPSPL Sorong melakukan revisi DIPA setelah blokir terbuka agar dapat melaksanakan kegiatan pendukung Indikator Kinerja | Telah dilakukan revisi DIPA untuk pendukung pembukaan blokir | <a href="https://bit.ly/dadukLKJ2025">https://bit.ly/dadukLKJ2025</a> |
|                              | Pada Triwulan II akan ada buka blokir anggaran yang bersumber dari PNBPN oleh                                                                                                                                  | LPSPL Sorong telah berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal | <a href="https://bit.ly/dadukLKJ2025">https://bit.ly/dadukLKJ2025</a> |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                               | karena itu disarankan agar LPSPL Sorong berkoordinasi dengan Sesditjen DJPK terkait MP PNBP untuk memastikan waktu anggaran dapat digunakan sehingga dukungan anggaran terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja dapat optimal.                                                                                                                                                 | Pengelolaan Kelautan terkait MP PNBP                                                                                                                                                  |                                                                       |
|                               | Terdapat Indikator Kinerja yang menggunakan sumber dana Pinjaman Luar Negeri, untuk mengantisipasi sumber dana tersebut masih belum dapat digunakan disarankan agar LPSPL Sorong dapat berkoordinasi dengan mitra kerja konservasi dan Pemerintah Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan kegiatan dan kegiatan dapat dilakukan bersama. | LPSPL Sorong telah berkoordinasi dengan mitra kerja kawasan konservasi dan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Daerah untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan kegiatan | <a href="https://bit.ly/dadukLKJ2025">https://bit.ly/dadukLKJ2025</a> |
| <b>Triwulan II Tahun 2025</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
| 1                             | Terdapat deviasi halaman III DIPA yang tinggi oleh karena itu disarankan agar dapat melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan melakukan                                                                                                                                                                                                           | Telah dilakukan revisi DIPA pada Triwulan III tahun 2025                                                                                                                              | <a href="https://bit.ly/dadukLKJ2025">https://bit.ly/dadukLKJ2025</a> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                | revisi administrasi<br>penyesuaian Halaman III DIPA.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                       |
| 2                              | Perlu dilakukan pemantauan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran                                                                                                                                                                                            | Telah dilakukan pemantauan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran secara berkala                     | <a href="https://bit.ly/dadukLKJ2025">https://bit.ly/dadukLKJ2025</a> |
| 3                              | Pada Triwulan II telah terdapat buka blokir anggaran yang bersumber dari PNBPN dan sudah terdapat izin penggunaan anggaran Lautra oleh sebab itu disarankan agar LPSPL Sorong dapat segera melaksanakan kegiatan dengan berpatokan rencana kegiatan dan RPD. | Telah dilakukan pelaksanaan kegiatan yang anaggarannya bersumber dari PNBPN dan Pinjaman Luar Negeri | <a href="https://bit.ly/dadukLKJ2025">https://bit.ly/dadukLKJ2025</a> |
| <b>Triwulan III Tahun 2025</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                       |
|                                | Terdapat deviasi halaman III DIPA yang tinggi oleh karena itu disarankan agar dapat melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan melakukan revisi administrasi penyesuaian Halaman III DIPA.                                         | Telah dilakukan revisi DIPA pada Triwulan IV tahun 2025                                              | <a href="https://bit.ly/dadukLKJ2025">https://bit.ly/dadukLKJ2025</a> |
|                                | Perlu dilakukan pemantauan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran secara berkala                                                                                                                                                                             | Telah dilakukan pemantauan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran secara berkala                     | <a href="https://bit.ly/dadukLKJ2025">https://bit.ly/dadukLKJ2025</a> |

## LAMPIRAN

## Lampiran I. Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong TA 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUTJALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMAR [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [sespridijenpri@kkp.go.id](mailto:sespridijenpri@kkp.go.id)PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (LPSPL)  
SORONG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hendrik Sombo**

Jabatan : Plt. Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal  
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Loka Pengelolaan Sumber  
Daya Pesisir dan Laut Sorong

Hendrik Sombo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (LPSPL)**  
**SORONG**

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA |                                                                                                                                        | TARGET |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.               | Terselenggaranya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong                                 | 1.                | Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi) | 3      |
| 2.               | Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong                                                | 2.                | Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang)                      | 20     |
| 3.               | Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong | 3.                | Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)                      | 3      |
| 4.               | Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong             | 4.                | Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)                         | 2      |
| 5.               | Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan pulau - pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong                                                      | 5.                | Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau - pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)                              | 1      |
| 6.               | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong                                                                              | 6.                | Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                                                                            | 88     |
|                  |                                                                                                                                                     | 7.                | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                                                    | 92     |
|                  |                                                                                                                                                     | 8.                | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                                                 | 71,5   |
|                  |                                                                                                                                                     | 9.                | Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)                                                                               | 4      |

| SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA                                                                                              | TARGET |
|------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |  | 10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)                                                   | 87     |
|                  |  | 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%) | 95     |
|                  |  | 12. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPSPL Sorong (%)                                                | 100    |
|                  |  | 13. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                       | 75     |
|                  |  | 14. Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                           | 80     |
|                  |  | 15. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)                   | 76     |
|                  |  | 16. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)                                            | 91     |

### Data Anggaran

| NO.                                                                                           | KEGIATAN                                                                       | ANGGARAN (Rp.)        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                                                                                            | Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut | 30.651.670.000        |
| 2.                                                                                            | Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                    | 300.000.000           |
| 3.                                                                                            | Perencanaan Ruang Laut                                                         | 825.000.000           |
| 4.                                                                                            | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut              | 8.450.539.000         |
| <b>Total Anggaran Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong Tahun 2025</b> |                                                                                | <b>40.227.209.000</b> |

Jakarta, . Januari 2025

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal  
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

  
Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama  
Plh. Kepala Loka Pengelolaan Sumber  
Daya Pesisir dan Laut Sorong

  
Hendrik Sombo

Lampiran II. Sertifikat ISO 9001:2015



Lampiran III. Sertifikat ISO 37001:2016



## Certificate of Registration

**Registration No. : QAIC / ID / 11130 - E**  
**QAI Indonesia Certification**  
 Hereby grants to:

**LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SORONG**  
**Jl. KPR PDAM KM. 10, Klawuyuk, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya**

*(hereinafter called the Registered Institution) the right to be listed in the Directory of Registered Institution in respect of the services listed below. These services shall be offered by the Registered Institution at or from only the address given below in accordance with the Anti-bribery Management System in compliance with*

### ISO 37001:2016

Approved Scope to which this Certificate refers:  
**Provision of Public Administration in Monitoring Trading Traffic of Endangered and Protected Fish**

*(Further clarification regarding the Scope of this Certificate and the applicability of ISO 37001:2016 requirement may be obtained by consulting the organization)*  
 For and on behalf of QAI Indonesia

  
 Ir. Joko Nursapto, MEng.Sc-RLA

**Certificate Issue Date : 19 July 2024 - Re-assessment Date : 19 July 2025**  
**Date of Initial Registration : 19 July 2024 - Certificate Expiry Date : 19 July 2027**  
 This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by the Governing Board. This certificate has a three-year certification cycle and must be renewed every year before the re-assessment date.

**QAI INDONESIA  
CERTIFICATION**  
 Address: Jl. Surabaya No.11, Menteng,  
 Jakarta, 10310  
 Telp: 021 - 21230866  
 Email: admin@qai.co.id  
 Website QAI: www.qai.co.id  
 Website Accreditor: www.ascb.com







## Lampiran IV. Piagam Penghargaan LPSPL Sorong Tahun 2025



## Lampiran V. Realisasi Anggaran Per RO Tahun 2025

| 032.07.4<br>77440 | DITJEN PRL-LOKA PSPL SORONG                                                          |                                                                                                                          | VOLUME | KELUARAN | PAGU               | REALISASI          | SISA<br>ANGGARAN   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                   |                                                                                      |                                                                                                                          |        |          | 42,220,142,00<br>0 | 15,394,577,75<br>2 | 26,801,276,73<br>6 |
| 032.07.F<br>D     | Program Kualitas Lingkungan<br>Hidup                                                 |                                                                                                                          |        |          | 30,651,670,00<br>0 | 5,618,629,221      | 25,033,040,77<br>9 |
| 2362              | Perlindungan Dan Pemanfaatan<br>Kawasan Konservasi Dan<br>Keanekaragaman Hayati Laut |                                                                                                                          |        |          | 30,651,670,00<br>0 | 5,618,629,221      | 25,033,040,77<br>9 |
| 2362.QM<br>A      | Data dan Informasi Konservasi Biota<br>Perairan                                      |                                                                                                                          | 1      | Dokumen  | 500,000,000        | 345,418,399        | 154,581,601        |
| 2362.QM<br>A.002  | Data dan Informasi Konservasi<br>Biota Perairan                                      |                                                                                                                          |        |          | 500,000,000        | 345,418,399        | 154,581,601        |
| 051               | Data dan Informasi Konservasi<br>Biota Perairan                                      |                                                                                                                          |        |          | 500,000,000        | 345,418,399        | 154,581,601        |
| A                 | Verifikasi Lapang Data dan Informasi<br>Konservasi Biota Perairan                    |                                                                                                                          |        |          | 29,092,000         |                    | 29,092,000         |
|                   | B                                                                                    | Operasional Pemanfaatan Data dan<br>Informasi Konservasi Biota Perairan                                                  |        |          | 124,579,000        |                    | 124,579,000        |
|                   | C                                                                                    | Operasional Pemanfaatan Data dan<br>Informasi Konservasi Biota Perairan                                                  |        |          | 320,562,000        | 320,427,509        | 134,491            |
|                   | D                                                                                    | Verifikasi Lapang Data dan Informasi<br>Konservasi Biota Perairan                                                        |        |          | 25,767,000         | 24,990,890         | 776,110            |
| 2362.REA          | Konservasi Kawasan/rehabilitasi<br>Ekosistem                                         |                                                                                                                          | 814000 | Hektar   | 30,151,670,00<br>0 | 5,273,210,822      | 24,878,459,178     |
| 2362.RE<br>A.004  | Oceans For Prosperity Project -<br>Lautra                                            |                                                                                                                          |        |          | 30,151,670,00<br>0 | 5,273,210,822      | 24,878,459,178     |
| 051               | Surveillance Patrol Inside                                                           |                                                                                                                          |        |          | 30,151,670,00<br>0 | 5,273,210,822      | 24,878,459,178     |
| A                 | Surveillance Patrol Inside                                                           |                                                                                                                          |        |          | 2,714,906,000      | 2,110,483,296      | 604,422,704        |
| C<br>A            | C                                                                                    | Monitoring Biofisik, Sosial Ekonomi<br>dan Budaya di KKD Mare-Maluku<br>Utara                                            |        |          | 561,551,000        | 489,897,111        | 71,653,889         |
|                   | D                                                                                    | Penjangkauan dan Pelibatan<br>Pemangku Kepentingan 2025                                                                  |        |          | 1,075,200,000      | 736,223,174        | 338,976,826        |
|                   | E                                                                                    | Reviu dan Update Rencana<br>Pengelolaan Kawasan Konservasi<br>(Daerah)-Kepulauan Raja Ampat<br>Provinsi Papua Barat Daya |        |          | 1,544,860,000      | 529,080,272        | 1,015,779,728      |

|                      |                                                                                              |          |                              |                      |                      |                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| F                    | Pendampingan Review-update Rencana Pengelolaan KKD Kepulauan Babar                           |          |                              | 1,002,480,000        | 105,208,784          | 897,271,216        |
| G                    | Penanganan Biota Laut Dilindungi, Terancam Punah dan/atau Appendiks Cites                    |          |                              | 70,669,000           | 960,000              | 69,709,000         |
| GB                   | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi (Daerah), (Mare, Kei Kecil dan Babar)      |          |                              | 2,526,029,000        |                      | 2,526,029,000      |
| GC                   | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi (Daerah), (Kei Kecil dan Maluku)           |          |                              | 574,939,000          |                      | 574,939,000        |
| GD                   | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi (Daerah), (Babar Provinsi Maluku)          |          |                              | 658,232,000          |                      | 658,232,000        |
| H                    | Fasilitas Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil |          |                              | 140,334,000          | 133,666,241          | 6,667,759          |
| HA                   | Penyusunan Master Plan Penguatan Kawasan Konservasi Daerah Wilayah Kerja LPSPL Sorong        |          |                              | 851,852,000          |                      | 851,852,000        |
| I                    | Konsultasi Publik Rencana Zonasi KKD Kei Kecil                                               |          |                              | 350,000,000          | 243,780,600          | 106,219,400        |
| IA                   | Penyusunan DED Kawasan Konservasi (Daerah)                                                   |          |                              | 3,073,662,000        |                      | 3,073,662,000      |
| J                    | Baseline Data Kesehatan Terumbu Karang Di KKD Kepulauan Raja Ampat                           |          |                              | 553,203,000          | 416,038,040          | 137,164,960        |
| M                    | Reviu-Update Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Daerah Raja Ampat                  |          |                              | 270,000,000          | 119,257,383          | 150,742,617        |
| N                    | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah Kepulauan Babar                     |          |                              | 300,000,000          | 95,688,128           | 204,311,872        |
| Q                    | Reviu-Update Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Daerah Mare                        |          |                              | 270,000,000          | 99,187,793           | 170,812,207        |
| R                    | Sarana dan Prasarana                                                                         |          |                              | 13,613,753,000       | 193,740,000          | 13,420,013,000     |
| <b>032.07.H B</b>    | <b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>                                            |          |                              | <b>4,125,000,000</b> | <b>3,360,734,869</b> | <b>739,987,619</b> |
| <b>2365</b>          | <b>Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>                                           |          |                              | <b>300,000,000</b>   | <b>152,493,473</b>   | <b>147,506,527</b> |
| 2365.PB W            | Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan[Base Line]                                         | 1        |                              | 300,000,000          | 152,493,473          | 147,506,527        |
| <b>2363.PB W.001</b> | <b>Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar</b>                           | <b>1</b> | <b>Rekomendasi Kebijakan</b> | 300,000,000          | 152,493,473          | 147,506,527        |
| <b>051</b>           | <b>Rekomendasi Pemafaatn Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang disusun (PNBP)</b>                   |          |                              | 300,000,000          | 152,493,473          | 147,506,527        |
| A                    | Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil                                         |          |                              | 143,370,000          | -                    | 143,370,000        |

|               |   |                                                                                                  |   |                                                       |               |               |             |
|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|               | B | Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil                                             |   |                                                       | 156,630,000   | 152,493,473   | 4,136,527   |
| 2366          |   | Penataan Ruang Laut                                                                              |   |                                                       | 3,825,000,000 | 3,208,241,396 | 592,481,092 |
| 2366.PBT      |   | Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan[Base Line]                                                 | 1 | Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen | 1,210,000,000 | 704,249,786   | 481,472,702 |
| 2366.PB T.009 |   | Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Beresiko Rendah | 1 | Rekomendasi Kebijakan                                 | 1,210,000,000 | 704,249,786   | 481,472,702 |
| 052           |   | Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut                                                                |   |                                                       | 717,454,000   | 551,107,298   | 166,346,702 |
| A             |   | Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut                                                                |   |                                                       | 129,938,000   |               | 129,938,000 |
|               | B | Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut                                                                |   |                                                       | 202,516,000   | 185,747,490   | 16,768,510  |
|               | C | Sertifikasi Pilot Drone Untuk Verifikator Pemanfaatan Ruang Laut                                 |   |                                                       | 233,800,000   | 222,157,500   | 11,642,500  |
|               | D | Bahan Materi Publikasi Penataan Ruang Laut dan Dukungan Verifikasi Lapangan                      |   |                                                       | 22,950,000    | 17,719,875    | 5,230,125   |
|               | E | Dukungan Ruang Pelayanan dan Verifikasi Lapang KKPRL                                             |   |                                                       | 128,250,000   | 125,482,433   | 2,767,567   |
| 053           |   | Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut                                                                |   |                                                       | 492,546,000   | 153,142,488   | 315,126,000 |
| A             |   | Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                       |   |                                                       | 139,438,000   |               | 139,438,000 |
|               | B | Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut                                                              |   |                                                       | 175,688,000   |               | 175,688,000 |
|               | D | Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut                                                              |   |                                                       | 177,420,000   | 153,142,488   | 24,277,512  |
| 2366.RAL      |   | Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan                                                | 1 | Unit                                                  | 2,615,000,000 | 2,503,991,610 | 111,008,390 |
| 2366.RA L.001 |   | Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut                                             | 1 | Unit                                                  | 2,615,000,000 | 2,503,991,610 | 111,008,390 |
| 51            |   | Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut                                             |   |                                                       | 2,615,000,000 | 2,503,991,610 | 111,008,390 |
|               | A | Sarana Prasarana Pendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut                                   |   |                                                       | 611,702,000   | 610,980,001   | 721,999     |
|               | B | Sarana Prasarana Pendukung Pusat Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut                                |   |                                                       | 204,600,000   | 197,300,000   | 7,300,000   |

|               |   |                                                                   |   |                                               |               |               |               |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|               | C | Sarana Prasarana Pendukung Pusat Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut |   |                                               | 25,000,000    | 24,029,640    | 970,360       |
|               | D | Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Rapat LPSPL Sorong         |   |                                               | 853,750,000   | 767,500,209   | 86,249,791    |
|               | E | Peningkatan Aset Jalan Akses Utama                                |   |                                               | 518,400,000   | 515,561,760   | 2,838,240     |
|               | F | Gerai Pelayanan LPSPL Sorong                                      |   |                                               | 240,000,000   | 239,580,000   | 420,000       |
|               | G | Pengagantian Atap Kantor                                          |   |                                               | 161,548,000   | 149,040,000   | 12,508,000    |
| 032.07.WA     |   | Program Dukungan Manajemen                                        |   |                                               | 7,443,472,000 | 6,415,213,662 | 1,028,248,338 |
| 2367          |   | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut |   |                                               | 7,443,472,000 | 6,415,213,662 | 1,028,248,338 |
| 2367.EBA      |   | Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]                    | 6 | Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi , Unit | 7,417,966,000 | 6,389,926,641 | 1,028,039,359 |
| 2367.EB A.956 |   | Layanan BMN                                                       | 2 | Layanan                                       | 9,104,000     | 9,103,650     | 350           |
| 051           |   | Layanan BMN                                                       |   |                                               | 9,104,000     | 9,103,650     | 350           |
| A             |   | Rekonsiliasi SAI - SIMAK BMN                                      |   |                                               | 9,104,000     | 9,103,650     | 350           |
| 2367.EB A.958 |   | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                         | 1 | Layanan                                       | 170,000       | 170,000       | -             |
| 051           |   | Layanan Kehumasan                                                 |   |                                               | 170,000       | 170,000       | -             |
| A             |   | Layanan Kehumasan                                                 |   |                                               | 170,000       | 170,000       | -             |
| 2367.EB A.960 |   | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                       | 1 | Layanan                                       | 208,000       | 208,000       | -             |
| 053           |   | Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP         |   |                                               | 208,000       | 208,000       | -             |
| A             |   | Zona Integritas WBK/WBBM LPSPL Sorong                             |   |                                               | 208,000       | 208,000       | -             |
| 2367.EB A.962 |   | Layanan Umum                                                      | 1 | Layanan                                       | 219,321,000   | 217,176,607   | 2,144,393     |
| 051           |   | Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan                      |   |                                               | 219,321,000   | 217,176,607   | 2,144,393     |

|               |                                               |    |                                        |               |               |               |
|---------------|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| A             | Layanan Tata Usaha                            |    |                                        | 219,321,000   | 217,176,607   | 2,144,393     |
| 2367.EB A.994 | Layanan Perkantoran                           | 1  | Layanan                                | 7,189,163,000 | 6,163,268,384 | 1,025,894,616 |
| 001           | Gaji dan Tunjangan                            |    |                                        | 4,768,163,000 | 4,561,707,765 | 206,455,235   |
| A             | Pembayaran gaji dan tunjangan                 |    |                                        | 4,768,163,000 | 4,561,707,765 | 206,455,235   |
| 002           | Operasional dan Pemeliharaan Kantor           |    |                                        | 2,421,000,000 | 1,601,560,619 | 819,439,381   |
| A             | Operasional Kantor                            |    |                                        | 1,880,319,000 | 1,420,312,498 | 460,006,502   |
| B             | Pemeliharaan Kantor                           |    |                                        | 540,681,000   | 181,248,121   | 359,432,879   |
| 2362.EBC      | Layanan Manajemen SDM Internal                |    |                                        | 180,000       | 170,000       | 10,000        |
| 2367.EB C.954 | Layanan Manajemen SDM                         | 31 | Orang                                  | 180,000       | 170,000       | 10,000        |
| 051           | Layanan Manajemen SDM                         |    |                                        | 180,000       | 170,000       | 10,000        |
| A             | Layan Pengelolaan Kinerja Pegawai             |    |                                        | 180,000       | 170,000       | 10,000        |
| 2367.EBD      | Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line] | 2  | Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi | 25,326,000    | 25,117,021    | 208,979       |
| 2367.EB D.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran          | 1  | Dokumen                                | 170,000       | -             | 170,000       |
| 051           | Layanan Perencanaan Program dan Anggaran      |    |                                        | 170,000       | -             | 170,000       |
| A             | Perencanaan Program dan Anggaran              |    |                                        | 170,000       |               | 170,000       |
| 2367.EB D.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi               | 1  | Dokumen                                | 14,573,000    | 14,534,171    | 38,829        |
| 051           | Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan   |    |                                        | 14,573,000    | 14,534,171    | 38,829        |
| A             | Laporan Program dan Kegiatan lingkup DJPRL    |    |                                        | 14,573,000    | 14,534,171    | 38,829        |

|                  |     |                                  |  |   |            |            |     |
|------------------|-----|----------------------------------|--|---|------------|------------|-----|
| 2367.EB<br>D.955 |     | Layanan Manajemen Keuangan       |  | 1 | 10,583,000 | 10,582,850 | 150 |
|                  | 051 | Layanan Manajemen Keuangan       |  |   | 10,583,000 | 10,582,850 | 150 |
|                  | A   | Manajemen dan Pelaporan Keuangan |  |   | 10,583,000 | 10,582,850 | 150 |